



Dokumen Evaluasi

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021



LPPSP

LEMBAGA PENGKAJIAN
& PENGEMBANGAN

LEMBAGA PENGKAJIAN & PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

TAHUN 2021



LAPORAN AKHIR

Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan: Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum/ Dengan Output Dokumen Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021



LPPSP

• LEMBAGA PENGKAJIAN & PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA PEMBANGUNAN
• INSTITUTE FOR STUDY AND IMPROVEMENT
OF DEVELOPMENT RESOURCES

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum	I-2
C. Maksud dan Tujuan	I-5
D. Ruang Lingkup	I-6
E. Sistematika Dokumen Analisis Capaian RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	I-6
BAB II METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	II-1
A. Pendekatan Teknis dan Metodologi.....	II-1
B. Kerangka Pikir	II-11
C. Teknik Pengumpulan Data	II-16
D. Teknik Pengolahan Data.....	II-16
BAB III ANALISIS PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN DAERAH.....	III-1
A. Pencapaian Target Pendapatan Daerah.....	III-1
B. Analisis Belanja Daerah	III-12
C. Analisis Pembiayaan Daerah	III-18
BAB IV EVALUASI KINERJA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU SAMPAI TAHUN 2019.....	IV-1
A. Evaluasi Indikator Kinerja Tujuan	IV-3
B. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran	IV-12

BAB V EVALUASI KINERJA PROGRAM RPJMD	..V-1
A. Capaian Kinerja Program Masing-Masing Urusan Pemerintahan.....	V-1
B. Permasalahan Masing-Masing Urusan Pemerintahan.....	V-138
 BAB VI PENUTUP	 .VI-1
A. Kesimpulan.....	VI-1
B. Rekomendasi	VI-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Menurut Permendagri 86 Tahun 2017	II-17
Tabel 2.2	Status Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD	II-18
Tabel 3.1	Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019.....	III-10
Tabel 3.2	Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah Tahun 2017-2019	III-17
Tabel 3.3	Pencapaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2019.....	III-20
Tabel 4.1	Status Capaian target RPJMD Sampai dengan Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD	IV-2
Tabel 4.2	Jumlah Indikator dan Persentase Capaian Terhadap Target Masing-Masing Tujuan RPJMD.....	IV-3
Tabel 4.3	Capaian Kinerja Tujuan 1, Melestarikan Budaya Melayu dan Nilai-Nilai Agama Sampai dengan Tahun 2019	IV-5
Tabel 4.4	Capaian Kinerja Tujuan 2, Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan di Masyarakat Sampai dengan Tahun 2019	IV-5
Tabel 4.5	Capaian Kinerja Tujuan 3, Meningkatkan Keterhubungan Antar Kabupaten/Kota Sampai dengan Tahun 2019	IV-6
Tabel 4.6	Capaian Kinerja Tujuan 4, Cakupan Pelayanan Sanitasi (Air Limbah Perkotaan, Drainase, Persampahan) Sampai dengan Tahun 2019	IV-7
Tabel 4.7	Capaian Kinerja Tujuan 5, Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia Sampai dengan Tahun 2019.....	IV-8
Tabel 4.8	Capaian Kinerja Tujuan 6, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Sampai dengan Tahun 2019	IV-8
Tabel 4.9	Capaian Kinerja Tujuan I, Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan Sampai dengan Tahun 2019.....	IV-9

Tabel 4.10	Capaian Kinerja Tujuan 8, Meningkatkan Pengembangan Perekonomian Pariwisata dan Kemaritiman Sampai dengan Tahun 2019.....	IV-10
Tabel 4.11	Capaian Kinerja Tujuan 9, Meningkatkan Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan Guna Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Sampai dengan Tahun 2019.....	IV-10
Tabel 4.12	Capaian Kinerja Tujuan 10, Meningkatkan Iklim Ekonomi yang Kondusif Sampai dengan Tahun 2019.....	IV-11
Tabel 4.13	Capaian Kinerja Tujuan 11, Meningkatkan Ekspor dan Produktivitas Industri Memanfaatkan Bahan Baku Lokal Sampai dengan Tahun 2019	IV-11
Tabel 4.14	Capaian Kinerja Tujuan 12, Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup Sampai dengan Tahun 2019	IV-12
Tabel 4.15	Capaian Kinerja Tujuan 13, Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Sampai dengan Tahun 2019	IV-12
Tabel 4.16	Capaian Kinerja Sasaran 1, Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu sebagai Kekayaan Budaya Daerah Sampai dengan Tahun 2019	IV-14
Tabel 4.17	Capaian Kinerja Sasaran 2, Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Agama Sampai dengan Tahun 2019	IV-14
Tabel 4.18	Capaian Kinerja Sasaran 3, Meningkatnya Ketertiban dan Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat Sampai dengan Tahun 2019	IV-15
Tabel 4.19	Capaian Kinerja Sasaran 4, Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik Sampai dengan Tahun 2019	IV-16
Tabel 4.20	Capaian Kinerja Sasaran 5, Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi Sampai dengan Tahun 2019	IV-17
Tabel 4.21	Capaian Kinerja Sasaran 6, Meningkatnya Kapasitas dan Fungsi Sanitasi Sampai dengan Tahun 2019.....	IV-18
Tabel 4.22	Capaian Kinerja Sasaran 7, Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih Sampai dengan Tahun 2019	IV-18

Tabel 4.23	Capaian Kinerja Sasaran 8, Berkurangnya Kawasan Kumuh Sampai dengan Tahun 2019.....	IV-19
Tabel 4.24	Capaian Kinerja Sasaran 9, Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Sampai dengan Tahun 2019.....	IV-19
Tabel 4.25	Capaian Kinerja Sasaran 10, Meningkatnya Kualitas Pendidikan Sampai dengan Tahun 2019	IV-20
Tabel 4.26	Capaian Kinerja Sasaran 11, Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja Sampai dengan Tahun 2019.....	IV-21
Tabel 4.27	Capaian Kinerja Sasaran 12, Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Sampai dengan Tahun 2019	IV-21
Tabel 4.28	Capaian Kinerja Sasaran 13, Angka Kemiskinan Menurun Sampai dengan Tahun 2019.....	IV-22
Tabel 4.29	Capaian Kinerja Sasaran 14, Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Sampai dengan Tahun 2019	IV-23
Tabel 4.30	Capaian Kinerja Sasaran 15, Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan Sampai dengan Tahun 2019	IV-24
Tabel 4.31	Capaian Kinerja Sasaran 16, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Sampai dengan Tahun 2019	IV-25
Tabel 4.32	Capaian Kinerja Sasaran 17, Meningkatnya Produksi Pertanian Sampai dengan Tahun 2019	IV-25
Tabel 4.33	Capaian Kinerja Sasaran 18, Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan Sampai dengan Tahun 2019	IV-26
Tabel 4.34	Capaian Kinerja Sasaran 19, Meningkatnya Realisasi Investasi dan Daya Saing Koperasi dan UKM Sampai dengan Tahun 2019	IV-27
Tabel 4.35	Capaian Kinerja Sasaran 20, Meningkatnya Kuantitas Produksi Industri Pengolahan Berbasis Bahan Baku Lokal Sampai dengan Tahun 2019	IV-28
Tabel 4.36	Capaian Kinerja Sasaran 21, Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Sampai dengan Tahun 2019	IV-29

Tabel 4.37	Capaian Kinerja Sasaran 22, Berkurangnya Kerusakan Lingkungan, Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan Sampai dengan Tahun 2019	IV-30
Tabel 4.38	Capaian Kinerja Sasaran 23, Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Sampai dengan Tahun 2019	IV-31
Tabel 4.39	Capaian Kinerja Sasaran 24, Meningkatnya Pendapatan Daerah, dan Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel Sampai Dengan Tahun 2019	IV-32
Tabel 5.1	Jumlah Indikator dan Capaian Berdasarkan Urusan.....	V-2
Tabel 5.2	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-5
Tabel 5.3	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-8
Tabel 5.4	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-15
Tabel 5.5	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukinan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-19
Tabel 5.6	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-23
Tabel 5.7	Capaian Kinerja Urusan Sosial dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-28
Tabel 5.8	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-32
Tabel 5.9	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-36
Tabel 5.10	Capaian Kinerja Urusan Pangan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-38

Tabel 5.11	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-40
Tabel 5.12	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-44
Tabel 5.13	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-47
Tabel 5.14	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-49
Tabel 5.15	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-51
Tabel 5.16	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-54
Tabel 5.17	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi Informatika dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-57
Tabel 5.18	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-50
Tabel 5.19	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-62
Tabel 5.20	Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-64
Tabel 5.21	Capaian Kinerja Urusan Statistik dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-66
Tabel 5.22	Capaian Kinerja Urusan Persndian dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-68
Tabel 5.23	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-70
Tabel 5.24	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-72

Tabel 5.25	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-74
Tabel 5.26	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-76
Tabel 5.27	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-81
Tabel 5.28	Capaian Kinerja Urusan Pertanian dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-83
Tabel 5.29	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir R RPJMD sampai Tahun 2019	V-86
Tabel 5.30	Capaian Kinerja Urusan Enenrgi dan Sumberdaya Mineral dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-88
Tabel 5.31	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-91
Tabel 5.32	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-94
Tabel 5.33	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-97
Tabel 5.34	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Perencanaan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-99
Tabel 5.35	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-103
Tabel 5.36	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian dan Diklat dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-107
Tabel 5.37	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019.....	V-109
Tabel 5.38	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-111

Tabel 5.39	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Daerah dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-114
Tabel 5.40	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Dewan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2019	V-122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Siklus Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	II-5
Gambar 2.2	Pendekatan Analisis Input-Proses-Output	II-7
Gambar 2.3	Pendekatan Analisis Input-Output	II-7
Gambar 2.4	Model Evaluasi Program dan Kebijakan	II-8
Gambar 2.5	Kerangka Pikir Penyusunan Analisis capaian Kinerja Pembangunan / Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	II-14
Gambar 3.1	Perbandingan dan Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah).....	III-4
Gambar 3.2	Perbandingan dan Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah).....	III-5
Gambar 3.3	Perbandingan dan Persentase Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah).....	III-7
Gambar 3.4	Perbandingan dan Persentase Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah).....	III-8
Gambar 3.5	Kontribusi Unsur-Unsur Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 (%)	III-9
Gambar 3.6	Perbandingan dan Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)	III-13
Gambar 3.7	Perbandingan dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah).....	III-14

Gambar 3.8	Perbandingan dan Persentase Realisasi Belanja Langsung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah).....	III-15
Gambar 3.9	Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2019 (%).....	III-16
Gambar 3.10	Perbandingan dan Persentase Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2019 dengan Target RPJMD (Juta Rupiah)	III-19
Gambar 4.1	Tingkat Ketercapaian Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Sampai Tahun 2019	IV-13
Gambar 5.1	Tingkat Ketercapaian Indikator Program RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Sampai Tahun 2019	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Evaluasi perencanaan pembangunan merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketentuan dalam pasal 29 menyebutkan bahwa pimpinan lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya. Lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pasal 181 menyebutkan bahwa Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Monitoring (pemantauan) dan evaluasi menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Pemantauan mencakup penelusuran pelaksanaan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap target kinerja yang jelas dan konsisten, laporan kemajuan, dan identifikasi masalah. Dengan demikian, pemantauan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengumpulan data/informasi secara reguler dan terus-menerus yang dapat menghasilkan indikator-indikator perkembangan dan pencapaian suatu kegiatan program/proyek terhadap tujuan yang ditetapkan. Indikator-indikator tersebut nantinya akan diberikan kepada manajemen dan pemangku kepentingan (stakeholders) suatu program/proyek yang

sedang berjalan. Melalui pemantauan tersebut dapat diperoleh informasi tentang: (1) apakah program dan tahapannya dilaksanakan sesuai desain dan prosedur; (2) apakah program atau tahapan program dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan; (3) apakah anggaran program terserap sesuai dengan rencana; dan (4) apa masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, baik yang telah diantisipasi maupun yang belum untuk selanjutnya dicoba diatasi.

Evaluasi hasil pembangunan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dapat memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan tujuan serta visi dan misi yang ditetapkan semula. Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2020 sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan ataukah terdapat kendala dan permasalahan dalam pencapaian target kinerja, sehingga dapat dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan kebijakan pembangunan daerah. Kegiatan pengendalian dan evaluasi di dalam siklus perencanaan pembangunan sangatlah penting karena hasil pengendalian dan evaluasi dapat digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas.

Dengan melihat berbagai amanat peraturan perundang-undangan di atas, maka penting bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan: Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum/ Dengan Output Dokumen Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah periode mendatang.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan: Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian

Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum/ Dengan Output Dokumen Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021;
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan: Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum/ Dengan

Output Dokumen Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah untuk mengetahui pencapaian hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepri kurun waktu tahun 2017 s/d 2020.

Adapun tujuan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan: Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum/ Dengan Output Dokumen Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah:

1. Mengetahui pencapaian target kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021, kurun waktu tahun 2017 s/d 2020
2. Mengetahui pencapaian target kinerja dan permasalahan yang dihadapi, baik indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021 kurun waktu tahun 2017 s/d 2020.
3. Merumuskan rekomendasi hasil evaluasi RPJMD 2016-2021 dalam rangka perbaikan kebijakan pembangunan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan: Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum/ Dengan Output Dokumen Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 meliputi:

1. Menyusun analisis pencapaian target kinerja pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang tercantum dalam BAB III dokumen RPJMD kurun waktu tahun 2017 s/d 2020.
2. Menyusun analisis pencapaian target dan permasalahan yang dihadapi terkait kinerja sasaran BAB V RPJMD 2016-2021 tahun 2017 s/d 2020.
3. Menyusun analisis pencapaian target kinerja dan permasalahan yang dihadapi terkait kinerja program Bab VII RPJMD 2016-2021 tahun 2017 s/d 2020.

4. Menyusun rekomendasi hasil evaluasi RPJMD dalam rangka perbaikan kebijakan pembangunan.

E. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Akhir Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan: Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum/ Dengan Output Dokumen Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan hukum, tujuan, hasil yang diharapkan, ruang lingkup pekerjaan dan sistematika laporan pekerjaan.
- BAB II Metode Pelaksanaan Evaluasi, berisi tentang landasan teori, kerangka pikir dan metode pelaksanaan evaluasi.
- BAB III Analisis Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah, berisi tentang evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah dari tahun 2017 sampai tahun 2020.
- BAB IV Evaluasi Kinerja Indikator Tujuan Dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Sampai Tahun 2020, berisi tentang evaluasi terhadap target kinerja indikator tujuan dan indikator sasaran RPJMD sampai tahun 2020.
- BAB V Evaluasi Kinerja Indikator Program RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Sampai Tahun 2020, memuat tentang evaluasi terhadap target kinerja indikator program RPJMD sampai tahun 2020 dan permasalahannya.
- BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Pendekatan Teknis dan Metodologi

1. Pengertian Evaluasi Kinerja

Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek, atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis, dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan. Dengan perkataan lain, evaluasi merupakan proses penilaian yang memanfaatkan informasi dari kegiatan pemantauan. Dalam beberapa referensi, istilah evaluasi seringkali sudah mencakup kegiatan pemantauan dan evaluasi, karena informasi dari kegiatan monitoring/pemantauan menjadi input bagi pelaksanaan evaluasi.

Evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menentukan nilai (Suharso, 2005: 136). Dalam Kamus Besar Balai Pustaka evaluasi adalah “penilaian” (Tim Balai Pustaka, 1982: 238). Istilah evaluasi dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu: fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dualitas nilai.

1. Fokus Nilai

Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. Ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. oleh karena itu, suatu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. Interdependensi Fakta – Nilai

Suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung kepada “fakta” semata namun juga terhadap “nilai”. Untuk memberi pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau minimal bagi seseorang, kelompok orang atau masyarakat haruslah didukung dengan bukti-bukti (fakta) bahwa hasil kebijakan, program dan kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/memecahkan suatu masalah tertentu. Terkait dengan hal tersebut kegiatan monitoring merupakan suatu persyaratan yang penting bagi evaluasi.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa yang akan datang. Evaluasi bersifat retrospektif, dan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan (*Ex-post*). Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan dilakukan (*Ex-ante*).

4. Dualitas Nilai

Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada (misalnya kesehatan), dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang lain). (LAN, 2004: 237-238).

Husein Kosasih mengemukakan bahwa evaluasi bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat nilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang (Kosasih, 2004: 3).

Evaluasi dapat dipilah-pilah menurut beberapa hal, seperti menurut jenis yang dievaluasi, menurut pelakunya (evaluator), menurut lingkupnya, menurut kadar kedalamannya, menurut masa atau periodenya. Dalam modul Akuntabilitas Kinerja, dikemukakan bahwa evaluasi dapat dibagi kedalam dua bagian besar,

misalnya: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dapat meliputi evaluasi yang dilakukan sebelum program berjalan, atau sedang dalam pelaksanaan, atau setelah program selesai dan dapat diteliti hasil dan dampaknya. Evaluasi formatif, adalah evaluasi yang dilakukan untuk beberapa periode/tahun sehingga memerlukan pengumpulan data time series untuk beberapa tahun yang dievaluasi (LAN, 2004: 240).

Menurut Seriven dalam purwanto dkk., evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan, caranya dengan menyediakan balikan tentang seberapa bagus program tersebut telah berlangsung. Melalui evaluasi formatif ini dapat dideteksi adanya ketidakefisienan sehingga segera dilakukan revisi. Selain itu, evaluasi memberikan data yang relatif cepat (*shot term data*). Hasil evaluasi formatif harus diberikan pada saat yang tepat agar efektif. Evaluasi sumatif bertujuan mengukur efektivitas keseluruhan program. Mengukur dan menilai hasil akhir dari program ini bertujuan untuk membuat keputusan tentang kelangsungan program tersebut, yaitu diteruskan atau dihentikan (Purwanto dkk, 1999: 21).

Menurut Sondang P. Siagian, istilah evaluasi diartikan sebagai penilaian, yaitu “Proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai”. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa hakekat dari penilaian itu adalah:

- a. Penilaian ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses setelah fase itu seluruhnya selesai dikerjakan. Berbeda dengan pengawasan yang ditujukan kepada fase yang masih dalam proses pelaksanaan. Secara sederhana dapat dikatakan selesainya pekerjaan tidak dapat diawasi lagi karena pengawasan hanya berlaku bagi tugas yang sedang dilaksanakan.
- b. Penilaian bersifat korektif terhadap fase yang telah selesai dikerjakan. Mungkin akan timbul pertanyaan: Jika sesuatu telah selesai dikerjakan, nilai korektif yang diperoleh untuk apa? “Korektifitas” yang menjadi sifat dari penilaian sangat berguna, bukan untuk fase yang telah selesai, tetapi untuk fase berikutnya. Artinya, melalui penilaian harus dikemukakan kelemahan-kelemahan sistem yang dipergunakan dalam fase yang baru saja selesai itu. Juga harus dikemukakan penyimpangan-penyimpangan dan/atau penyelewengan-

penyelewengan yang telah terjadi. Tetapi lebih penting lagi harus dikemukakan sebab-sebab mengapa penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan itu terjadi.

Jika telah dilakukan, maka akan diperoleh bahan yang sangat berguna untuk dipergunakan pada fase yang berikutnya sehingga kesalahan-kesalahan yang dibuat pada fase yang baru diselesaikan, tidak terulang. Dengan demikian organisasi tumbuh dan berkembang dalam bentuk tingkat “performance” yang lebih tinggi dan efisien yang semakin besar atau inefisiensi yang semakin berkurang.

- c. Penilaian bersifat “*prescriptive*” (bersifat mengobati). Setelah ditemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pelaksanaan dalam fase yang lalu, setelah sumber-sumber yang menyebabkan mungkin penyimpangan dan/atau penyelewengan terjadi, melalui penilaian harus pula dapat diberikan “resep” untuk mengobati penyakit-penyakit proses itu penyakit yang sama tidak timbul lagi, dan sekaligus jika mungkin, dicegah pula timbulnya “penyakit” yang baru.
- d. Penilaian ditujukan kepada fungsi-fungsi organik lainnya. Fungsi-fungsi administratif dan manajemen itu tidak merupakan fungsi-fungsi yang “berdiri sendiri” dalam arti lepas dari fungsi-fungsi lainnya. Sesungguhnya kelima fungsi organik administrasi dan manajemen itu merupakan satu rantai kegiatan dan masing-masing fungsi itu merupakan mata rantai yang terikat kepada semua mata rantai yang lain. (Siagian, 1970: 143-144).

Berdasarkan beberapa uraian diatas, **evaluasi adalah proses membandingkan antara yang direncanakan dengan yang senyatanya dapat dilaksanakan.** Artinya evaluator tidak mungkin melakukan tugasnya tanpa terlebih dahulu mengetahui tentang rencana dari suatu sasaran evaluasi, dan informasi tentang realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam keadaan selesai berproses.

Dalam konteks Laporan Akuntabilitas Kinerja, evaluasi kinerja dilakukan setelah tahapan Penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Kinerja. Evaluasi kinerja diartikan sebagai suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu

dan mendorong adanya produktivitas dimasa yang akan datang. (Kosasih, 2004: 22).

Evaluasi Kinerja merupakan kegiatan yang menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan satuan organisasi atau kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang di bebaskan kepadanya. Evaluasi Kinerja merupakan analisis dan intepretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya agar dikaitkan dengan sumber daya (input) yang berada dibawah wewenangnya seperti SDM, dana/keuangan, sarana-prasarana, metode kerja dan hal lain yang berkaitan. (Kosasih, 2004: 3).

Dalam perspektif SAKIP, evaluasi kinerja sebagai subsistem dari SAKIP dapat dilihat pada Gambar 2.1



Sumber : Lembaga Administrasi Negara (2004 : 63)

Gambar 2.1. Siklus Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sebagai suatu sistem, SAKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yakni perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Dengan memperhatikan konsep evaluasi, maka untuk melaksanakan evaluasi kinerja tidak dapat dilakukan

tanpa diketahui perencanaan kinerjanya dan realisasi kegiatannya. Evaluasi kinerja berfungsi pertama, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Kedua, memberi masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Menurut Mayston (2003), cara evaluasi kinerja yang umum dilakukan oleh para pengambil keputusan, yang biasa dilakukan adalah menyelenggarakan *evaluation research*. Namun cara ini memerlukan daftar pertanyaan yang cukup serius, dan karenanya tidak flexibel, perlu waktu luas, namun seringkali hasilnya kurang relevan. *Qualitative evaluation* sebenarnya lebih diperlukan karena dapat menjelaskan secara flexibel. Prasyarat untuk hal ini adalah metodologinya harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya riset lanjutan dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi terdahulu. Informal evaluation, juga sering dilakukan secara *casual, impressionistic, intuitive*, dan *subjective appraisal*. Pada akhirnya dilakukan suatu *formal evaluation*, yaitu suatu evaluasi yang terstruktur dengan memperhatikan ukuran-ukuran *inputs, outputs, outcomes*, dan *impacts* atau dampak dari hal yang diteliti.

Selanjutnya dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan mengevaluasi *kegiatan*, bisa juga dengan mengevaluasi kinerja *program*. Bisa juga evaluasi dilakukan secara menyeluruh sehingga akhirnya dapat disimpulkan kinerja organisasi. (Lembaga Administrasi Negara, 2004: 246).

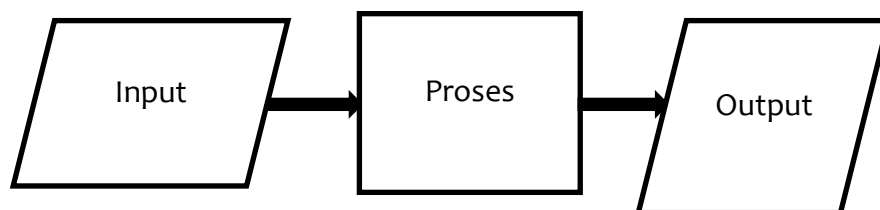
1) Evaluasi Kegiatan

Evaluasi terhadap kegiatan instansi adalah bentuk paling kecil dari evaluasi kinerja organisasi. Seluruh atau sebagian kegiatan dapat dievaluasi menurut prioritas manajemen instansi. Tingkat pentingnya evaluasi sangat ditentukan oleh tingkat pentingnya kegiatan itu sendiri. Jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan pokok atau kegiatan utama yang merupakan ciri organisasi instansi dalam pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan yang cukup dominan dalam rangka menjalankan misi instansi, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan itu adalah penting.

Kedalaman dari evaluasi kegiatan ditentukan oleh manajemen atau pimpinan unit organisasi. Peran penanggung jawab kegiatan dalam menentukan evaluasi terhadap kegiatan sangat penting. Jika penanggung jawab kegiatan merasa perlu atau sadar akan kewajibannya tentulah evaluasi terhadap kegiatan

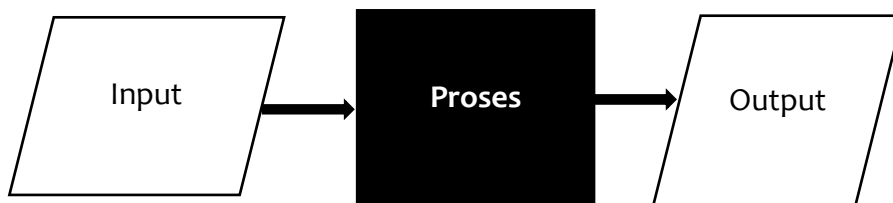
dilakukan. Jika evaluasi ditujukan untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan tentulah diperlukan evaluasi yang mendalam.

Evaluasi kinerja kegiatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu: input-proses-output dan input-output. Berdasarkan Pendekatan Analisis Input-Proses-Output, baik input, proses maupun output diteliti dan dipelajari secara mendalam. Sementara itu pada Pendekatan Analisis Input-Output, hanya Input dan output saja yang diteliti dan dipelajari, sedangkan prosesnya merupakan “black-box” yang dibiarkan tidak diteliti dan dipelajari. Secara rinci skema pendekatan analisis input-proses-output terlihat pada Gambar 2.2, sedangkan pendekatan input dan output terlihat pada Gambar 2.3.



Sumber : Lembaga Administrasi Negara (2004: 248)

Gambar 2.2. Pendekatan Analisis Input-Proses-Output



Sumber : Lembaga Administrasi Negara (2004: 248)

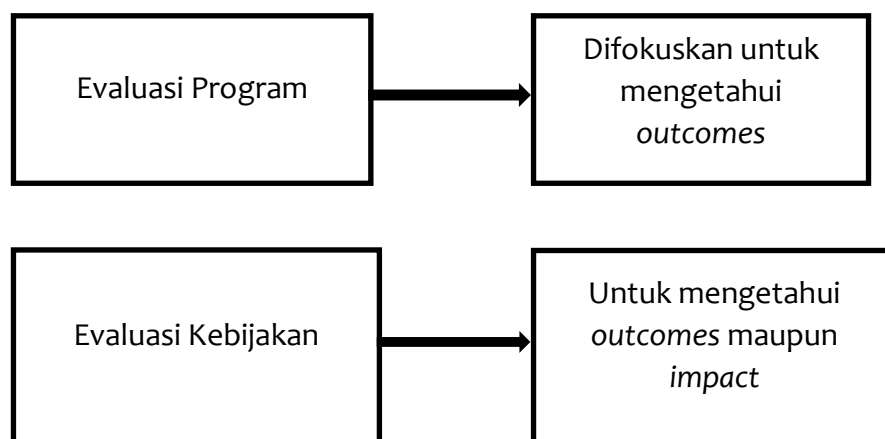
Gambar 2.3. Pendekatan Analisis Input-Output

Pendekatan pertama akan dapat memberikan rekomendasi atau *feed back* tentang berbagai hal baik peningkatan hasil (output) maupun prosesnya. Pendekatan yang kedua masih menyisakan pertanyaan tentang bagaimana caranya meningkatkan kinerja dengan memperbaiki proses pelayanan/produksi yang dilakukan. Bagi instansi pemerintah kegiatan evaluasi dengan pendekatan yang pertama dilakukan secara lebih sering dan teratur (per triwulan/semester) disesuaikan dengan pola monitoring kinerja secara reguler. Sedangkan

pendekatan kedua dilakukan dalam waktu yang agak lama (setahun atau 2 tahun). Oleh karena itu evaluasi yang dilakukan secara reguler sangat mengandalkan sistem pengumpulan data internal yang digunakan dalam memantau (monitoring) kegiatan.

2) Evaluasi Kinerja Program

Evaluasi program cenderung dilakukan untuk mencari jawaban atau *outcomes* yang dihasilkan, sedangkan evaluasi kebijakan mungkin saja mulai *outcomes* hingga dampak (*impact*) yang terjadi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.4 dibawah ini:



Gambar 2.4. Model Evaluasi Program dan Kebijakan

Kata kinerja seringkali meliputi istilah-istilah seperti penyelesaian, pencapaian, realisasi ataupun pemenuhan. Sebagian besar dari istilah tersebut menunjukkan hal yang bersifat obyektif yaitu tercapainya suatu tujuan karena suatu tindakan publik, tetapi ada juga yang bersifat lebih subyektif yang menunjukkan tingkat kepuasan atas suatu tindakan. Umumnya, literatur-literatur ekonomi dan manajemen publik menekankan pada hal yang bersifat obyektif, karena selain mempunyai implikasi langsung terhadap masyarakat juga kepuasan yang bersifat subyektif lebih sulit untuk diukur (Schiavo-Campo dan Sundaram, 2000).

Salah satu tahapan penting dalam evaluasi kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan upaya membandingkan tujuan yang ingin dicapai pada waktu yang telah ditentukan dengan perkembangan pencapaian yang sedang diamati pada suatu waktu atas suatu materi

perencanaan yang ditunjukkan oleh suatu indikator. Menurut berbagai sumber, indikator adalah: Suatu alat ukur untuk menggambarkan tingkatan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika melakukan perencanaan awal, dan dapat merupakan variabel kuantitatif atau kualitatif.

Mackay (2008) menjelaskan indikator kinerja (Performance indicators) sebagai ukuran mengenai masukan, kegiatan, keluaran, hasil dan dampak dari kegiatan-kegiatan pemerintah. Level indikator dapat saja sangat tinggi, yakni dalam arti mengukur kinerja pemerintah, atau dalam arti mengukur kegiatan dan keluarannya. Indikator berguna untuk menetapkan target kinerja, untuk menilai kemajuan pencapaian target tersebut, serta untuk membandingkan kinerja dari unit kerja/organisasi/kementerian/ lembaga yang berbeda.

Berdasarkan Bappenas (2004), ukuran kinerja merupakan suatu hirarki yang menurut kerangka logika, bisa dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Bila dimulai dari level terbawah dengan urutan sebagai berikut:

- a. Indikator Masukan (Input). Indikator ini mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
- b. Indikator Keluaran (Output). Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
- c. Indikator Hasil (Outcome). Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran berbagai kegiatan pada jangka menengah.
- d. Indikator Dampak (Impacts). Indikator ini menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan dan asumsi yang telah digunakan.

Persyaratan indikator bisa bermacam-macam menurut berbagai sumber dan keperluannya. Di bawah ini disajikan dua konsep persyaratan indikator yang umum dipakai, diketahui dan harus diperhatikan. Menurut persyaratan SMART, penentuan suatu indikator harus memperhatikan hal berikut:

- a. *Simple* (sederhana): Indikator yang ditetapkan sedapat mungkin sederhana dalam pengumpulan data maupun dalam penghitungan untuk mendapatkannya.
- b. *Measurable* (dapat diukur): Indikator yang ditetapkan harus merepresentasikan informasi dan jelas ukurannya.
- c. *Attributable* (bermanfaat): Indikator yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan.
- d. *Reliable* (dapat dipercaya): Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar dan teliti.
- e. *Timely* (tepat waktu): Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data dan pengolahan data serta pengemasan informasi yang waktunya sesuai dengan saat pengambilan keputusan yang dilakukan.

2. Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan Pasal 276 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup provinsi. Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi:

- 1) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- 2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- 3) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah perlu dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan tujuan serta visi dan misi yang ditetapkan semula. Sasaran utama evaluasi pelaksanaan rencana

secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana rencana yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam rencana semula. Bila pelaksanaan rencana tersebut berjalan dengan baik perlu dijelaskan faktor faktor penentu keberhasilan (*Key Success Factors*) tersebut agar keberhasilan tersebut dapat pula dilaksanakan pada periode perencanaan berikutnya, akan tetapi bilamana pelaksanaan rencana tersebut tidak dapat dilakukan, perlu diketahui kendala dan permasalahan yang dihadapi agar pemecahannya dalam bentuk perubahan kebijakan akan dapat dilakukan pada waktu penyusunan rencana periode berikutnya.

Evaluasi hasil rencana pembangunan pada prinsipnya menilai keberhasilan kebijakan pembangunan daerah yang mencakup seluruh aspek pembangunan. Evaluasi kinerja hasil rencana pembangunan daerah dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

- 1) Perbandingan realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2) Perbandingan dengan standar, yaitu teknik evaluasi yang dilakukan dengan membandingkan realisasi dari indikator pembangunan daerah yang tersedia dengan nilai rata rata pada tingkat Nasional.
- 3) Analisa trend perkembangan, yaitu dengan melihat trend perkembangan beberapa tahun dari beberapa indikator pembangunan daerah yang digunakan. Dalam hal ini, kinerja Pembangunan Daerah dikatakan berhasil apabila terdapat trend perkembangan yang bersifat positif dari masing masing indikator pembangunan Daerah secara signifikan dibandingkan dengan masa sebelumnya.

B. Kerangka Pikir

Struktur perencanaan pembangunan secara berjangka meliputi perencanaan pembangunan daerah dengan jangka 20 tahun yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka 5 tahun atau yang disebut dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan jangka 1 tahun atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sementara itu untuk kelembagaan Perangkat Daerah (PD), dalam rangka menjabarkan rencana

pembangunan dalam RPJMD, Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berjangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang bersifat penjabaran tahunan.

Durasi masa pemerintahan kepala daerah dalam masa jabatan adalah lima tahun. Untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, disusun dokumen RPJMD, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM nasional. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, agar saling mendukung dan menghindari tumpang tindih. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2016, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021. Kemudian pada tahun 2018 dilakukan reiew dan perubahan yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021. Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi Kepulauan Riau dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2020 implementasi dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau saat ini telah memasuki tahap terakhir. Untuk memastikan apakah hasil pembangunan telah sesuai dengan pencapaian target akhir RPJMD, maka dilakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan tersebut. Dengan dilaksanakannya evaluasi dokumen RPJMD diharapkan dapat diketahui bagaimana kinerja pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau selama periode tersebut.

Kegiatan Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 termasuk pada kategori evaluasi hasil terhadap rencana pembangunan daerah. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan melalui RKPD dan APBD tahunan selama kurun waktu tahun 2017-2019. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target-target RPJMD pada berbagai sektor pembangunan. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan: Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum/ Dengan Output Dokumen Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 diharapkan dapat memetakan perkembangan capaian kinerja hasil RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2019. Evaluasi hasil RPJMD ini akan menjadi masukan dalam rangka penyusunan RPJMD periode berikutnya.

Beberapa dokumen yang akan digunakan dalam Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan: Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum/ Dengan Output Dokumen Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, dimana didalamnya memuat indikator yang akan diukur dalam evaluasi RPJMD.
- b. Dokumen statistik daerah yang diterbitkan oleh BPS dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Dokumen pelaporan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, seperti LKjIP dan LKPJ Akhir Tahun 2017, LKPJ Akhir Tahun 2018, dan LKPJ Akhir Tahun 2019.

Substansi utama yang akan dibahas dalam evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau meliputi visi, tujuan dan sasaran RPJMD yang tergambarkan dari berbagai indikator kinerja pembangunan yang dapat diukur secara kuantitatif. Substansi evaluasi RPJMD dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu:

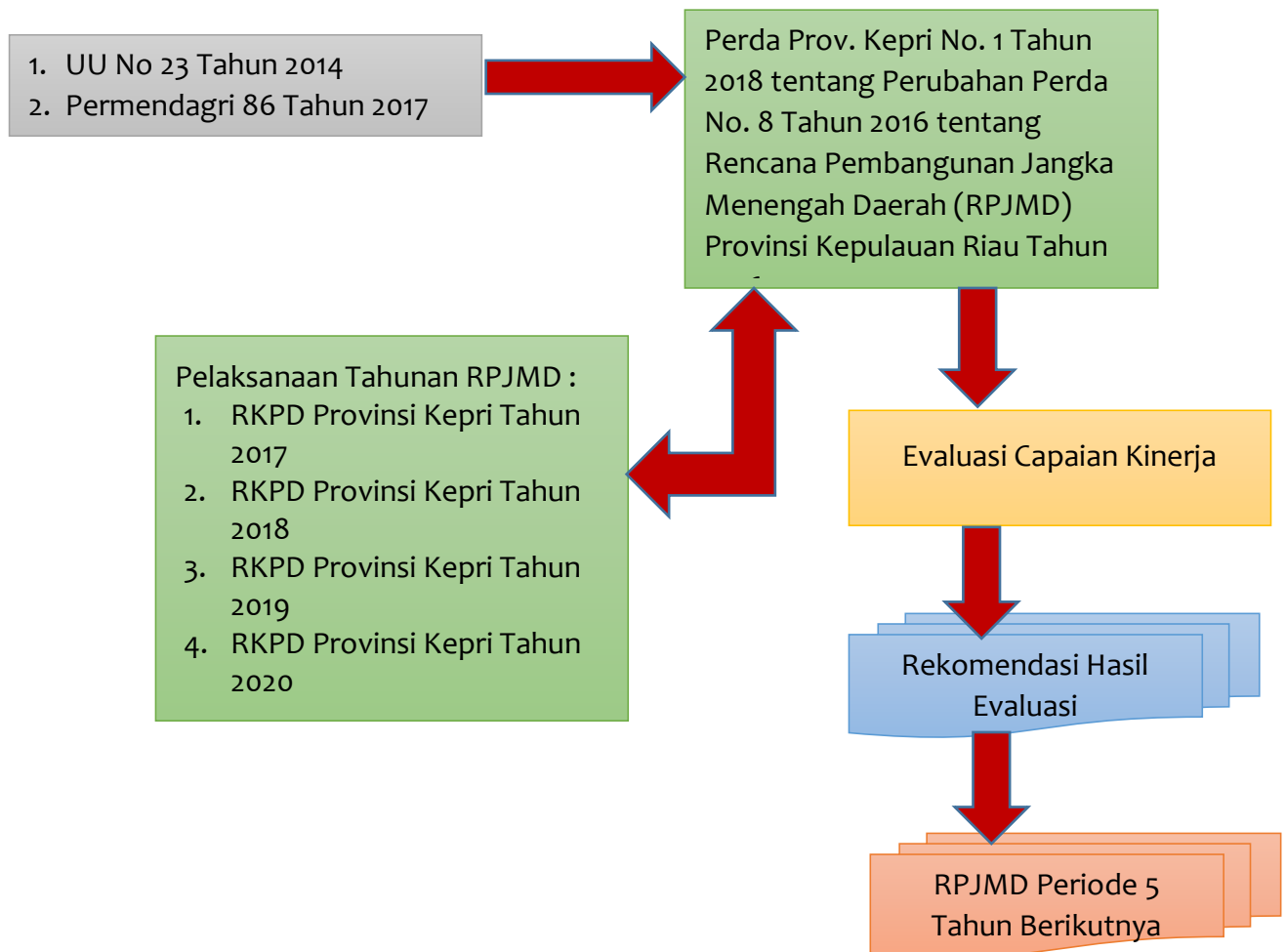
- a. Evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum pada Bab III RPJMD K Provinsi Kepulauan Riau.

- b. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran yang dikelompokkan berdasarkan misi pembangunan jangka menengah sebagaimana tercantum pada Bab V RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Evaluasi terhadap pencapaian target indikator kinerja program sebagaimana tercantum pada bab VII RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

Proses Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan: Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum/ Dengan Output Dokumen Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 akan dilakukan melalui tahapan utama berupa pengumpulan data capaian kinerja masing-masing substansi yang akan dievaluasi. Pengisian data dilakukan oleh perangkat daerah, dan pengumpulan data/informasi dari berbagai sumber. Tahap selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data pencapaian target RPJMD meliputi Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Daerah, dan Indikator Kinerja Program.

Analisis yang akan digunakan yaitu analisis trend capaian tahun 2017 s/d 2019, dan analisis perbandingan dengan target RPJMD. Tahap selanjutnya yaitu Identifikasi permasalahan dalam pencapaian Target RPJMD. Berikutnya dilakukan perumusan Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJMD, dan terakhir adalah penyusunan laporan.

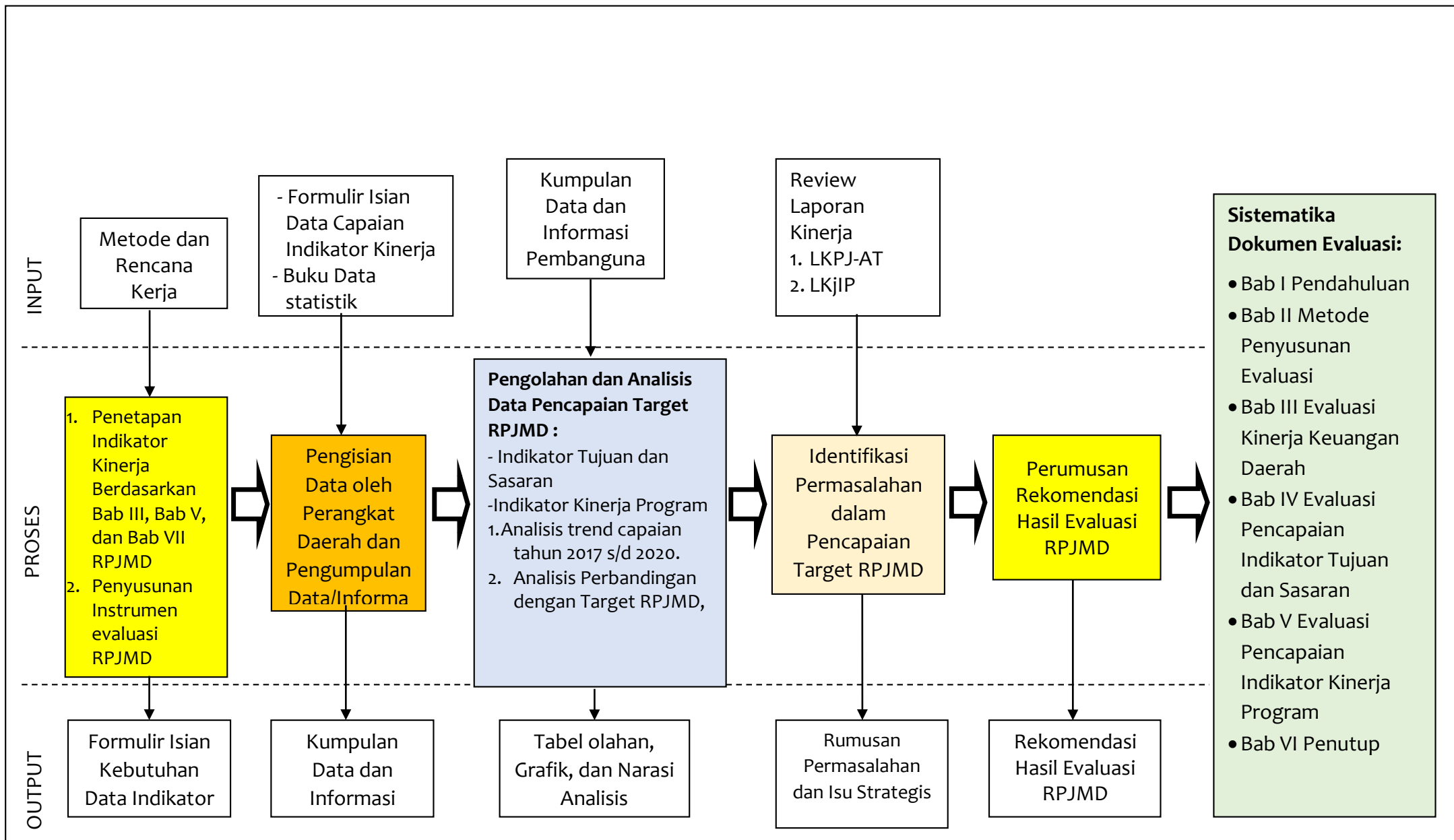
Kerangka Pikir substansi Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan: Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum/ Dengan Output Dokumen Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.5.

Kerangka Pikir Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan: Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum/ Dengan Output Dokumen Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Adapun secara proses, kerangka pikirnya adalah sebagai berikut:



C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan: Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum/ Dengan Output Dokumen Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan melalui pencatatan data dari Perangkat Daerah atau sumber lainnya sesuai dengan kebutuhan.

b. Daftar isian

Berupa blangko isian data *performance* masing-masing indikator, disampaikan kepada Perangkat Daerah pengampu urusan untuk diisi sesuai dengan data kondisi capaian dengan urutan tahun evaluasi yaitu tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019.

D. Teknik Pengolahan Data

Pada prinsipnya evaluasi terhadap Evaluasi capaian RPJMD dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD. Penghitungan capaian kinerja memperhatikan karakteristik indikator RPJMD, yaitu sebagai berikut.

- a. **Indikator Konvers**, yaitu indikator yang menunjukkan semakin tinggi angka capaian kinerja maka kondisinya semakin baik.

Persentase capaian target untuk indikator positif dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. **Indikator Invers**, yaitu indikator yang menunjukkan semakin tinggi angka capaian kinerja maka kondisinya justru semakin jelek.

Persentase capaian target untuk indikator negatif dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penentuan status capaian target kinerja sesuai ketentuan peraturan Permendagri 86 tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja Menurut Permendagri 86 Tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi atau masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Kelemahan kriteria penilaian kinerja menggunakan Permendagri 86 tahun 2017 yaitu sebagai berikut.

1. Penilaian capaian kinerja RPJMD tersebut hanya bisa digunakan untuk membandingkan antara realisasi kinerja tahunan dengan target tahunan RPJMD, dan membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ke-5 RPJMD

terhadap target akhir RPJMD, kurang tepat digunakan menilai capaian kinerja sampai dengan pertengahan periode RPJMD, atau capaian sampai dengan tahun ke-n RPJMD.

2. Gradasi nilai berdasarkan kriteria diatas dirasa kurang tepat dalam penilaian indikator kinerja. Berdasarkan kriteria diatas, capaian target sebesar $66\% \leq 75\%$ termasuk kategori sedang, $91\% \leq 100\%$ pada kategori sangat tinggi, dan $76\% \leq 90\%$ dikategorikan tinggi. Bisa saja terjadi capaian kinerja melebihi angka 100% karena melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Seharusnya capaian kinerja $< 100\%$ dikategorikan target tidak tercapai, dan $\geq 100\%$ capaian dikategorikan target tercapai, sebab ketidaktercapaian target kinerja tahunan RPJMD (RKPD) akan mempengaruhi pencapaian target akhir RPJMD.

Dengan mendasarkan pada kelemahan penilaian kinerja capaian RPJMD sesuai, maka tim evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau melakukan inovasi dalam penilaian status kinerja. Teknik Penilaian Status Capaian s/d tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD yang digunakan dalam evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Status Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2020
Terhadap Target Akhir RPJMD

No	Kriteria Lengkap Penilaian Status Kinerja	Simbol	Keterangan
1	Apabila persentase capaian target akhir RPJMD s/d tahun 2020 sebesar $\geq 100\%$		Target akhir RPJMD telah tercapai
2	Apabila persentase capaian target akhir RPJMD s/d tahun 2020 sebesar 80% sampai dengan kurang dari 100%		Target akhir RPJMD akan tercapai
3	Apabila persentase capaian target akhir RPJMD s/d tahun 2020 kurang dari 80%		Pencapaian Target akhir RPJMD perlu upaya keras

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan: Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum/ Dengan Output Dokumen Evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

a. Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan realisasi capaian kinerja s/d tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD, dan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target per tahun dalam RPJMD.

b. Analisis Trend

Dalam Evaluasi RPJMD ini, analisis trend digunakan untuk melihat perkembangan kinerja indikator dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020. Analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Secara teoritis, dalam analisis time series yang paling menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau data-data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan.

BAB III

ANALISIS PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN DAERAH

A. Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan daerah. Pendapatan daerah mencakup: 1) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Sebagian besar pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau berasal dari dana perimbangan disusul lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam dokumen RPJMD tahun 2016-2021 diproyeksikan mengalami peningkatan meskipun konservatif atau tidak terlalu progresif, yaitu berada di kisaran 5-8% tiap tahunnya. PAD diproyeksikan tumbuh, terutama dipengaruhi oleh peningkatan pajak daerah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah salah satunya melalui penggalian potensi retribusi daerah khususnya yang berasal dari retribusi jasa usaha pemanfaatan ruang laut (retribusi labuh jangkar kapal). Dana perimbangan diproyeksikan meningkat dipengaruhi oleh peningkatan DAU, dan DAK dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sementara itu Lain-lain Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat terutama berasal dari peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari Propinsi dan Pemerintah; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan Bantuan Keuangan Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Upaya yang selama ini ditempuh oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu melakukan

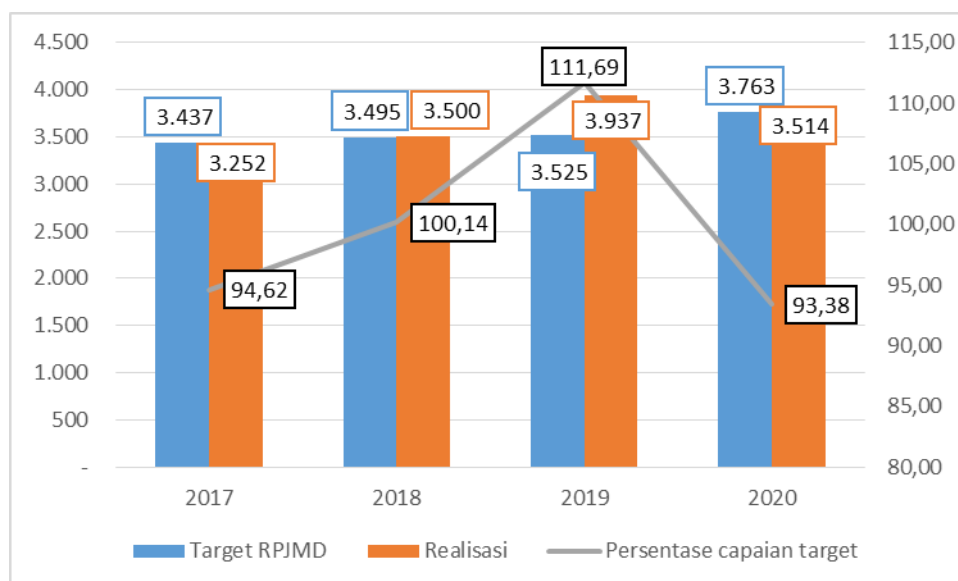
pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah secara efektif dan efisien melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan melalui :

1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, antara lain :
 - a. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui upaya antara lain:
 - 1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui *Samsat Drive Thru* dan penyempurnaan sistem otomatisasi pembayaran pajak kendaraan melalui *Samsat Automatic teller Machine (SAM)*;
 - 2) Penambahan kendaraan operasional Samsat keliling untuk wilayah Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun serta tambahan kendaraan operasional penagihan aktif oleh petugas BP2RD.
 - 3) Sosialisasi, penyuluhan dan penegakan hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - 4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah khususnya terhadap UPT-PPD ;
 - 5) Pengembangan aplikasi *e-payment* samsat ;
 - 6) Pengembangan sistem informasi online melalui media website dan media informasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
 - 7) Meningkatkan sinergi bersama-sama Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri dan PT. Jasa Raharja (Persero) dengan membentuk sekretariat Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau dalam hal koordinasi kebijakan pelayanan samsat.
 - b. Ekstensifikasi Retribusi Daerah. Upaya ekstensifikasi retribusi daerah dilakukan dengan melalui pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah, sejak tahun 2018 mulai ditargetkan pendapatan retribusi jasa usaha dari sektor perhubungan laut khususnya layanan kepelabuhanan (labuh tambat).
 - c. Optimalisasi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah milik provinsi Kepulauan Riau yang ada di Tanjungpinang dan Tanjung Uban kepada masyarakat.

- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam hal menunaikan kewajibannya selaku wajib pajak daerah.
 - e. Meningkatkan pengelolaan pendapatan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas.
2. Kebijakan pendapatan dana perimbangan dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dimana menghendaki pembagian DBH berdasarkan prinsip realisasi (*based on actual revenue*) dalam tahun anggaran berjalan.
 3. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK), terjadi peningkatan yang signifikan. Pemerintah sejak tahun 2016 mengalokasikan DAK Fisik sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, dengan pengalokasiannya dilakukan melalui mekanisme *bottom-up*, yakni daerah menyampaikan usulan (*proposal based*) sebagai dasar untuk penentuan alokasi. Hal ini berbeda dengan pengalokasian DAK pada tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak bersifat *top-down*, yakni sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu perlu adanya koordinasi lintas perangkat daerah dalam mengajukan usulan anggaran pembangunan yang dikoordinasi sinergi antara Dinas Badan Perencanaan Daerah dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau.

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, realisasi pendapatan Provinsi Kepulauan Riau diketahui telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Realisasi pendapatan daerah tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 3.252.237.500.367,-, sedangkan target RPJMD sebesar Rp.3.436.939.612.293,-. Dengan demikian maka persentase capaiannya sebesar 94,62%. Realisasi pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp. 3.500.007.224.302,-, target RPJMD sebesar Rp. 3.494.771.742.620,-. Tingkat capaian target pada tahun 2018 sebesar 100,14%. Realisasi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp.3.936.963.268.345,- dari target RPJMD sebesar Rp3.524.822.111.112,- dengan persentase capaian sebesar 111,69%. Realisasi pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp.3.514.000.000.000,- dari target RPJMD sebesar Rp3.763.000.000.000,- dengan persentase capaian sebesar 93,38%.

Realisasi capaian target pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3.1. Perbandingan dan Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)

Capaian realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau mengalami perkembangan yang cukup baik. Dilihat dari persentase realiasi capaiannya terhadap target RPJMD dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terlihat terus mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2017 persentase capaian realiasi sebesar 94,62% naik 5,52% pada tahun menjadi 100,14%. Selanjutnya pada tahun 2019 realiasi pendapatan mengalami kenaikan 11,55% menjadi 111,69%. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan menurun sebesar 18,31% dibandingkan dengan tahun 2019.

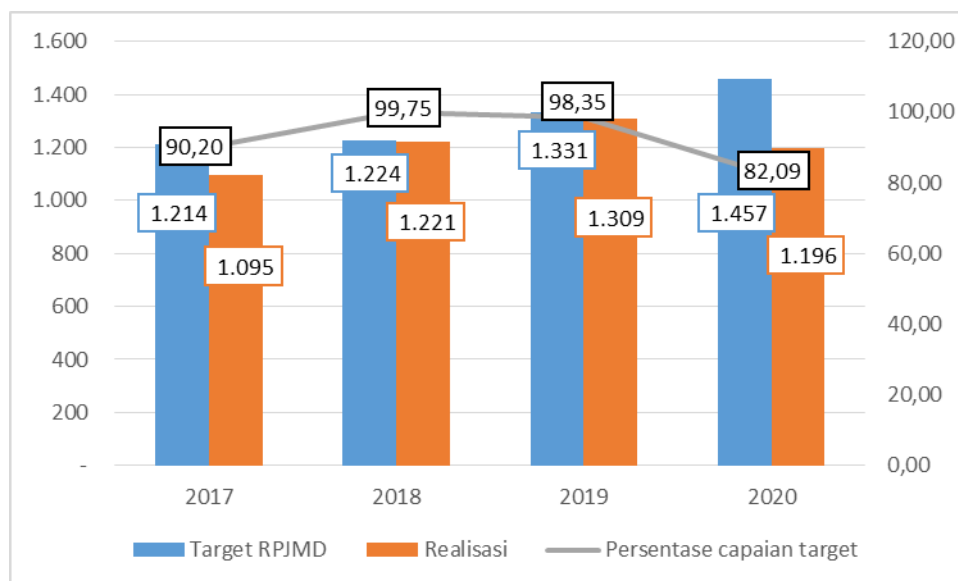
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah di tahun 2020 adalah sebagai berikut.

- a) Pendapatan pajak air permukaan yang belum optimal disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya.
- b) Pendapatan retribusi daerah Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Pemanfaatan Ruang Laut masih rendah disebabkan oleh masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan ketentuan–ketentuan terkait dengan mekanisme

dan tata cara pemungutan retribusi, baik dalam tataran teknis maupun administratif.

- c) Pendapatan Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD belum optimal disebabkan manajemen BUMD yang belum optimal.

Berbeda dengan perkembangan realisasi pendapatan daerah, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 hingga 2020 justru dibawah target RPJMD. Realisasi PAD pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.094.788.614.305,- dari target RPJMD sebesar Rp.1.213.610.561.052,- dengan realisasi capaian sebesar 90,21%. Selanjutnya realisasi PAD pada tahun 2018 sebesar Rp.1.220.768.246.945,- dari target RPJMD sebesar Rp.1.223.732.043.960,- dengan persentase realisasi capaian 99,76%. Pada tahun 2019 realisasi PAD sebesar Rp.1.309.216.569.140,- dari target RPJMD sebesar Rp1.330.934.087.038,- dengan persentase realisasi capaian sebesar 98,37%. Pada tahun 2020 realisasi PAD sebesar Rp.1.196.000.000.000,- dari target RPJMD sebesar Rp1.457.000.000.000,- dengan persentase realisasi capaian sebesar 82,09%. Jika dilihat secara lebih dalam dari tahun 2017-2020 persentase realisasi capaian PAD terhadap target RPJMD masih belum mencapai 100%. Secara lebih rinci perkembangan realisasi PAD Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Gambar 3.2 dibawah ini.



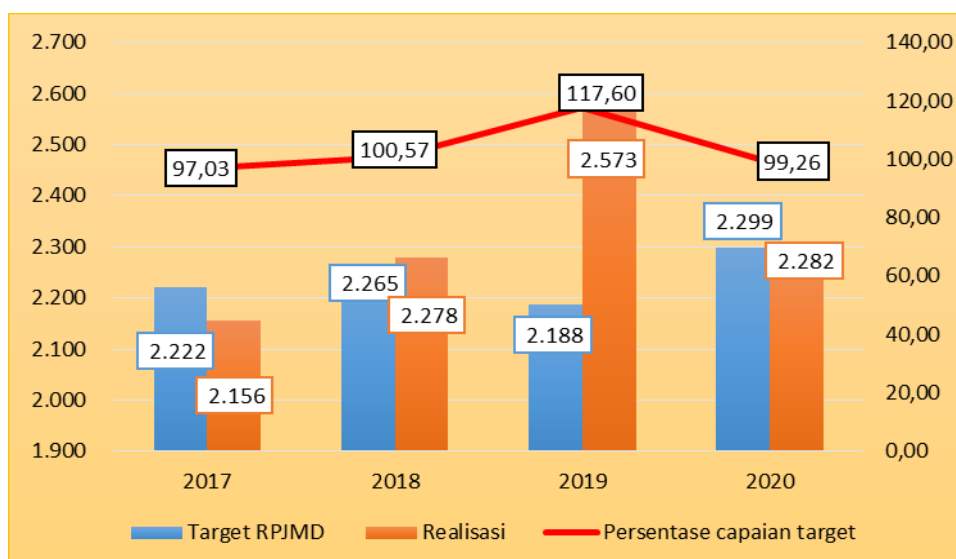
Gambar 3.2. Perbandingan dan Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)

Perkembangan realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target RPJMD terlihat mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat. Tercatat pada tahun 2017 persentase realisasi PAD sebesar 90,20% meningkat sebesar 9,55% menjadi 99,75% pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 persentase realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 1,40% menjadi 98,35%. Tahun 2020 persentase realisasi PAD juga mengalami penurunan sebesar 16,26% menjadi 82,09%

Jika dilihat lebih dalam realisasi PAD terhadap target RPJMD belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, melihat hal tersebut perlu adanya perhatian khusus pemerintah daerah untuk meningkatkan ketercapaian PAD terhadap target RPJMD.

Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami perkembangan fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2017 realisasi dana perimbangan sebesar Rp.2.156.268.926.062,- dari target RPJMD sebesar Rp. 2.222.149.091.241,- sehingga persentase capaian realisasi hanya sebesar 97,03%. Namun kondisi yang berbeda terjadi di tahun 2018, realisasi dana perimbangan naik menjadi Rp2.278.002.977.357,- melampaui target RPJMD yang hanya sebesar Rp. 2.264.839.698.660,- persentase realisasi capaian sebesar 100,57%. Pada tahun 2019 realisasi capaian sebesar Rp.2.573.155.268.205,- melampaui target RPJMD sebesar Rp2.187.676.024.074,- dengan persentase realisasi capaian 117,60%. Pada tahun 2020 realisasi capaian sebesar Rp.2.282.000,000,000,- melampaui target RPJMD sebesar Rp2.299.000.000.000,- dengan persentase realisasi capaian 99,26%.

Perkembangan capaian realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Gambar 3.3 dibawah ini



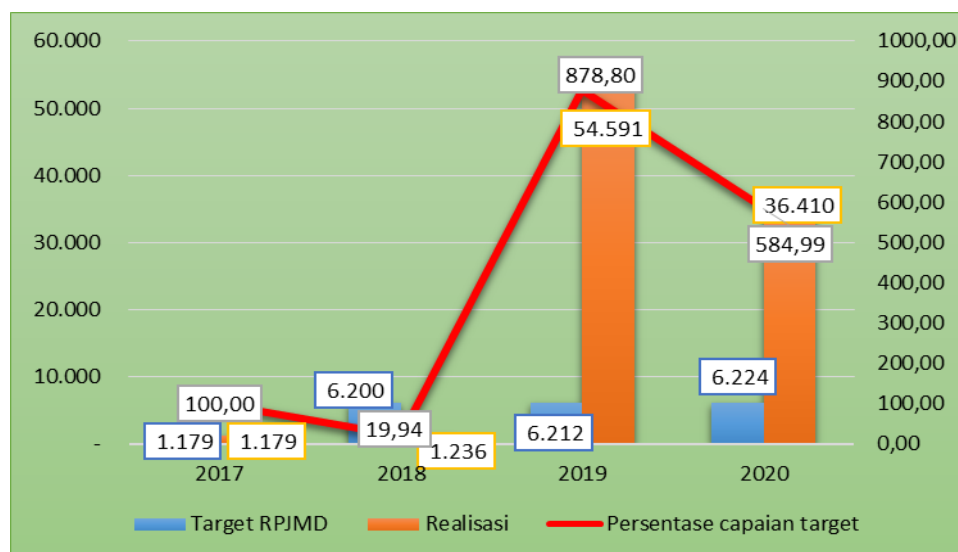
Gambar 3.3. Perbandingan dan Persentase Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)

Selaras dengan realisasi Dana Perimbangan yang mengalami perkembangan yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 tercatat persentase realisasi dana perimbangan sebesar 97,03% kemudian naik 3,54% menjadi 100,57%. Selanjutnya pada tahun 2019 persentase realisasi dana perimbangan meningkat lagi sebesar 17,03% menjadi 117,60%. Tahun 2020 persentase realisasi dana perimbangan menurun sebesar 18,34% menjadi 99,26%. Melihat data tersebut pada tahun 2018 dan 2019 realisasi dana perimbangan telah melampaui target RPJMD yang telah ditetapkan, tetapi pada tahun 2020 belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Perkembangan realisasi lain-lain pendapatan yang sah Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2017-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat. Realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp.1.179.960.000,- dari target RPJMD sebesar Rp1.179.960.000,- dengan persentase realisasi capaian 100%. Selanjutnya pada tahun 2018 lain-lain pendapatan yang sah justru mengalami penurunan yang cukup drastis hanya sebesar Rp. 1.236.000.000,- dari target RPJMD Rp.6.200.000.000,- sehingga persentase realisasi capaian hanya sebesar 19,94%. Tahun 2019 realisasinya meningkat menjadi Rp.54.591.431.000,- dari target RPJMD sebesar Rp. 6.212.000.000,- sehingga realisasinya sebesar 878,81%. Pada tahun 2020 realisasinya menurun menjadi

Rp.36.410.000,000,- dari target RPJMD sebesar Rp. 6.224.000.000,- sehingga realisasinya sebesar 584,99%.

Secara rinci perkembangan lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada Gambar 3.4 dibawah ini.



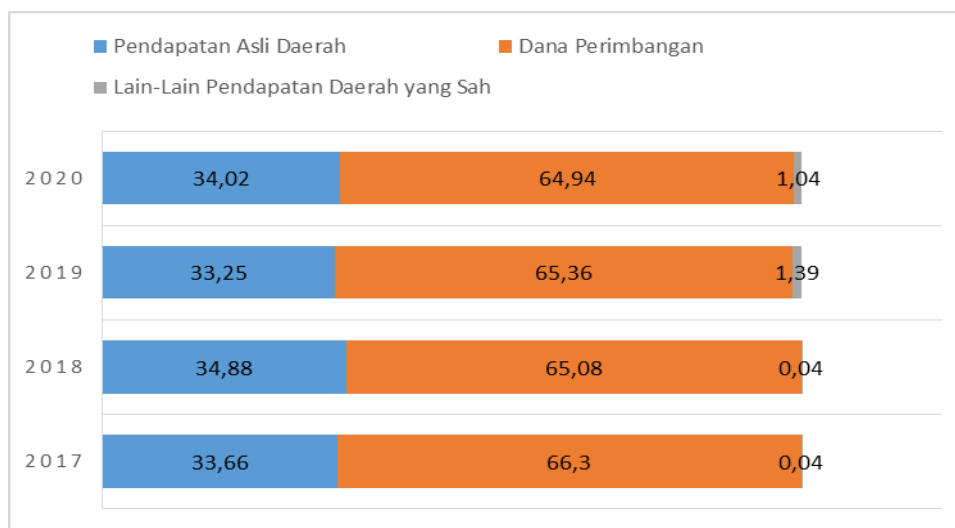
Gambar 3.4. Perbandingan dan Persentase Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)

Perkembangan persentase lain-lain pendapatan yang sah mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2017 persentase capaian lain-lain pendapatan yang sah di provinsi Kepulauan Riau sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, namun pada tahun 2018 realisasi lain-lain pendapatan yang sah justru mengalami penurunan drastis jauh dari target yang telah ditetapkan yakni hanya sebesar 19,94%. Kemudian pada tahun 2019 realisasi lain-lain pendapatan yang sah naik drastic menjadi sebesar 878,81% sangat melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan pada tahun 2020 realisasi lain-lain pendapatan yang sah turun menjadi 584,99%. Meskipun realisasi lain-lain pendapatan yang sah turun menurun di tahun 2020 tetapi telah mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan

Dilihat dari perkembangannya kontribusi terbesar dalam pendapatan asli daerah masih di dominasi oleh dana perimbangan sejak tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2017 kontribusi Dana Perimbangan dalam Pendapatan Daerah sebesar 66,30% sedangkan kontribusi PAS hanya 33,66% dan kontribusi dana lain-lain yang sah sebesar

0,04%. Hal yang serupa juga dialami pada tahun 2018 dimana kontribusi dana perimbangan jauh lebih tinggi dari kontribusi PAD dan pendapatan lain-lain yang sah yakni sebanyak 65,09% sedangkan kontribusi PAD sebesar 34,88% dan kontribusi lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,04%. Kondisi pada tahun 2019 juga sama dengan tahun sebelumnya dengan kontribusi dana perimbangan sebesar 65,36% sedangkan kontribusi PAD 33,25% dan kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,39%. Kondisi pada tahun 2020 kontribusi dana perimbangan sebesar 64,94% sedangkan kontribusi PAD 34,02% dan kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,04%.

Jika dilihat lebih rinci perkembangan PAD Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2017-2020 mengalami perlembangan yang fluktuatif cenderung menurun dari 33,66% di tahun 2017 meningkat menjadi 34,88% di tahun 2018 dan turun menjadi 33,25% di tahun 2019, pada tahun 2020 meningkat menjadi 34,02%. Kondisi tersebut menggambarkan belum optimalnya kemandirian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui kontribusi PAD. Masih perlu penggalian potensi PAD untuk mendorong peningkatan sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah yang lebih besar. Secara lebih rinci perkembangan kontribusi komponen pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar 3.5 di bawah ini.



Gambar 3.5. Kontribusi Unsur-Unsur Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 (%)

Pencapaian target kinerja pendapatan daerah tahun 2017-2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

URAIAN	2017		% Capaian Target	2018		% Capaian Target	2019		% Capaian Target	2020		% Capaian Target
	Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi	
PENDAPATAN	3.436.939.612.293	3.252.237.500.367	94,63	3.494.771.742.620	3.500.007.224.302	100,15	3.524.822.111.112	3.936.963.268.345	111,69	3.763.708.865.241	3.514.400.093.762,30	93,38
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.213.610.561.052	1.094.788.614.305	90,21	1.223.732.043.960	1.220.768.246.945	99,76	1.330.934.087.038	1.309.216.569.140	98,37	1.457.807.050.027	1.195.634.363.540,30	82,02
Hasil Pajak Daerah	1.010.684.761.682	980.678.289.919	97,03	1.063.247.043.960	1.099.143.753.068	103,38	1.137.274.337.038	1.185.272.421.309	104,22	1.233.244.612.527	1.033.430.812.844,00	83,80
Hasil Retribusi Daerah	63.160.000.000	3.186.407.550	5,04	73.405.000.000	13.542.397.410	18,45	100.359.250.000	7.173.968.960	7,15	121.649.162.500	5.820.167.917,00	4,78
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.107.652.171	3.107.652.171	100,00	3.150.000.000	3.095.498.858	98,27	3.307.500.000	2.840.763.340	85,89	3.472.875.000	5.479.400.913,00	157,78
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136.658.147.199	107.816.264.665	78,89	83.930.000.000	104.986.597.609	125,09	89.993.000.000	113.929.415.531	126,60	99.440.400.000	150.903.981.866,30	151,75
DANA PERIMBANGAN	2.222.149.091.241	2.156.268.926.062	97,04	2.264.839.698.660	2.278.002.977.357	100,58	2.187.676.024.074	2.573.155.268.205	117,62	2.299.677.695.215	2.282.355.380.222,00	99,25
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	575.087.704.241	526.669.661.632	91,58	427.801.584.810	537.458.002.746	125,63	373.831.670.044	737.447.035.580	197,27	406.265.528.398	459.765.163.578,00	113,17
Dana Alokasi Umum	1.059.822.693.000	1.059.822.693.000	100,00	1.257.386.100.000	1.150.516.796.000	91,50	1.185.032.299.880	1.190.057.596.000	100,42	1.220.583.268.876	1.099.291.405.000,00	90,06
Dana Alokasi Khusus	587.238.694.000	569.776.571.430	97,03	579.652.013.850	590.028.178.611	101,79	628.812.054.150	645.650.636.625	102,68	672.828.897.941	723.298.811.644,00	107,50
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.179.960.000	1.179.960.000	100,00	6.200.000.000	1.236.000.000	19,94	6.212.000.000	54.591.431.000	878,81	6.224.120.000	36.410.350.000,00	584,99
Pendapatan Hibah	1.179.960.000	1.179.960.000	100,00	1.200.000.000	1.236.000.000	103,00	1.212.000.000	1.284.000.000	105,94	1.224.120.000		0,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-		-	-	-	-	5.000.000.000		0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	5.000.000.00	-	-	5.000.000.000	53.307.431.000	1.066,15		34.926.450.000,00	

URAIAN	2017		% Capaian Target	2018		% Capaian Target	2019		% Capaian Target	2020		% Capaian Target
	Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi	
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.483.900.000,00	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

B. Pencapaian Target Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan menjelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah juga dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan kelompok belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; belanja bantuan sosial; belanja bagi hasil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

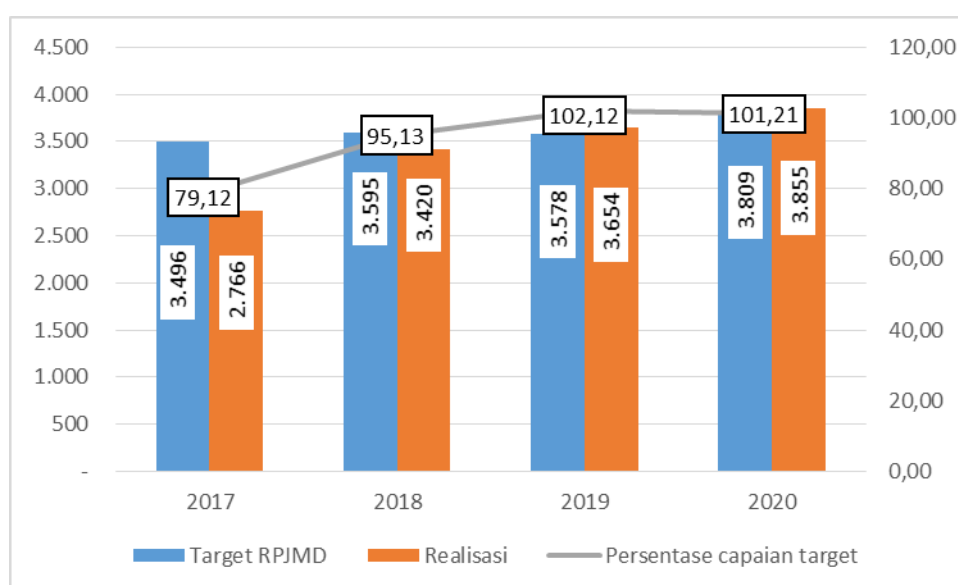
Kebijakan pengelolaan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung diutamakan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib, mengikat dan prioritas utama seperti: Belanja Gaji Pegawai; Belanja Bunga; dan Belanja Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota. Selanjutnya dialokasikan belanja tidak langsung lainnya seperti : belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota serta belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung diprioritaskan untuk pelaksanaan Program Unggulan Kepala Daerah, selanjutnya dialokasikan untuk pelaksanaan Program Prioritas ditingkat perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan mendukung prioritas pembangunan nasional di Provinsi kepulauan Riau.

Realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2018 diketahui tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, namun pada tahun 2019-2020 realisasi belanja melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD. Realisasi belanja daerah tahun 2017 tercatat hanya sebesar Rp.2.765.620.839.246,- dari target RPJMD sebesar Rp.3.496.355.277.049,- dengan persentase capaian sebesar 79,10%.

Selain itu realisasi belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp.3.419.789.812.825,- juga tidak melampaui target RPJMD sebesar Rp. 3.594.771.742.620,- dengan persentase capaian sebesar 95,130%. Namun pada tahun 2019 belanja daerah provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 3.654.127.240.554,- justru melebihi target Belanja dalam RPJMD sebesar Rp. 3.577.558.809.948,- dengan persentase capaian sebesar 102,14%. Tahun 2020 belanja daerah provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 3.855.000.000.000,- melebihi target Belanja dalam RPJMD sebesar Rp. 3.809.000.000.000,- dengan persentase capaian sebesar 101,21%.

Kinerja belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut ini.



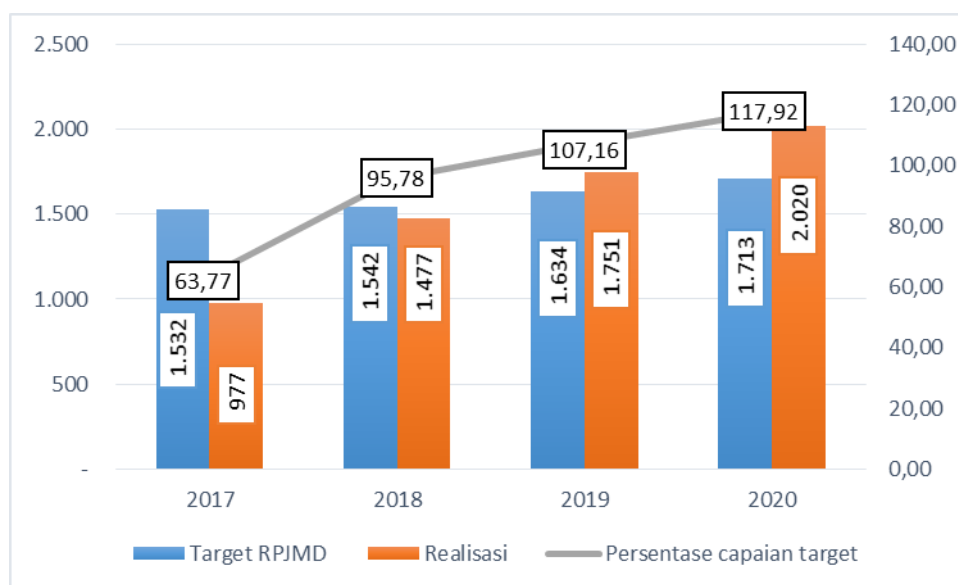
Gambar 3.6. Perbandingan dan Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)

Beberapa permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi capaian kinerja output kegiatan tidak tercapai sesuai dengan target dalam DPA Tahun Anggaran 2020, disebabkan adanya penurunan anggaran belanja kegiatan akibat kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19.

- b) Pembayaran kegiatan kontraktual yang menumpuk pada akhir tahun anggaran disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang sempat tertunda akibat proses refocusing anggaran penanganan Covid-19. Proses pekerjaan dapat dilanjutkan kembali setelah anggaran *refocusing* sudah disahkan.

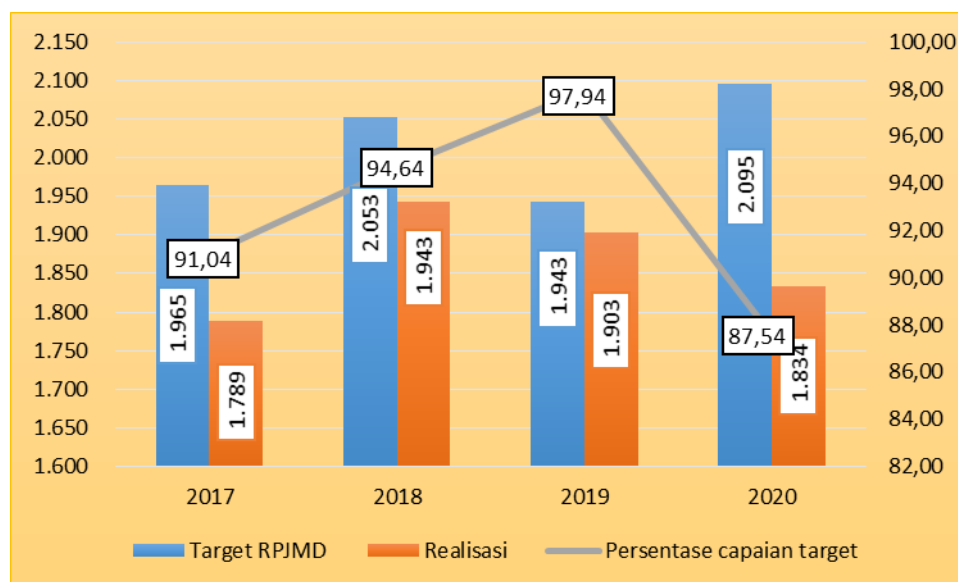
Realisasi belanja tidak langsung dari tahun 2017-2020 selaras dengan kondisi realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah diuraikan diatas. Realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2017 sebesar Rp.976.923.642.903,- masih dibawah target RPJMD sebesar Rp.1.531.730.457.152,- dengan persentase realisasi sebesar 63,77%. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2018 realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.1.476.940.711.850,- tidak melampaui target RPJMD sebesar Rp.1.541.500.483.956,- dengan persentase realisasi 95,78%. Namun pada tahun 2019 realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.751.270.645.320,- melampaui target RPJMD sebesar Rp1.634.140.542.086,- dengan persentase realisasi capaian sebesar 107,16%. Tahun 2020 realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.020.000.000.000,- melampaui target RPJMD sebesar Rp1.713.000.000.000,- dengan persentase realisasi capaian sebesar 117,92%. Kinerja belanja tidak langsung Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 3.7 berikut ini.



Gambar 3.7. Perbandingan dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)

Realisasi Belanja Langsung Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017-2020 menunjukkan tren yang positif karena tidak melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tercatat realisasi belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp.1.788.697.196.343,- dari target RPJMD sebesar Rp.1.964.624.819.897,- dengan persentase realisasi capaian sebesar 91,04%. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi belanja langsung Prov. Kepulauan Riau sebesar Rp. 1.942.849.100.975,- dari target RPJMD sebesar Rp.2.053.271.258.664,- dengan persentase realisasi sebesar 94,64%. Sedangkan tahun 2019 realisasi belanja langsung Prov. Kepulauan Riau mengalami penurunan menjadi Rp1.902.856.595.234,- masih di bawah target RPJMD sebesar Rp. 1.943.418.267.862,- dengan persentase realisasi sebesar 97,94%. Tahun 2020 realisasi belanja langsung Prov. Kepulauan Riau mengalami penurunan menjadi Rp1.834.000.000.000,- masih di bawah target RPJMD sebesar Rp. 2.095.000.000.000,- dengan persentase realisasi sebesar 87,94%.

Kinerja belanja langsung Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 3.8 berikut ini.

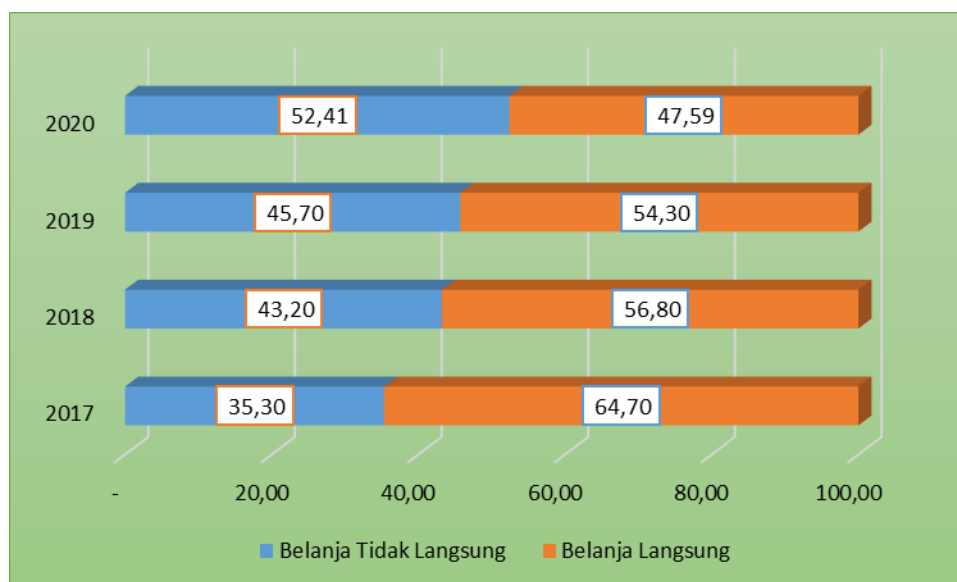


Gambar 3.8. Perbandingan dan Persentase Realisasi Belanja Langsung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 Terhadap Target RPJMD (Milyar Rupiah)

Dilihat dari perkembangannya persentase terbesar dalam Belanja Daerah sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 didominasi oleh belanja langsung, namun ditahun

2020 didominasi oleh Belanja Tidak Langsung. Tercatat pada tahun 2017 kontribusi belanja langsung dalam belanja daerah sebesar 64,7% sedangkan belanja tidak langsung sebesar 35,3%. Hal yang serupa juga terjadi pada tahun 2018 persentase belanja langsung sebesar 56,8% lebih besar dari persentase belanja langsung yang hanya sebesar 43,2%. Tahun 2019 persentase belanja langsung sebesar 54,3% lebih besar dari belanja tidak langsung sebesar 45,7%. Tahun 2020 persentase belanja langsung sebesar 47,59% lebih besar dari belanja tidak langsung sebesar 52,41%.

Jika dilihat lebih rinci perkembangan belanja langsung dari tahun 2017-2020 justru mengalami penurunan, dari tahun 2017 sebesar 64,7% menjadi 47,59% di tahun 2020. Sebaliknya persentase belanja tidak langsung justru mengalami peningkatan dari 35,3% meningkat menjadi 52,41%. Peningkatan persentase belanja tidak langsung dari tahun ketahun cenderung menggambarkan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau semakin memprioritaskan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui komponen pembiayaan belanja tidak langsung. Secara lebih rinci perkembangan proporsi komponen belanja daerah dapat dilihat pada gambar 3.9 di bawah ini.



Gambar 3.9. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 (%)

Pencapaian target kinerja belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah Tahun 2017-2020

URAIAN	2017		%	2018		%	2019		%	2020		%
	Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi	
BELANJA	3.496.355.277.049	2.765.620.839.246	79,10	3.594.771.742.620	3.419.789.812.825	95,13	3.577.558.809.948	3.654.127.240.554	102,14	3.809.237.353.418	3.855.296.291.882,02	102,14
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.531.730.457.152	976.923.642.903	63,78	1.541.500.483.956	1.476.940.711.850	95,81	1.634.140.542.086	1.751.270.645.320	107,17	1.713.525.272.935	2.020.585.679.083,00	107,17
Belanja Pegawai	624.083.062.586	597.535.331.194	95,75	643.452.493.660	655.515.795.402	101,87	684.378.517.502	871.016.049.456	127,27	709.951.563.255	839.492.063.739,00	127,27
Belanja Subsidi										-		
Belanja Hibah	392.445.700.000	374.190.338.250	95,35	421.250.990.850	345.516.286.200	82,02	421.601.323.134	376.030.275.000	89,19	422.444.525.781	608.040.699.750,00	89,19
Belanja Bantuan Sosial	6.172.000.000	3.393.999.827	54,99	2.485.000.000	2.510.000.000	101,01	13.658.565.862	1.619.120.000	11,85	13.685.882.994	26.041.102.470,00	11,85
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	487.555.320.934	-		472.311.999.446	471.497.381.616	99,83	499.840.148.529	500.921.438.771	100,22	552.781.313.847	518.464.483.152,00	100,22
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	20.974.373.632	1.645.873.632	7,85	-	1.645.873.632		12.661.987.059	1.683.762.093	13,30	12.661.987.059	26.250.000.000,00	13,3
Belanja Tidak Terduga	500.000.000	158.100.000	31,62	2.000.000.000	255.375.000	12,77	2.000.000.000	-		2.000.000.000	2.297.329.972,00	-
BELANJA LANGSUNG	1.964.624.819.897	1.788.697.196.343	91,05	2.053.271.258.664	1.942.849.100.975	94,62	1.943.418.267.862	1.902.856.595.234	97,91	2.095.712.080.483	1.834.710.612.799,02	97,91
Belanja Pegawai	232.588.299.601	221.252.012.792	95,13	459.556.645.756	245.365.462.096	53,39	252.644.374.822	127.134.600.087	50,32	272.442.570.463	165.440.624.196,00	50,32
Belanja Barang dan Jasa	1.156.236.397.079	1.071.719.274.530	92,69	910.640.367.669	1.077.427.074.676	118,32	1.232.127.181.825	1.141.220.815.946	92,62	1.404.127.093.924	1.082.661.190.360,50	92,62
Belanja Modal	575.800.123.217	495.725.909.021	86,09	683.074.245.239	620.056.564.204	90,77	458.646.711.215	634.501.179.200	138,34	419.142.416.097	586.608.798.242,52	138,34

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

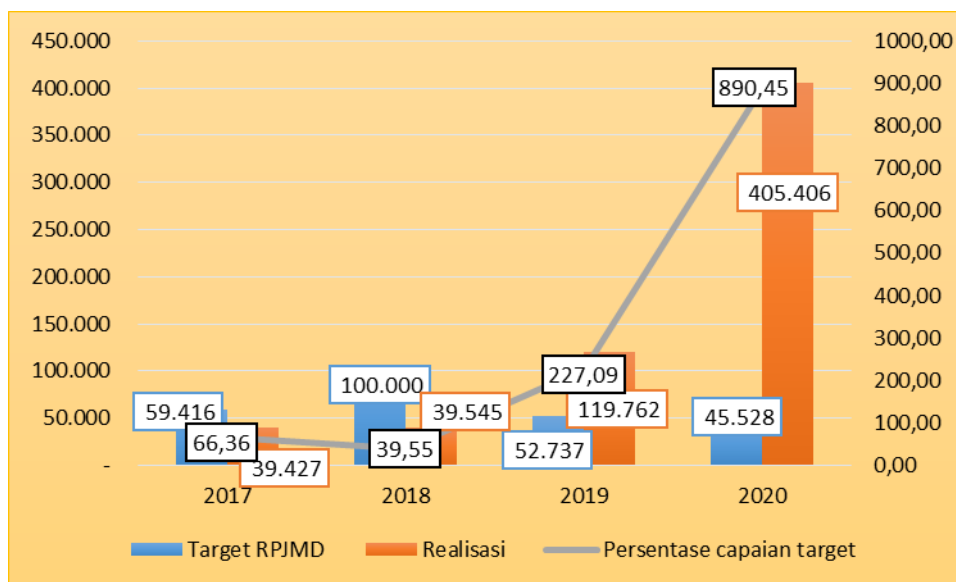
C. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari: Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi, Penerimaan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir dan Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari: Penyertaan Modal Pemerintah, Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan.

Dalam RPJMD, penerimaan pembiayaan direncanakan terutama berasal dari Pencairan Dana Cadangan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020. Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Kepulauan Riau digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur modal dan memperkuat share permodalan pada BUMD.

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2017 dalam RPJMD direncanakan sebesar Rp.59.415.664.756,- dengan realisasi sebesar Rp.39.427.248.919,-(66,36%). Selanjutnya pada tahun 2018 penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan dalam RPJMD sebesar Rp. 100.000.000.000,- namun hanya terealisasi Rp.39.545.040.828,- (39,55%). Tahun 2019 penerimaan pembiayaan meningkat menjadi Rp. 119.762.452.305,- dari target RPJMD sebesar Rp. 52.736.698.837,- (227,10%). Tahun 2020 penerimaan pembiayaan meningkat menjadi Rp. 405.406.000.000,- dari target RPJMD sebesar Rp. 45.528.000.000,- (890,45%).

Secara lebih rinci realisasi target penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Gambar 3.10 dibawah ini.



Gambar 3.10. Perbandingan dan Persentase Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2020 dengan Target RPJMD (Juta Rupiah)

Pengeluaran pembiayaan daerah di dalam RPJMD di targetkan memiliki realisasi Rp.0 dari tahun 2017-2020. Berdasarkan data yang ada, pengeluaran pembiayaan hanya terjadi di tahun 2018 terdapat pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.117.791.909,- yang digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. **Perbandingan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2020 dengan Target RPJMD (Juta Rupiah)**

Pencapaian target kinerja pembiayaan daerah tahun 2017-2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Pencapaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2020

URAIAN	2017		% Capaian Target	2018		% Capaian Target	2019		% Capaian Target	2020		% Capaian Target
	Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	59.415.664.756	9.427.248.919	66,36	100.000.000.000	39.545.040.828	39,55	52.736.698.837	119.762.452.305	227,1	45.528.488.177	405.406.834.700	890,45
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	59.415.664.756	9.427.248.919	66,36	100.000.000.000	39.427.248.919	39,43	52.736.698.837	119.762.452.305	227,1		405.366.252.062,57	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-	117.791.909	100	-	-	-	-	40.582.637,00	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-	117.791.909	100	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	117.791.909	100	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BAB IV

EVALUASI KINERJA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU SAMPAI TAHUN 2020

Evaluasi terhadap kinerja tujuan RPJMD mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 yang kemudian diubah melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

Visi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”**. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Dari misi yang ada tersebut, kemudian diterjemahkan lebih operasional ke dalam tujuan-tujuan. Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka tujuan harus bisa diukur melalui indikator-indikator.

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh kepala daerah selama periode pemerintahannya. Visi dan Misi tersebut diterjemahkan melalui indikator-indikator kinerja beserta target yang ingin dicapai selama 5 tahun.

Evaluasi capaian kinerja RPJMD sampai tahun 2020 dibedakan menjadi 3 kategori, yakni telah tercapai, akan tercapai, dan perlu upaya keras. Penentuan status kategori tersebut didasarkan pada persentase capaian tahun 2020 diperbandingkan dengan target akhir tahun 2021.

Tabel 4.1.
Status Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2020
Terhadap Target Akhir RPJMD

No	Kriteria Lengkap Penilaian Status Kinerja	Simbol	Keterangan
1	Apabila persentase capaian target akhir RPJMD s/d tahun 2020 sebesar $\geq 100\%$		Target akhir RPJMD telah tercapai
2	Apabila persentase capaian target akhir RPJMD s/d tahun 2020 sebesar 80% sampai dengan kurang dari 100%		Target akhir RPJMD akan tercapai
3	Apabila persentase capaian target akhir RPJMD s/d tahun 2020 kurang dari 80%		Pencapaian Target akhir RPJMD perlu upaya keras

A. Evaluasi Indikator Kinerja Tujuan

Indikator kinerja tujuan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 berjumlah 18 indikator. Hasil evaluasi sampai tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator berstatus akan mampu tercapai pada akhir periode. Jumlah indikator yang sudah tercapai targetnya sebanyak 3 indikator (16,67%), indikator yang targetnya akan mampu tercapai di akhir periode sebanyak 8 indikator (44,44%), indikator yang berstatus perlu upaya keras untuk pencapaiannya sebanyak 4 indikator (22,22%), dan indikator yang belum memiliki data sebanyak 3 (16,67%).

Gambaran capaian kinerja masing-masing indikator di setiap tujuan dan sasaran tersaji dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Jumlah Indikator dan Persentase Capaian Terhadap Target Masing-Masing Tujuan RPJMD

Uraian	Jumlah Indikator	Status Tercapai		Status Akan Tercapai		Status Perlu Upaya Keras		Tidak Tersedia Data	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tujuan									
1. Melestarikan Budaya Melayu dan nilai-nilai agama	2	1	50	0	0	0	0	1	50
2. Meningkatkan ketertiban dan keamanan di masyarakat	1	1	100	0	0	0	0	0	0
3. Meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota	1	0	0	0	0	0	0	1	100
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	1	0	0	1	100	0	0	0	0
5. Meningkatkan kualitas pendidkan dan keterampilan sumber daya manusia	2	0	0	0	0	1	50	1	50

Uraian	Jumlah Indikator	Status Tercapai		Status Akan Tercapai		Status Perlu Upaya Keras		Tidak Tersedia Data	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	1	1	100	0	0	0	0	0	0
7. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	2	0	0	2	100	0	0	0	0
8. Meningkatkan pengembangan perekonomian pariwisata dan kemaritiman	2	0	0	1	50	1	50	0	0
9. Meningkatkan Produksi Pertanian dan ketahanan pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat	2	0	0	2	100	0	0	0	0
10. Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif	1	0	0	0	0	1	100	0	0
11. Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri memanfaatkan bahan baku lokal	1	0	0	0	0	1	100	0	
12. Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	1	0	0	1	100	0	0	0	0
13. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi	1	0	0	1	100	0	0	0	0
JUMLAH	18	3	16,67	8	44,44	4	22,22	3	16,67

Secara rinci capaian masing-masing indikator tujuan dalam dokumen RPJMD

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1. Tujuan 1, Melestarikan Budaya Melayu dan Nilai-Nilai Agama

Indikator dari tujuan ini adalah Tingkat Kelestarian Budaya Melayu dan Indeks kerukunan antar umat beragama. Capaian kinerja indikator Tingkat Kelestarian Budaya Melayu sampai tahun 2020 belum dapat diketahui karena belum tersedia data. Adapun untuk indeks kerukunan antar umat beragama, berdasarkan data tahun 2019 capaiannya adalah 72,80%, adapun targetnya adalah 70% di akhir periode RPJMD. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator indeks kerukunan antar umat beragama sudah sesuai target bahkan melebihi yang seharusnya.

Tabel 4.3.

Capaian Kinerja Tujuan 1, Melestarikan Budaya Melayu dan Nilai-Nilai Agama Sampai dengan Tahun 2020

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi				Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
		2017	2018	2019	2020			
1. Tingkat Kelestarian Budaya Melayu (%)	11,16	NA	NA	NA	NA	48,41	-	-
2. Indeks kerukunan antar umat beragama (%)	67,9	71,1	71,1	72,80	NA	70,00	104,00 (2019)	

2. Tujuan 2, Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan di Masyarakat.

Indikator keberhasilan dari tujuan ini adalah meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh, tahun 2019 realisasi kinerjanya mencapai 108,85% karena targetnya adalah 75,0% sedangkan capaiannya adalah 81,64%.

Tabel 4.4.

Capaian Kinerja Tujuan 2, Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan di Masyarakat Sampai dengan Tahun 2020

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi				Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
		2017	2018	2019	2020			
1. Indeks Demokrasi Indonesia (%)	72,84	76,33	79,19	81,64	NA	75,00	108,85 (2019)	

3. Meningkatkan Keterhubungan Antar Kabupaten/Kota

Tujuan ketiga, keberhasilannya dapat diukur dari ketercapaian indikator Tingkat Konektivitas antar kab/kota. Tingkat capaian indikator ini belum dapat diketahui hasilnya karena ada perbedaan satuan dari data yang ada. Indikator tingkat konektivitas antar kab/kota pada dokumen RPJMD memiliki satuan hitung persen (%), akan tetapi pada realisasinya memakai satuan panjang kilometer (km). Hal tersebut menjadikan tidak bisa dilakukan penghitungan atas tingkat ketercapaian targetnya.

Tabel 4.5.

Capaian Kinerja Tujuan 3, Meningkatkan Keterhubungan Antar Kabupaten/Kota Sampai dengan Tahun 2020

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi				Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
		2017	2018	2019	2020			
Tingkat Konektivitas antar kab/kota ((panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis) (%))	60,88	6,97	16,2	25,96 (km)	NA	95	-	-

4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Keberhasilan tujuan keempat diukur dari tercapainya target dari indikator Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan). Untuk indikator

ini, tingkat realisasi tahun 2020 terhadap target RPJMD tahun 2021 statusnya diperkirakan akan mampu mencapai target di akhir periode karena sampai tahun 2020 realisasinya sudah mencapai 69,43% dari target yang ditetapkan. Selain itu, setiap tahun capaian target ini juga mengalami tren yang meningkat.

Tabel 4.6.

Capaian Kinerja Tujuan 4, Cakupan Pelayanan Sanitasi (Air Limbah Perkotaan, Drainase, Persampahan) Sampai dengan Tahun 2020

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi				Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
		2017	2018	2019	2020			
Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan) (%)	65,21	58,22	61,01	61,44	83,48	88,49	94,33	

5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia

Terdapat 2 indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan tujuan 5, yaitu Indeks Pendidikan dalam IPM dan Tingkat Penangguran Terbuka (TPT). Dari 2 indikator tersebut, 1 indikator (Tingkat Pengangguran Terbuka) pada tahun 2020 justru mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 TPT di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 10,34%. Kondisi ini mengakibatkan tingkat realisasi terhadap target akhir menjadi sangat rendah yakni baru 52,91% karena target TPT di tahun 2021 adalah 7,03%. Sedangkan untuk indikator Indeks Pendidikan dalam IP, masih belum bisa diketahui tingkat capaian dan trennya karena belum tersedia data. Secara rinci capaian masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.7.

**Capaian Kinerja Tujuan 5, Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Ketrampilan
Sumber Daya Manusia Sampai dengan Tahun 2020**

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi				Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
		2017	2018	2019	2020			
1. Indeks Pendidikan dalam IPM (indeks)	0,67	NA	NA	NA	NA	0,72	-	-
2. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)(%)	7,69 (2016)	7,16	7,12	6,91	10,34	7,03	52,91	

6. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Indikator keberhasilan dari tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator sudah mampu mencapai target di akhir periode RPJMD. Selain itu trennya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dengan tingkat capaian target pada tahun 2020 sebesar 100,53%. Realisasi kinerja IPM sebesar 75,59 pada tahun 2020, sedangkan target di 2021 adalah 75,19.

Tabel 4.8.

**Capaian Kinerja Tujuan 6, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Sampai
dengan Tahun 2020**

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi				Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
		2017	2018	2019	2020			
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	73,99	74,23	74,55	75,48	75,59	75,19	100,53	

7. Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua alat ukur (indikator) untuk melihat keberhasilan dari pencapaian tujuan nomor 7.

Tingkat realisasi kinerja untuk IPG pada tahun 2020 sebesar 93,31. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 yang sebesar 94,75 maka hasilnya adalah 98,48%. Dengan demikian status kinerja indikator ini adalah akan mampu tercapai di akhir periode, karena jika dilihat trennya, capaian indikator ini juga mengalami peningkatan. Sedangkan untuk IDG, capaian sampai tahun 2020 realisasinya sudah mampu mencapai 98,54% dari target tahun 2021. Dengan demikian maka target RPJMD dari indikator ini mungkin bisa tercapai di tahun 2020, meskipun demikian trennya justru mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya..

Tabel 4.9.

Capaian Kinerja Tujuan 7, Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan Sampai dengan Tahun 2020

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi				Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
		2017	2018	2019	2020			
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks)	93,20	92,96	92,97	93,10	93,31	94,75	98,48	
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (indeks)	60,79	66,96	66,18	61,59	NA	62,5	98,54 (2019)	

8. Meningkatkan Pengembangan Perekonomian Pariwisata dan Kemaritiman

Indikator keberhasilan tujuan nomor 8 adalah Nilai Tukar Nelayan dan Persentase Kenaikan Kunjungan Wisatawan. Pada tahun 2020, indikator Nilai Tukar Nelayan angkanya sudah berada di 103,56% sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2019. Adapun target akhir RPJMD pada tahun 2021 untuk Nilai Tukar Nelayan adalah 110,57%, artinya pada tahun 2020 target untuk indikator ini mampu tercapai sebesar 93,66% dan kemungkinan akan tercapai di akhir periode RPJMD. Sedangkan untuk indikator persentase kenaikan kunjungan wisatawan capainnya masih sangat rendah yakni 0,26% dari target akhir sebesar 23%. Tahun 2020 kenaikan kunjungan wisata hanya 0,06% saja, dan kemungkinan di akhir periode RPJMD tidak akan mampu memenuhi target.

Tabel 4.10.

Capaian Kinerja Tujuan 8, Meningkatkan Pengembangan Perekonomian Pariwisata dan Kemaritiman Sampai dengan Tahun 2020

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi				Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
		2017	2018	2019	2020			
1. Nilai Tukar Nelayan (%)	109,36	110,7	115,26	117,42	103,56	110,57	93,66	
2. Persentase kenaikan kunjungan wisatawan (%)	3,04	NA	0,20	0,13	0,06	23 (dari tahun 2016)	0,26	

9. Meningkatkan Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan Guna Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Nilai Tukar Petani (NTP) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan tolok ukur keberhasilan tujuan nomor 9. Target tahun 2021 untuk NTP adalah 100%, dan pada tahun 2020 capaiannya berada di angka 99,84%. Dari perbandingan tersebut maka target untuk indikator NTP mungkin akan tercapai di tahun 2021. Tren pencapaian indikator NTP juga meningkat meskipun kondisinya fluktuatif dan sedikit menurun di tahun 2020. Adapun untuk indikator Skor PPH, statusnya akan mampu dicapai di akhir periode RPJMD tahun 2021. Hal tersebut karena tingkat realisasi target pada tahun 2020 sudah mencapai 95,29%, dan trennya semakin meningkat.

Tabel 4.11.

Capaian Kinerja Tujuan 9, Meningkatkan Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan Guna Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Sampai dengan Tahun 2020

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi				Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
		2017	2018	2019	2020			
1. Nilai Tukar Petani (NTP) (%)	98,16	97,98	97,02	101,41	99,84	100	99,84	
2. Skor pola pangan harapan (skor)	83,8	88,4	87	89,1	89,1	93,5	95,29	

10. Menciptakan Iklim Ekonomi yang Kondusif

Untuk mengukur kinerja tujuan nomor 10, perlu dilihat capaian kinerja dari indikator Pertumbuhan Ekonomi. Indikator ini statusnya sampai tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 akan sulit dicapai. Hal tersebut karena karena nilainya pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yakni -3,8%. Target akhir periode RPJMD untuk indikator ini adalah sebesar 5+1%.

Tabel 4.12.

Capaian Kinerja Tujuan 10, Meningkatkan Iklim Ekonomi yang Kondusif Sampai dengan Tahun 2020

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi				Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
		2017	2018	2019	2020			
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	2,01	4,56	4,66	-3,8	5±1	100,00	

11. Meningkatkan Ekspor dan Produktivitas Industri Memanfaatkan Bahan Baku Lokal

Indikator untuk tujuan nomor 11, adalah sama dengan indikator tujuan nomor 10 yaitu Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 4.13.

Capaian Kinerja Tujuan 11, Meningkatkan Ekspor dan Produktivitas Industri Memanfaatkan Bahan Baku Lokal Sampai dengan Tahun 2020

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi				Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
		2017	2018	2019	2020			
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	2,01	4,56	4,66	-3,8	5±1	100,00	

12. Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 statusnya adalah akan mampu mencapai target akhir RPJMD tahun 2021, karena tingkat realisasi targetnya di tahun 2019 adalah 95,98%. Pada tahun 2017 dan 2018 angka IKLH Provinsi Kepulauan Riau bahkan telah mampu di atas RPJMD tahun

2021, namun di tahun 2019 dan 2020 angkanya turun dan itu berdampak terhadap realisasi capaian terhadap target akhir RPJMD.

Tabel 4.14.

Capaian Kinerja Tujuan 12, Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup Sampai dengan Tahun 2020

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi				Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
		2017	2018	2019	2020			
Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) (indeks)	66,97	70,19	70,34	66,5	67,00	69,8	95,98	

13. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi

Untuk mengetahui bagaimana kualitas reformasi birokrasi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari capaian kinerja Indeks Reformasi Briokrasi. Tahun 2020 capaian Indeks Reformasi Birokarsi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 65,83, sedangkan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah 75. Dengan demikian maka tingkat ketercapaian target untuk indikator ini sampai tahun 2020 adalah sebesar 85,77%, artinya dengan angka tersebut maka statusnya adalah akan mampu tercapai di akhir periode.

Tabel 4.15.

Capaian Kinerja Tujuan 13, Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Sampai dengan Tahun 2019

Indikator	Kondisi Awal Tahun 2016	Realisasi				Target 2021	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
		2017	2018	2019	2020			
Indeks Reformasi Birokrasi (angka)	41,15	64,18	64,18	65,83	65,83	75	87,77	

B. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran

Terdapat 50 indikator sasaran dari 24 sasaran dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Dari 50 indikator tersebut, 25 indikator (50%) masuk dalam kategori telah mencapai target RPJMD, kemudian 17 indikator (34%) diperkirakan akan mampu mencapai

target akhir RPJMD, dan sisanya 8 indikator (16%) masuk kategori memerlukan upaya keras bahkan diperkirakan tidak mampu mencapai target akhir RPJMD di tahun 2021.



Gambar 4.1. Tingkat Ketercapaian Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Sampai Tahun 2020

Rincian capaian masing-masing sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran 1; Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah.

Sasaran ini memiliki 2 indikator, dimana sampai tahun 2020 terdapat 1 indikator yang sudah mampu mencapai target tahun 2021 dan 1 indikator memerlukan upaya keras untuk pencapaian targetnya. Indikator yang sudah mampu mencapai target adalah Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari, dimana trennya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, capaian kinerja tahun 2020 yang sebesar 22,38% membuat realisasinya terhadap target akhir tahun 2021 mencapai 100% karena target akhir RPJMD adalah sebesar 22,38%. Sedangkan indikator yang memerlukan upaya keras adalah Persentase bangunan yang berciri khas melayu. Meskipun trennya meningkat namun capaian kinerja tahun 2020 hanya 26,16%, sedangkan target akhir RPJMD adalah 70,75%, dengan kata lain tingkat realisasinya hanya 36,97%.

Tabel 4.16.

Capaian Kinerja Sasaran 1, Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu sebagai Kekayaan Budaya Daerah Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Persentase bangunan yang berciri khas melayu (%)	6,02	8,28	16,54	13,44	32,33	14,32	49,70	26,16	70,75	36,97	
2. Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari (%)	19,58	19,58	20,28	19,93	20,98	22,03	21,68	22,38	22,38	100	

2. Sasaran 2; Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama

Sasaran 2 memiliki 2 indikator, yaitu Persentase Mubaligh yang tersertifikasi dan Persentase santri yang menjadi hafiz. Melihat realisasi pada tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, indikator Persentase Mubaligh yang tersertifikasi statusnya masih memerlukan upaya keras untuk mencapai target akhir karena baru mencapai 80%. Persentase santri yang menjadi hafiz juga sangat memerlukan upaya keras untuk mencapai target akhir karena baru mencapai 25%

Tabel 4.17.

Capaian Kinerja Sasaran 2, Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Agama Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Persentase Mubaligh yang tersertifikasi (%)	N/A	N/A	25	25	50	50	80,00	80,00	100	80,00	
2. Persentase santri yang	20	N/A	40	N/A	60	N/A	80,00	25,00	100	25,00	

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
menjadi hafiz (%)											

3. Sasaran 3; Meningkatnya ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat

Terdapat 2 indikator dalam sasaran ke-3 ini yakni Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dan Angka kriminalitas. Indikator Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur menunjukkan kinerja yang baik karena capaian per tahunnya mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD statusnya sudah masuk kategori tercapai karena di bawah target yang ditetapkan.

Tabel 4.18.

Capaian Kinerja Sasaran 3, Meningkatnya Ketertiban dan Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur (kasus)	250	240	230	240	200	235	185	0	150	200	
2. Angka kriminalitas (kasus)	4.880	NA	4.875	NA	4.870	NA	4.865	3.379	4.860	130,47	

4. Sasaran 4; Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi baik

Status indikator persentase jalan provinsi dengan kondisi baik pada tahun 2020 adalah akan mampu mencapai target akhir RPJMD tahun 2021. Tren jalan baik di Provinsi Kepulauan Riau semakin meningkat dari tahun ke tahun. Capaian tahun 2020 adalah

74,51%, adapun target akhir RPJMD adalah 75%. Dengan demikian maka tingkat realisasinya sudah mencapai 99,34%.

Tabel 4.19.

Capaian Kinerja Sasaran 4, Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Persentase jalan provinsi berkondisi baik (%)	67,97	67,3	69,73	70,31	71,49	73,64	73,24	74,51	75	99,34	

5. Sasaran 5; Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi

Sasaran kelima RPJMD memiliki 4 indikator sasaran, yakni Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro); Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro); Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut; dan Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut.

2 dari 4 indikator sasaran ini statusnya akan mampu mencapai target akhir RPJMD, yaitu Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro); dan Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut. Sedangkan indikator Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro); dan Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut, statusnya masih memerlukan upaya keras untuk mencapainya.

Tabel 4.20.

Capaian Kinerja Sasaran 5, Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Persentase ketersediaan Pelabuhan	71,43	71,43	71,43	71,43	85,71	71,43	92,86	71,43	100	71,43	

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
Penyeberang an (roro) (%)											
2. Persentase ketersediaan Kapal Penyeberang an (roro)(%)	77,78	77,78	77,78	77,78	88,89	88,89	100,00	88,89	100	88,89	
3. Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut (%)	64,71	58,82	73,53	73,53	82,35	82,35	91,18	91,18	100	91,18	
4. Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut (%)	55,56	55,56	66,67	55,56	77,78	55,56	88,89	55,56	100	55,56	

6. Sasaran 6; Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi

Indikator Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan), tingkat realisasi tahun 2020 terhadap target RPJMD tahun 2021 statusnya diperkirakan memerlukan upaya keras untuk mencapai target di akhir periode karena sampai tahun 2020 realisasinya baru mencapai 62,98% atau hanya 71,17% dari target yang ditetapkan. Meskipun demikian, tren capaian per tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 4.21.
Capaian Kinerja Sasaran 6, Meningkatnya Kapasitas dan Fungsi Sanitasi Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan) (%)	68,48	58,22	73,48	61,01	78,48	61,44	83,48	62,98	88,49	71,17	

7. Sasaran 7; Meningkatnya akses pelayanan air bersih

Sasaran nomor 7 diukur dengan indikator Persentase pelayanan akses air bersih yang aman. Status untuk indikator ini adalah akan mampu dicapai di akhir periode RPJMD, karena tingkat capaian di tahun 2020 sudah sebesar 92,68% dari total 100% target RPJMD di tahun 2021. Trennya juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2020.

Tabel 4.22.

Capaian Kinerja Sasaran 7, Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Persentase pelayanan akses air bersih yang aman (%)	89,44	89,44	92,19	92,15	96,79	92,47	97,59	92,68	100	92,68	

8. Sasaran 8; Berkurangnya kawasan kumuh

Sasaran ke-8 diukur dengan indikator luasan kawasan kumuh yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Luas kawasan kumuh pada tahun 2020 masih seluas 399,8 Hektar, sedangkan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah 255,09 Hektar. Dari data tersebut maka tingkat capaian target akhir RPJMD sampai tahun 2020 baru sebesar 43,27%. Dengan demikian maka status untuk indikator ini adalah masih memerlukan upaya keras untuk mencapai target.

Tabel 4.23.

Capaian Kinerja Sasaran 8, Berkurangnya Kawasan Kumuh Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Luas Kawasan Kumuh (Ha)	752,99	752,62	627,69	529,82	549,53	476,85	379,57	399,8	255,09	43,27	

9. Sasaran 9; Meningkatnya rasio elektrifikasi

Rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017-2020 trennya semakin baik karena meningkat. Status capaian tahun 2020 dibandingkan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah telah mampu tercapai dengan tingkat persentase realisasi target capaian sebesar 100,23% atau capaiannya sebesar 93,72 dengan target 93,5% di tahun 2021.

Tabel 4.24.

Capaian Kinerja Sasaran 9, Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Rasio Elektrifikasi (%)	89,15	91,44	90,5	91,5	91,5	92,59	92,50	93,72	93,5	100,23	

10. Sasaran 10; Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Sasaran 10 RPJMD meliputi 2 indikator sasaran, yakni Rata-rata Lama Sekolah dan Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B. Dilihat dari capaian tahun 2020 dan target akhir RPJMD, kedua indikator masuk dalam status akan mampu tercapai di akhir periode yakni tahun 2021. Angka Rata-rata Lama Sekolah tingkat ketercapaian target sampai tahun 2020 sebesar 96,65%, sedangkan indikator Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B memiliki tingkat ketercapaian 87,80%.

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau mengalami tren peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2020, sedangkan Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B justru mengalami tren yang menurun meskipun fluktuatif.

Tabel 4.25.

Capaian Kinerja Sasaran 10, Meningkatnya Kualitas Pendidikan Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,83	9,69	9,99	9,79	10,15	9,81	10,31	10,12	10,47	96,65	
2. Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B (%)	76	72,81	78	74	80	62,5	82,00	73,76	84	87,80	

11. Sasaran 11; Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja.

Keberhasilan sasaran 11 RPJMD dapat dilihat dari tingkat ketercapaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berstatus akan mampu tercapai di akhir periode RPJMD, dengan tingkat ketercapaian pada tahun 2020 masing-masing adalah 99,55%. Sedangkan Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan telah mampu melebihi target dengan tingkat persentase realisasi sebesar 116,93%.

Tren penurunan dengan kondisi yang fluktuatif dialami oleh indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yakni dari 66,41% di tahun 2017 menjadi 67,50% di tahun 2020. Sedangkan tren meningkat dialami oleh indikator Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan, yakni dari 48,8% di tahun 2017 menjadi 74,84% di tahun 2020.

Tabel 4.26.

Capaian Kinerja Sasaran 11, Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66,3	66,41	66,68	64,72	67,05	64,76	67,43	67,50	67,8	99,55	

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
2. Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	56	48,8	58	60,5	60	60,69	62,00	74,84	64	116,93	

12. Sasaran 12; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran ke-12 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan dalam 3 indikator sasaran. Berdasarkan capaian tahun 2020 ketiga indikator sasaran tersebut semuanya mampu mencapai target akhir RPJMD tahun 2021. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH dengan persentase capaian sebesar 116,79%. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH dengan tingkat capaian 178,67%. Persentase kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita dengan persentase capaian sebesar 165,43%.

Tren capaian ketiga indikator tersebut dari tahun 2017 sampai 2020 juga mengalami tren yang membaik karena selalu menurun.

Tabel 4.27.

Capaian Kinerja Sasaran 12, Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	132	131	131	130	130	98	129	106,5	128	116,79	
2. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	34	18	33	15	32	13	31	6,4	30	178,67	
3. Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita) (%)	17,4	16,4	17,1	13	16,8	11,9	16,50	5,6	16,2	165,43	

13. Sasaran 13; Angka kemiskinan menurun

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami tren yang semakin membaik karena selalu menurun. Capaian tahun 2017 sebesar 6,13% dan tahun 2020 turun menjadi 5,92%. Capaian tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 95,77% karena target akhir RPJMD adalah sebesar 5,68%. Dengan capaian tersebut maka status untuk indikator ini adalah akan tercapai di akhir periode RPJMD tahun 2021.

Tabel 4.28.

Capaian Kinerja Sasaran 13, Angka Kemiskinan Menurun Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Persentase penduduk miskin (%)	6,13	6,13	6,07	5,83	5,98	5,8	5,83	5,92	5,68	95,77	

14. Sasaran 14; Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Sasaran ke-14 memiliki 2 indikator sasaran yakni IPG dan IDG. Pada tahun 2020, capaian indikator IPG adalah 93,10, sedangkan target akhir RPJMD adalah 94,75. Dengan capaian tersebut maka IPG masuk dalam status akan mampu dicapai di akhir periode RPJMD dengan tingkat capaian sebesar 98,25%. Adapun untuk indikator IDG, capaian tahun 2020 sebesar 61,58, sedangkan target akhir tahun 2021 adalah 62,5. Artinya dari data tersebut tingkat ketercapaian IDG tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 adalah sebesar 98,52% dan statusnya adalah diperkirakan akan mampu tercapai di akhir periode.

Tabel 4.29.

Capaian Kinerja Sasaran 14, Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks)	93,75	92,96	94	92,97	94,25	NA	94,5	93,10	94,75	98,25	
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (indeks)	61,5	66,96	61, 8	66,18	62	NA	62,25	61,58	62,5	98,52	

15. Sasaran 15; Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan

Sasaran 15 memiliki 3 buah indikator, yakni Jumlah Produksi Perikanan Tangkap; Jumlah produksi perikanan budidaya; dan Jumlah produk olahan Hasil perikanan. Indikator tersebut cukup mewakili profil Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah kepulauan.

Dari 3 indikator tersebut, 2 indikator yakni Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah produk olahan Hasil perikanan pada tahun 2020 sudah mampu mencapai target yang diberikan pada akhir periode RPJMD. Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 319.196,89 ton, meningkat dari produksi tahun 2017 yang sebesar 304.038,71 ton. Dan capaian tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 306.643 ton, maka tingkat realisasinya sebesar 104,15%. Produksi olahan hasil perikanan tahun 2020 sebesar 6.205,90 ton, menurun jika dibandingkan produksi tahun 2017 yang sebesar 1.902,48 ton. Meskipun demikian, jika disandingkan dengan target akhir RPJMD yang sebesar 1.331 ton, maka tingkat ketercapaian nya adalah 466,25%. Sedangkan 1 indikator berstatus akan mampu dicapai di akhir periode, yaitu jumlah produksi perikanan budidaya. Tingkat ketercapaiannya sebesar 97,3% dari target akhir.

dijabarkan dalam 1 indikator sasaran yakni persentase rata-rata pertumbuhan investasi.

Tabel 4.30.
Capaian Kinerja Sasaran 15, Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	304. 019	304.038, 71	304. 628	304.975, 02	305. 239	309.287, 15	305. 850	319.196, 89	306. 463	104,15	
2. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	33.649	34.302	33.717	34.399, 86	33.785	33.003, 11	33.852, 66	21.421, 10	33.920	97,30	
3. Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	1.320	1.902,48	1.323	1.336, 82	1.326	1.803, 55	1.328, 88	6.205, 90	1.331	466,25	

16. Sasaran 16; Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Indikator dari sasaran ke 16 adalah Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2017 kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2,07 juta orang, menurun menjadi 0,41 juta orang di tahun 2020. Artinya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara trennya semakin meningkat. Capaian tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,5 juta orang, maka tingkat capaiannya adalah 16,44% dengan status memerlukan upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMDnya.

Tabel 4.31.

Capaian Kinerja Sasaran 16, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (juta orang)	2,2	2,07	2,25	2,63	2,3	2,86	2,4	0,41	2,5	16,44	

17. Sasaran 17; Meningkatnya produksi pertanian

3 indikator dalam sasaran ke-17 (Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura, Jumlah Produksi Tanaman Palawija, dan Jumlah Produksi Padi) dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau memiliki status sudah tercapai targetnya. Hal ini dapat diketahui dari capaian tahun 2020 yang sudah berada di atas target akhir tahun 2021 sehingga tingkat capaiannya berada di atas 100% semua.

Jika dilihat dari trennya, maka ada 2 indikator yang trennya semakin meningkat yakni jumlah produksi tanaman komoditas holtikultura dan jumlah produksi padi. Sedangkan untuk indikator jumlah produksi tanaman palawija trennya mengalami penurunan.

Tabel 4.32.

Capaian Kinerja Sasaran 17, Meningkatnya Produksi Pertanian Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura (ton)	39.936	40.301	41.692	46.659	43.239	72.654,9	44.644	57.401	45.822	158,56	
2. Jumlah Produksi Tanaman Palawija (ton)	12.367	19.531,5	12.679	14.957	12.679	14.957	12.742	20.606,84	12.742	117,38	
3. Jumlah Produksi Padi (ton)	792	601	850	833	1.020	1167,8	1.020	1.360,82	1.020	114,49	

18. Sasaran 18; Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan

Sasaran 18 terdiri dari 2 indikator sasaran yakni Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dilihat dari capaian realisasinya, kedua indikator tersebut sudah mampu mencapai target akhir RPJMD di tahun 2020. Tingkat capaian kedua indikator tersebut adalah 107,4% dan 106,66%.

Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen masih di bawah batas yakni 11,7%, sedangkan targetnya adalah <10%. Adapun skor PPH ketersediaan trennya meningkat dari 83,09 di tahun 2017 menjadi 103,99 di tahun 2020.

Tabel 4.33.

Capaian Kinerja Sasaran 18, Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen (%)	CV < 10	9,2	CV < 10	9,2	CV < 10	9,26	CV<10	11,7	CV < 10	107,40	
2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan (skor)	89	83,09	90	82,29	91	99,19	92,00	103,99	93	106,66	

19. Sasaran 19; Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing koperasi dan UKM

Indikator sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ke-19 dalam RPJMD adalah jumlah nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing, Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi.

Jumlah nilai realisasi investasi asing di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar 23.751 Miliar Rupiah, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun tahun 2020

mengalami peningkatan namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang sebesar 45.608 Miliar Rupiah, angka tersebut baru mencapai 52,07% dari target. Dengan demikian maka statusnya adalah memerlukan upaya keras dalam pencapaian targetnya.

Indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), juga mengalami tren yang meningkat. Dari sebesar 1.398 Miliar Rupiah di tahun 2017 menjadi 14,249 Miliar Rupiah di tahun 2020. Angka tahun 2020 ini telah mampu melampaui target akhir RPJMD tahun 2021 yang sebesar 3.993 Miliar Rupiah, atau dengan kata lain tingkat pencapaiannya sudah 356,69% dan sudah mampu mencapai target.

Indikator ketiga yakni Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima di pasar modern atau tersertifikasi, tingkat pencapaian target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 89,21%. Artinya masuk dalam status akan tercapai di akhir periode RPJMD.

Tabel 4.34.

Capaian Kinerja Sasaran 19, Meningkatnya Realisasi Investasi dan Daya Saing Koperasi dan UKM Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) (Rp Miliar)	7.300	13.823	7.500	11.138	7.700	20.450	7.900	23.751	45.608	52,07	
2. Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rp Miliar)	500	1.398	600	4.385	700	5.656	800	14.249	3.993	356,69	
3. Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki	18,5	19,8	19,2	19,3	20,19	19,85	21,22	20,93	22,25	89,21	

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi (%)											

20. Sasaran 20; Meningkatnya kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal.

Sasaran ke-19 terdiri dari 2 indikator sasaran, dilihat dari capaiannya di tahun 2020 terdapat 1 indikator berstatus akan mampu mencapai target akhir RPJMD dan 1 indikator lainnya sudah mampu mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang akan mampu mencapai target akhir RPJMD yakni indikator Jumlah industri berbahan baku lokal dengan persentase capaian 89,27%. Meskipun belum mampu mencapai target, namun tren capaian untuk indikator ini menunjukkan hasil yang positif karena selalu meningkat.

Sedangkan indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD yakni nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal dengan realisasi capaian sebesar 197,73%. Tren pencapaian indikator ini fluktuatif dengan kondisi terakhir tahun 2020 mengalami penurunan.

Tabel 4.35.
Capaian Kinerja Sasaran 20, Meningkatnya Kuantitas Produksi Industri Pengolahan Berbasis Bahan Baku Lokal Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Jumlah industri berbahan baku local (unit)	1.720	1.750	1.850	1.850	1.969	1.969	2.117	1.964	2.200	89,27	

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
2. Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal (Juta US \$)	1.258,94	2.915,73	1.332,21	3.034,45	1.405,48	2.727,48	1.478,75	3.065,30	1.550,20	197,73	

21. Sasaran 21; Meningkatnya kinerja sektor perdagangan

Sasaran ini di dukung oleh 1 indikator sasaran, yakni Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Capaiannya sampai tahun 2020 adalah 8,50%. Capaian tahun 2020 ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 yang sebesar 8,52%, capaian tahun 2020 sudah berada di atas target yakni sebesar 99,76% dari target. Dengan demikian masuk dalam status akan mampu mencapai target RPJMD.

Tabel 4.36.
Capaian Kinerja Sasaran 21, Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	8,19	7	8,27	8,56	8,35	9,07	8,44	8,50	8,52	99,76	

22. Sasaran 22; Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan

Sasaran ke-21 memiliki 2 indikator, yakni Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu dan Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan.

Indikator Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu pada tahun 2020 mencapai 100%. Dibandingkan dengan target RPJMD maka capaian tersebut masuk dalam status telah tercapai, karena target akhir periode juga sebesar 100%.

Sedangkan indikator Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan capaiannya sudah memenuhi target dengan realisasi 16,27.

Tabel 4.37.

Capaian Kinerja Sasaran 22, Berkurangnya Kerusakan Lingkungan, Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan Sampai dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu (%)	72,73	80	72,73	66,67	81,82	100	90,91	40,00	100	100,00	
2. Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan (%)	10,37	NA	10,52	NA	10,68	NA	10,84	16,27	10,99	148,04	

23. Sasaran 23; Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Terdapat 5 indikator dalam sasaran ke-23 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. indikator yakni Indeks Profesionalitas Pegawai tahun 2020 sebesar 67,00; Nilai hasil evaluasi SAKIP capaian indikatornya telah mencapai target sedangkan diketahui dan Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi pada tahun 2020 sebesar 82,89.

Dua indikator lainnya yakni Nilai Keterbukaan informasi publik, dan Nilai e-government, tingkat capaiannya terhadap target akhir RPJMD berstatus akan dapat tercapai di akhir periode. Capaian masing-masing indikator tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 109,89% dan 96% dari target akhir. Capaian kedua indikator tersebut juga mengalami tren yang meningkat.

Tabel 4.38.

**Capaian Kinerja Sasaran 23, Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas
Pemerintah Daerah Sampai dengan Tahun 2020**

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Indeks Profesionalitas Pegawai (nilai)	70	NA	72	NA	75	NA	78,00	67,00	80	83,75	
2. Nilai hasil evaluasi SAKIP (kategori)	BB	NA	BB	NA	BB	NA	BB	BB	BB	100	
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (skala)	B	NA	B	NA	B	NA	74,00	82,89	B	100	
4. Nilai Keterbukaan informasi publik (skala)	62	13,03	63,5	53,87	65	43,24	65,00	74,18	67,5	109,89	
5. Nilai e-government (skala)	2,1	2,1	2,2	2,1	2,3	2,4	2,40	2,40*	2,5	96,00	

24. Sasaran 24; Meningkatnya Pendapatan Daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

Tiga indikator yang menjadi ukuran keberhasilan sasaran ini adalah Realisasi Pendapatan Asli Daerah; Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau; dan Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau dan Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 telah mampu mencapai target akhir RPJMD karena capaiannya sudah di atas 100%. Sedangkan indikator Realisasi Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mampu tercapai target akhir RPJMD pada tahun 2021 karena capaiannya sudah sebesar 80,23% dari target.

Tabel 4.39.

Capaian Kinerja Sasaran 24, Meningkatnya Pendapatan Daerah, dan Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel Sampai Dengan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja								Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
	2017		2018		2019		2020				
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Trilyun Rupiah)	1.213	1.091	1.224	1.229	1.330	1.303	1457	1.303	1.624	80,23	
2. Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau (opimi)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	
3. Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (level)	3	3	3	6	3	3	3	3	3	100,00	

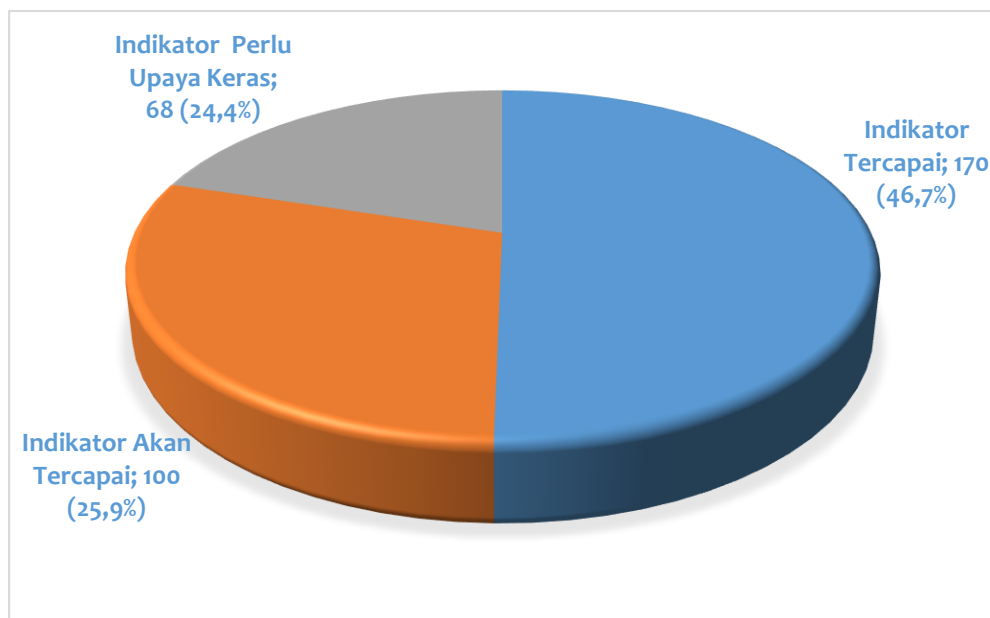
BAB V

EVALUASI KINERJA PROGRAM RPJMD

A. Capaian Kinerja Program Masing-Masing Urusan Pemerintahan

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh kepala daerah selama periode pemerintahannya. Visi dan Misi tersebut harus dapat dicapai melalui pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan dalam dokumen RPJMD. Program-program itu kemudian diterjemahkan ke dalam indikator yang harus dicapai dalam periode RPJMD tersebut.

Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 memuat 338 indikator dari seluruh program di masing-masing urusan yang keseluruhannya dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada. Dari 338 indikator tersebut 170 (46,7%) di antaranya telah tercapai targetnya di tahun 2020. 100 indikator (25,9%) statusnya akan tercapai di akhir periode RPJMD, dan 68 indikator (24,4%) indikator memerlukan upaya keras untuk mencapai target RPJMD.



Gambar 5.1. Tingkat Ketercapaian Indikator Program RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Sampai Tahun 2020

Rincian capaian masing-masing indikator dalam RPJMD tiap urusan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Jumlah Indikator dan Capaian Berdasarkan Urusan

Urusan	Jumlah Indikator	Indikator Tercapai	Indikator Akan Tercapai	Indikator Perlu Upaya Keras
1. Pendidikan	14	5	8	1
2. Kesehatan	25	22	2	1
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	3	6	3
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	1	5	0
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum,	11	5	1	5
6. Sosial	18	9	1	8
7. Ketenaga Kerjaan	11	5	4	2
8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	5	2	2	1
9. Pangan	6	3	3	0
10. Pertanahan	1	1	0	0
11. Lingkungan Hidup	9	3	2	4
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	0	0
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	2	1	1
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	1	0	1
15. Perhubungan	15	8	3	4
16. Komunikasi dan Informatika	3	3	0	0
17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	5	0	4	1
18. Penanaman Modal	6	5	1	0
19. Kepemudaan dan Olahraga	6	5	0	1
20. Statistik	1	1	0	0
21. Persandian	1	1	0	0
22. Kebudayaan	5	3	0	2
23. Perpustakaan	3	0	1	2
24. Kearsipan	2	0	1	1
25. Kelautan dan Perikanan	10	4	3	3
26. Pariwisata	7	1	2	4
27. Pertanian	12	6	4	2

Urusan	Jumlah Indikator	Indikator Tercapai	Indikator Akan Tercapai	Indikator Perlu Upaya Keras
28. Kehutanan	5	1	3	1
29. ESDM	9	3	4	2
30. Perdagangan	9	5	4	0
31. Perindustrian	10	2	7	1
32. Transmigrasi	2	0	0	2
33. Penunjang Perencanaan	12	8	4	
34. Penunjang Penelitian dan Pengembangan	2	0	1	1
35. Penunjang Keuangan	13	5	6	2
36. Penunjang Kepegawaian dan Diklat	6	3	0	3
37. Penunjang Pengawasan	9	8	0	1
38. Penunjang Sekretariat DPRD	9	8	1	0
39. Penunjang Sekretariat Daerah	50	26	16	8
Jumlah	338	170	100	68
Persentase	100	46,7	25,9	24,4

Untuk melihat capaian masing-masing indikator program di tiap urusan digambarkan dalam uraian berikut ini.

A. Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan terdiri dari 4 program yang dijabarkan kedalam 14 indikator program yaitu : 1) Angka Rata-rata Lama Sekolah; 2) Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/MAK; 3) Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB; 4) Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/MAK; 5) Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/MAK; 6) Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK Dalam Kondisi Baik; 7) Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik; 8) Jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK; 9) Rasio siswa per ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK; 10) Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4; 11) Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B; 12) Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi; 13) Persentase lulusan SMK/MAK yang diterima di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha 14) Rata-rata Nilai Ujian Nasional(UN) SMA/MA/SMK/MAK

Realisasi pencapaian target indikator program urusan pendidikan sejak tahun 2017-2020 hampir semua indikator menunjukkan capaian realisasi meningkat yaitu sebanyak 13 indikator. Kenaikan terbesar terdapat pada indikator Persentase

Jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK meningkat menjadi sebesar 70,00% pada tahun 2020, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 43,00%. Hanya terdapat satu indikator yang realisasinya menurun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yaitu indikator Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4 dengan tingkat realisasi capaian sebesar 95,63% pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 96,11%.

Selanjutnya dilihat capaian tahun 2020 dengan target akhir RPJMD terdapat 5 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir RPJMD yakni Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/MAK dengan persentase realisasi capaian 106,68%; Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB dengan realisasi capaian 116,18%; Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK Dalam Kondisi Baik dengan realisasi capaian 107,42%; Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik dengan realisasi capaian 106,03%; dan Persentase lulusan SMK/MAK yang diterima di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha dengan realisasi capaian 100,16%. Sedangkan indikator yang berstatus akan mencapai target akhir RPJMD sebanyak 8 indikator. Satu indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD yaitu indikator jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK/SLB dengan capaian sebesar 22,72%. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Pendidikan Menengah dan Khusus											
	Angka Rata-rata Lama Sekolah		Tahun	9,83	9,99	10,15	10,31	9,69	9,79	9,81	10,12	10,47	96,65	
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/MAK		%	86,00	87,00	88,00	89,00	87,11	92,12	92,12	96,02	90,00	106,68	
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB		%	68,00	69,00	70,00	71,00	70,12	72	72	82,49	71,00	116,18	
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/MAK		%	75,50	76,00	76,50	77,00	75,87	77,3	77,3	77,2	77,50	99,61	
	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/MAK		%	0,46	0,44	0,42	0,40	0,44	0,42	0,41	0,4	0,38	105,26	
	Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK Dalam Kondisi Baik		%	87,00	87,50	88,00	88,50	85,1	92,1	95,84	95,61	89,00	107,42	
	Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik		%	85,00	86,00	88,00	90,00	70	94	100	95,43	90,00	106,03	
	Jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK		unit	90	50	50	50	112	60	43	70	308	22,72	
	Rasio siswa per ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK		Rasio	1:36	1:36	1:36	01:36	1:35	1:33	1:33	1:28	1:36	91,66	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
2			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
	Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4		%	90,00	93,00	94,00	95,00	90,15	95,99	96,11	95,63	96,00	99,61	
3			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (2018-2021)/ Penggabungan dari 4 Program tahun 2017 yaitu: Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Non Formal.											
	Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B		%	76,00	78,00	80,00	82,00	72,81	74	62,5	73,76	84,00	87,80	
4			Program Peningkatan Mutu Pendidikan											
	Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi		%	30,00	40,00	50,00	55,00	35,42	43	56,3	58,51	60,00	97,51	
	Persentase lulusan SMK/MAK yang diterima di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha		%	30,00	40,00	50,00	55,00	50	50	56,87	60,1	60,00	100,16	
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional(UN) SMA/MA/SMK/MAK		Angka	54,00	54,20	54,40	54,50	53,87	50,59	52,31	"-	54,60	95,81	

2. Kesehatan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan terdiri dari 7 program yang dijabarkan kedalam 25 indikator program yaitu : 1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH; 2) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH; 3) Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita; 4) Cakupan Kabupaten/Kota Sehat; 5) Prevalensi HIV; 6) Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100.000 penduduk; 7) Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate); 8) Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk; 9) API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk; 10) Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap; 11) Prevalensi tekanan darah tinggi; 12) Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi; 13) Persentase Puskesmas terakreditasi; 14) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS; 15) Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS) ; 16) Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS) ; 17) Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang; 18) Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban; 19) Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan; 20) Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang; 21) Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang; 22) Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa; 23) Persentase ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar; 24) Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan; 25) Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik.

Realisasi pencapaian target indikator program urusan Kesehatan sejak tahun 2017-2020 hampir semua indikator menunjukkan capaian realisasi peningkatan atau penurunan menuju ke arah yang lebih baik. Kenaikan terbesar terdapat pada indikator Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa yaitu meningkat menjadi sebesar 142,86% pada tahun 2020, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 93,3%. Hanya terdapat satu indikator yang realisasinya menurun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yaitu Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dengan tingkat realisasi capaian sebesar 85,3% pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 94,0%.

Selanjutnya dilihat capaian tahun 2020 dengan target akhir RPJMD terdapat 22 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir RPJMD. Sedangkan indikator yang berstatus akan mencapai target akhir RPJMD sebanyak 2 indikator, dan 1 indikator memerlukan upaya keras untuk mencapainya, yaitu Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga Kesehatan. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

N o	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Tahun 2020	Realisasi Kinerja				Tahun 2020	Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020				
1			Program Kesehatan Masyarakat											
	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	132 (rata-rata 2015-2016)	131	130	129	131	130	98	92	128	156,13		
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	34	33	32	31	18	15	13	11	30	163,33		
	Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	17,4	17,10	16,80	16,50	16,4	13	11,9	5,6	16,20	165,43		
	Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	%	43	57,00	57,00	70,00	57	71	100	100	70,00	142,857		
2			Program pencegahan dan pengendalian penyakit											
	Prevalensi HIV	%	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,05	<0,5	100,00	
	Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	155 (Rata-rata 2015-2016)	160	165	170	181	177	316	164	175	93,714		

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Tahun 2020	Realisasi Kinerja			Tahun 2020	Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)	%	80	81,00	82,00	170	88	81	87,7	164	84,00	195,238	
	Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	100 (rata-rata 2015-2016)	97	94	83,00	38,2	56	91	90,5	88	102,84	
	API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0,35	0,33	0,31	0,29	0,2	0,14	0,1	0,09	0,27	166,67	
	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	90	91,00	92,00	93,00	94	91	87,9	85,3	94,00	166,67	
	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	28.7 (rata-rata 2015-2016)	28,50	28,30	28,10	27	27,4	28,2	26,28	27,90	105,8	
3			Program pelayanan Kesehatan										
	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi	%	42,80	42,80	57,14	57,14	71,4	100	100	100	71,40	140,056	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	12,00	25,00	38,00	50,00	19,48	79,3	96,5	96,51	70,00	137,871429	
	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	65,00	70,00	72,00	78,00	71,49	82,58	86,1	86,1	85,00	101,294118	
	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS)	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS)	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
4	Program peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan												
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	78,00	78,00	80,00	80,00	78	80,42	80,6	78,24	80,00	97,8	
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban	%	75,00	76,00	77,00	78,00	76,5	80	85,5	81,5	80,00	101,87	
5	Program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan												
	Persentase Puskesmas yang	%	56,00	58,00	60,00	63,00	50	56,32	77	49,43	67,00	73,77	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
	minimal memiliki 5 jenis tenaga Kesehatan												
	Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang	%	58,00	60,00	63,00	51,72	58	73,68	73,7	76,06	70,00	108,65	
	Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	63,00	65,00	67,00	85,71	70,2	84,04	85,7	124,22	70,00	177,45	
	Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa	%	20,00	45,00	65,00	100	26,7	53,33	93,3	142,86	90,00	158,73	
6		Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan											
	Persentase ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar	%	78,00	81,00	82,00	85,00	88,5	93,1	92	93,18	87,00	107,10	
7		Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya											
	Persentase dokumen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100,00	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
	perencanaan dan anggaran yang dihasilkan												
	Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100,00	100,00	

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan 8 program dengan 12 indikator sebagai berikut : 1) Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, 2) Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk; 3) Jumlah titik rawan banjir; 4) Persentase jalan Provinsi berkondisi baik; 5) Persentase jembatan Provinsi berkondisi baik; 6) Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Strategis (panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis); 7) panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi; 8) Persentase Pemenuhan Nilai Layanan Dasar SIPJAKI; 9) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi (tenaga ahli konstruksi); 10) Persentase capaian kontribusi retribusi laboratorium pengujian jasa konstruksi terhadap total retribusi daerah; 11) persentase kab/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya; dan 12) Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda. Perkembangan masing-masing indikator pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Persentase tersediannya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem isigasi pertanian yang sudah ada menunjukkan peningkatan, dari 35,05% tahun 2017 meningkat menjadi 46,5% tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 95,60%) menunjukkan status akan tercapai.
- 2) Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk menunjukkan peningkatan, dari 64,82% tahun 2017 meningkat menjadi 74,96% tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 98,50%) menunjukkan status akan tercapai.
- 3) Jumlah titik rawan banjir menunjukkan kondisi yang cukup baik dimana tahun 2017 terdapat 28 lokasi banjir tahun 2020 menurun menjadi 20 lokasi banjir. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 15 lokasi banjir) menunjukkan status perlu upaya masih ada dari target yang harus dicapai.
- 4) Persentase jalan Provinsi berkondisi baik menunjukkan kondisi yang cukup baik dimana tahun 2017 sebesar 67,3% meningkat tahun 2020 menjadi 74,51%. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 75%) menunjukkan status akan tercapai.
- 5) Persentase jembatan Provinsi berkondisi baik menunjukkan kondisi stagnan tahun 2017-2019 sebesar 80,11%, pada tahun 2020 menjadi 87,35 indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 103,10%) menunjukkan status telah tercapai.
- 6) Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Strategis (panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis) menunjukkan kondisi yang sangat baik dimana tahun 2017 tingkat konektivitas sepanjang 6,97 km meningkat

- menjadi 32,33 km Pada tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 34,45%) menunjukkan status akan tercapai.
- 7) panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi menunjukkan kondisi yang cukup baik dimana terjadi peningkatan dari 25,47 km di tahun 2017 menjadi 62,62 km tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 58,78%) menunjukkan status tercapai.
 - 8) Persentase Pemenuhan Nilai Layanan Dasar SIPJAKI menunjukkan peningkatan tahun 2017 sebesar 30% meningkat menjadi 90% Pada tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
 - 9) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi (tenaga ahli konstruksi) menunjukkan peningkatan dari 60 orang tahun 2017 menjadi 185 orang tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 760%) menunjukkan status perlu upaya keras pencapaiannya karena masih jauh dari target yang ditetapkan.
 - 10) Persentase capaian kontribusi retribusi laboratorium pengujian jasa konstruksi terhadap total retribusi daerah menunjukkan peningkatan dari 1,26% tahun 2017 meningkat menjadi 3,18 tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 0,05%) menunjukkan status tercapai.
 - 11) Persentase kab/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya menunjukkan peningkatan dari 14,28% tahun 2017 menjadi 85,71 % tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status perlu upaya keras pencapaiannya karena masih jauh dari target yang ditetapkan.
 - 12) Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda menunjukkan belum tersedia data.

Perkembangan capaian indikator pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dari 12 indikator yang menjadi ukuran sebanyak 3 indikator tercapai, 6 indikator akan tercapai 3 indikator perlu upaya keras. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status	
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020				
1			Program Pengelolaan Sumber Daya Air											
	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	39,64	42,64	45,64	48,64	35,05	46,5	46,5	46,5	48,64	95,60		
	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	67,50	70,20	73,10	74,10	64,82	70,42	73,13	74,96	76,10	98,50		
	Jumlah titik rawan banjir	Lokasi	28,00	25,00	22,00	18,00	28	25	22	20	15,00	66,67		
2			Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan											
	Persentase jalan Provinsi berondisi baik	%	67,97	69,73	71,49	73,24	67,3	70,31	73,64	74,51	75,00	99,34		
	Persentase jembatan Provinsi berondisi baik	%	79,88	81,24	82,3	83,51	80,11	80,11	80,11	87,35	84,72	103,10		
3			Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan											
	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Strategis (panjang jalan baru yang dibangun yang	km	6,97	16,19	24,99	32,29	6,97	16,2	25,96	32,33	34,45	93,84		

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
	menghubungkan antar wilayah strategis)												
	panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi	km	16,67	18,75	38,47	52,85	25,47	28,67	45,8	62,62	58,78	106,532	
4			Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi										
	Persentase Pemenuhan Nilai Layanan Dasar SIPJAKI	%	30,00	50,00	80,00	90,00	30	80	80	90	100,00	90	
5			Program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi										
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi (tenaga ahli konstruksi)	Orang	60	150	150	200	60	122	223	185	760	69,74	
6			Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi										
	Persentase capaian kontribusi retribusi laboratorium pengujian jasa konstruksi terhadap total retribusi daerah	%	0,60	0,07	0,07	0,06	1,26	1,6	3,18	3,18	0,05	6360	
7			Program pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang										
	persentase kab/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya	%	14,28	28,57	57,14	85,71	14,28	28,57	57,14	85,71	100,00	85,71	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
8			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang										
	Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda	perda	1	1	2	3	0	0	0	0	4	0	

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan 4 program dan 6 indikator sebagai berikut : 1) Luas kawasan kumuh; 2) Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman; 3) Cakupan pelayanan Sanitasi Air Limbah; 4) Cakupan pelayanan Sanitasi Persampahan; 5) Cakupan pelayanan Sanitasi Drainase; dan 6) Persentase fasilitas bangunan publik/fasilitas umum dan lingkungan di KSP/KSN yang terbangun per Tahun. Perkembangan masing-masing indikator pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Luas kawasan kumuh menunjukkan kondisi yang cukup baik yaitu menurun dari 752,62ha menjadi 399,8 ha tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 255,09%) menunjukkan status tercapai.
- 2) Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman menunjukkan peningkatan dari 89,44% tahun 2017 menjadi 92,68% tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
- 3) Cakupan pelayanan Sanitasi Air Limbah menunjukkan peningkatan dari 86,41% tahun 2017 menjadi 83,84% tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
- 4) Cakupan pelayanan Sanitasi Persampahan menunjukkan peningkatan dari 56% tahun 2017 menjadi 59,99% tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 66%) menunjukkan status akan tercapai.
- 5) Cakupan pelayanan Sanitasi Drainase menunjukkan peningkatan dari 32,24% tahun 2017 menjadi 45,10% tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 52,24%) menunjukkan status akan tercapai.
- 6) Persentase fasilitas bangunan publik/fasilitas umum dan lingkungan di KSP/KSN yang terbangun per Tahun menunjukkan peningkatan dari 15% tahun 2017 menjadi 23% tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 25%) menunjukkan status akan tercapai.

Perkembangan capaian indikator pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dari 6 indikator yang menjadi ukuran sebanyak 1 indikator tercapai dan 5 indikator akan tercapai. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.5
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD
sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan										
	Luas kawasan kumuh	ha	752,99	627,69	549,53	379,57	752,62	529,82	476,85	399,8	255,09	156,728	
2			Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum										
	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman	%	89,44	92,19	96,79	97,59	89,44	92,15	92,47	92,68	100,00	92,68	
3			Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi										
	Cakupan pelayanan Sanitasi :												
	Air Limbah	%	85,45	89,09	92,72	96,36	86,41	86,62	87,06	83,84	100,00	83,84	
	Persampahan	%	56,00	59,00	61,00	64,00	56	59,93	59,99	59,99	66,00	90,89	
	Drainase	%	32,24	37,24	42,4	47,24	32,24	36,48	37,26	45,10	52,24	90,89	
4			Program Penataan Bangunan dan Lingkungan										
	Persentase fasilitas bangunan publik/fasilitas umum dan lingkungan di KSP/KSN yang terbangun per Tahun	%	15,00	17,50	20,00	23,00	15	18	20	23,00	25,00	92	

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Urusan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 dalam pelaksanaannya didukung oleh 9 program dengan jumlah indikator yang menjadi target capaian sebanyak 11 indikator. Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian terhadap 11 indikator tersebut, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan sebanyak 5 indikator sudah dalam kategori tercapai, 1 indikator akan tercapai di akhir periode, dan 5 indikator termasuk kategori perlu upaya keras untuk mencapai target diakhir RPJMD. Kondisi capaian berdasarkan masing-masing program dan indikator dapat dilihat melalui uraian berikut.

Kinerja Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM diukur dengan 2 indikator, yaitu Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri. Hasil evaluasi kinerja selama tahun 2017-2020 trennya membaik dengan kondisi menunjukkan penurunan setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2017 sebesar 240 kasus menjadi 0 kasus ditahun 2020, penurunan pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan gubernur telah memenuhi target.

Sementara itu, indikator Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri dalam empat tahun terakhir (2017-2020) menunjukkan kinerja yang meningkat, yaitu dari tahun 2017 sebanyak 16 orang menjadi 22 orang pada tahun 2020. Target akhir RPJMD untuk Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri adalah sebanyak 51 orang, jika dibandingkan dengan kondisi saat ini yang tercapai baru 43,13%. Dengan demikian, indikator Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah proses pencapaiannya masih termasuk pada Kategori Perlu Upaya Keras.

Untuk mendukung kondisi keamanan, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Riau, salah satu indikator yang menjadi ukuran adalah terwujudnya pelaksanaan demo yang aman. Satpol PP dengan dukungan dari berbagai elemen keamanan lainnya seperti kepolisian mampu mewujudkan kondusifitas di wilayah Provinsi Kepri yang terlihat dari kinerja yang setiap tahunnya mengalami perbaikan. Penjagaan terhadap pelaksanaan demo pada tahun 2017 tercapai 92% demo berjalan dengan aman, dan tahun berikutnya di 2018,2019, dan 2020 pelaksanaan demo mampu dikondisikan sangat baik yaitu 100% berjalan aman.

Kinerja peningkatan kamanan dan kenyamanan lingkungan diukur dengan indikator Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan. Perkembangan indikator tersebut selama tahun 2017-2020 setiap tahunnya membaik, yaitu meningkat dari tahun 2017 sebesar 41% menjadi 43% ditahun 2020. Kondisi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 75% ditahun 2020. Capaian kinerja Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD dua tahun ke depan

sebesar 80% masih termasuk pada kategori upaya keras karena tingkat capainnya sampai tiga tahun terakhir baru sebesar 53,75%.

Indikator Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan untuk dapat tercapai 80% ditahun 2021 minimal setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 18,5%. Jika melihat capaian kinerja selama tiga tahun terakhir yang setiap tahunnya hanya 1% maka sulit untuk mencapai indikator tersebut.

Kinerja penanggulangan kebakaran di Provinsi Kepulauan Riau diukur dengan indikator Persentase Kab/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran. Sampai tahun ketiga RPJMD, kinerja indikator masih belum sesuai yang diharapkan. Pada tahun 2017 kabupaten/kota yang memiliki peta rawan kebakaran sebesar 28,57%, tahun 2018 tidak ada kinerja dan tahun 2019 meningkat signifikan menjadi 42,85%. Walaupun trennya meningkat, namun kinerja yang dihasilkan setiap tahunnya masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan kondisi target pada akhir RPJMD sebesar 100%, maka capaian untuk Persentase Kab/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran masih termasuk pada upaya keras. Hal ini dapat dilihat dari target yang harus dicapai dalam 2 tahun terakhir sebesar 57,15%, atau setiap tahunnya sekitar 28,58%.

Upaya pencapaian indikator Persentase Kab/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran sampai pada 100% ditahun 2021 dapat dilakukan dengan catatan prestasi kenaikan ditahun 2020 ditingkatkan lagi kinerjanya, terutama dalam dari sisi koordinasi dengan kabupaten/kota, pengelolaan sumberdaya manusia maupun anggaran.

Dalam rangka meningkatkan penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan agenda melalui program pengembangan wawasan kebangsaan. Agenda pengembangan wasasan kebangsaan kinerjanya diukur dengan persentase konflik sosial tertangani. Selama tiga tahun terakhir (2017-2020), konflik sosial yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau 100% dapat ditangani dengan baik. Dengan demikian, target dalam RPJMD sudah termasuk kategori tercapai.

Peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat kinerjanya diukur dengan 2 indikator, yaitu Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) dan Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan. Secara umum, kedua indikator tersebut mampu tercapai dengan baik dengan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD. Jika melihat perkembangan dari masing-masing indikator, target tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) pada PilwaKo adalah sebesar 65,50%, Pileg sebesar 73,50%, Pilpres sebesar 64,75% dan Pilgub sebesar 61,50%. Dari keempat penyelenggaraan pemilu tersebut, Pileg dan Pilpres tercapai partisipasi sebesar 82,00%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 73,50% untuk Pileg dan

64,75% untuk Pilpres. Sementara itu yang belum memenuhi target adalah PilwaKo dari yang ditargetkan sebesar 65,50%, tercapai sebesar 59%.

Pada indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan sudah jauh melampaui target yang ditetapkan, baik target tahunan maupun target akhir RPJMD. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian ditahun 2019 yang sudah mencapai 158,8%, padahal target akhir RPJMD ada diangka 94,74%.

Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis desa yang termasuk rawan bencana. Indikator yang digunakan yaitu persentase desa/kel tangguh bencana. Dilihat dari perkembangannya, cakupan desa/kelurahan tangguh bencana trennya meningkat (positif), di mana kinerja setiap tahunnya menunjukkan perbaikan, dari 1,2% ditahun 2017 menjadi 0,48% pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target tahunannya setiap tahun melampaui target hanya sampai tahun 2019namun di tahun 2020 mengalami penurunan, termasuk jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,64%.

Penanganan bencana di Provinsi Kepulauan berjalan dengan baik. Kejadian bencana kab/kota dapat tertangani dengan baik yang ditunjukkan dengan kinerja 100% tercapai setiap tahunnya namun pada tahun 2020 capainya senilai 98,0% . Dengan demikian, target akhir RPJMD pun belum tercapai 100% seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun berikutnya adalah meningkatkan kembali capaian kinerja agar menjadi 100%.

Pemulihan pasca bencana di Provinsi Kepulauan Riau diukur dengan indikator jumlah wilayah pasca bencana yang terpulihkan. Selama tiga tahun terakhir (2017-2020) sudah 5 desa yang menjadi sasaran pemulihan pasca bencana, melebihi target yang ditetapkan di mana sampai dengan tahun 2019 adalah 4 desa. Namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 9 desa, sampai tahun ketiga ini kinerjanya baru mencapai 55,56% dan termasuk pada kategori upaya keras. Jumlah wilayah pasca bencana yang terpulihkan kemungkinan bisa mencapai target sesuai RPJMD, dengan catatan minimal setiap tahunnya konsisten dapat memenuhi 2 desa terpulihkan seperti pada kinerja tahun 2018 dan 2019.

Secara terperinci, hasil evaluasi pencapaian kinerja masing-masing indikator pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum selama tahun 2017-2020 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 5.6

Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
A			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN										
1			Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM										
	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	250	230	200	185	240	240	235	0	150	200,00	
	Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri	Orang	18	27	36	45	16	22	23	22	51	43,13	
2			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal										
	Persentase demo yang berjalan aman	%	92,00	93,00	94,00	97,00	92	100	100	100	100	100,00	
3			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan										
	Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam	%	60,00	65,00	70,00	75,00	41	42	43	43	80,00	53,75	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
	Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan												
4			Program Penanggulangan Kebakaran										
	Persentase Kab/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran	%	28,57	57,14	71,43	85,71	28,57	0	42,85	42,85	100,00	42,85	
B			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
1			Program pengembangan wawasan kebangsaan										
(1)	Persentase konflik sosial tertangani	%	100,00	100,00	100,00		100	100	100		100,00	100,00 (2019)	
2			Program pendidikan politik masyarakat										
(1)	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	%	0,00	Pilwako : 65,50	Pileg : 73,50; Pilpres : 64,75		0	59	Pileg : 82,00; Pilpres : 82,00		PilwaKo: 65,50; Pileg: 73,50; Pilpres: 64,75; Pilgub : 61,50	-	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
(2)	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	Ormas	80,00	81,82	82,35		18	163,64	158,8		94,74	158,8 (2019)	
C			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
1			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana										
	Persentase desa/kel tangguh bencana	%	0,72	1,20	1,68	2,64	1,2	2,4	3,61	0,48	2,64	18,18	
2			Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana (2018-2021) / Program Penanggulangan Bencana (2017)										
	Persentase kejadian bencana kab/kota yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	98,00	100,00	98	
3			Program Pemulihan Pasca Bencana (2018-2021) / Program Penanggulangan Bencana (2017)										
	Jumlah wilayah pasca bencana yang terpulihkan	Jumlah	1	1	2	2	1	2	2	1	9	66,67	

6. Sosial

Kinerja urusan sosial pada penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau didukung 6 program dengan 18 indikator sebagai ukuran kinerja. Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian terhadap 18 indikator tersebut, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan sebanyak 9 indikator sudah dalam kategori tercapai, 1 indikator termasuk kategori akan tercapai, dan 8 indikator termasuk kategori perlu upaya keras untuk mencapai target diakhir RPJMD. Kondisi capaian berdasarkan masing-masing program dan indikator dapat dilihat melalui uraian berikut.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada urusan sosial kinerjanya diukur dengan 3 indikator, meliputi a) Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP), b) Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan c) Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya. Dari ketiga indikator tersebut, satu indikator memiliki capaian yang masih rendah, yaitu persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari target tahun 2020 sebesar 1,38% tercapai sebesar 1,05%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, tingkat capaiannya masih berada di angka 1,77%, termasuk pada perlu upaya keras dalam pencapaiannya. Jika melihat perkembangan dalam empat tahun terakhir, persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 sudah dalam posisi on the track, selalu memenuhi target.

Sementara itu, dua indikator lainnya dalam program penanggulangan kemiskinan masih ada dalam posisi akan tercapai dengan melihat kinerja sampai tahun 2020. Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2020 sebesar 0,47%, setara dengan target yang ditetapkan sebesar 0,47% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,47% kinerjanya sudah mencapai 100%. Pada indikator persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya, pada tahun 2017-2018 perkembangan capaian kinerjanya sudah sesuai target, pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 38,09% pada tahun 2020 tercapai sebesar 53,97% kinerjanya naik sesuai bahkan melebihi yang ditargetkan sebesar 41,19%. pada akhir RPJMD akan telah tercapai, melihat target akhir yang ditetapkan sebesar 42,74%, secara keseluruhan capaian indikator tersebut sudah berada diangka 126,275%.

Penyelenggaraan rehabilitasi sosial berdasarkan RPJMD 2016-2021 ditetapkan dengan 6 indikator kinerja. Berdasarkan hasil penilaian terhadap ke 6 indikator tersebut, terdapat 1 indikator dengan kinerja rendah, dan secara umum 5 indikator lainnya memiliki kinerja baik yang dimungkinkan pada akhir RPJMD akan tercapai. Indikator dengan tingkat capaian rendah adalah Persentase korban tindak

kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS). Dilihat dari tren capainnya dari tahun 2017-2020, kinerja setiap tahunnya tidak ada yang memenuhi target. Tahun 2020, target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 0,31% dengan target yang ditetapkan diakhir RPMD sebesar 0,33%, tercapai sebesar ,61%. Artinya dalam empat tahun terakhir jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 184,84% korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS). Lima indikator lainnya walaupun saat ini jika dibandingkan dengan target RPJMD sudah dalam posisi on the track, namun masih perlu perhatian untuk 3 indikator yang capaiannya masih relatif kecil yaitu Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP) persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS) dan Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD masih cukup jauh. Hal ini tidak terlepas dari kinerja tahunan kedua indikator tersebut yang mana rata-rata setiap tahunnya selama periode 2017-2020, untuk indikator Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk indikator memiliki rata-rata target sebesar 0,9% dan rata-rata capaiannya sebesar 0,77% untuk indikator persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS) memiliki rata-rata target sebesar 279,8%, sedangkan rata-rata capainnya sebesar 19,72%. Untuk indikator persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi memiliki rata-rata target sebesar 8,0%, sedangkan rata-rata capaiannya sebesar 1,0%. Dengan demikian ketiga indikator tersebut masih memiliki rata-rata capaian di bawah target.

Program perlindungan dan jaminan sosial ditetapkan dengan 2 indikator, pertama persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan kedua persentase PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial. Pencapaian kedua indikator tersebut tergolong baik yang mana satu indikator sudah memenuhi target, baik dalam kinerja tahunan maupun terhadap target RPJMD. Indikator kedua dalam posisi akan tercapai pada akhir RPJMD yang mana saat ini ada diposisi 63,09%. Walaupun begitu, angka 63,09% perlu perhatian lagi dalam pencapaiannya karena hanya 3 angka di atas 60%. Selain itu melihat perkembangan capaiannya selama tahun 2017-2020, capaian tahun 2018 sebesar 39,37%, tahun 2019 sebesar 37,71% dan tahun 2020 sebesar 38,08% tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 60,35%. Padahal target akhir RPJMD ditahun 2021 angkanya sama sebesar 60,35%.

Program pemberdayaan sosial memiliki 3 indikator, yaitu persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan,

bantuan, dan/atau fasilitasi, persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi dan persentase pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial. Ketiga indikator tersebut memiliki capaian yang baik, di mana satu indikator sudah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan dua indikator diperkirakan akan tercapai pada akhir RPJMD.

Walaupun dua indikator diperkirakan akan tercapai, namun jika dilihat perkembangan capaian tahunannya masih memerlukan perhatian lagi. Pada indikator persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah mencapai 73,79%, namun jika perkembangan kinerja tahunannya, selama tahun 2017-2020 target tahunannya tidak tercapai semua, tahun 2018 memiliki capaian kinerja sebesar 28,43%, sedangkan targetnya adalah sebesar 29,43%. Begitu juga dengan indikator

Upaya peningkatan dan pemerliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial diwujudkan melalui 2 indikator, yaitu jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan dan jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara. Target kedua indikator tersebut selama empat tahun terakhir (2017-2020) tidak banyak perubahan. Penyediaan sarana dan prasarana kesejahteraan melalui pembangunan selama tiga tahun terakhir hanya tercapai 1 unit saja, padahal jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sarana yang dibangun adalah 3 unit. Jika target tersebut tidak menjadi prioritas utama untuk dua tahun ke depan, maka kemungkinan besar indikator tersebut tidak tercapai, termasuk indikator jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara karena unitnya belum tersedia. (Permasalahan)

Indikator yang ditetapkan sebagai ukuran pencapaian kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah persentase pemangku kepentingan yang mendapat penyuluhan sosial, dan persentase kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendapat monitoring dan evaluasi. Kedua indikator tersebut dilihat dari perkembangannya cukup baik, setiap tahun memenuhi target yang ditetapkan, bahkan untuk indikator persentase pemangku kepentingan yang mendapat penyuluhan sosial mampu melebihi target yang ditetapkan. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD kedua indikator tersebut sudah memenuhi target.

Secara terperinci, hasil evaluasi pencapaian kinerja masing-masing indikator pada urusan sosial selama tahun 2017-2020 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 5.7

Capaian Kinerja Urusan Sosial dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
A			Program Penanggulangan Kemiskinan										
1	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	0,61	0,61	1,00	1,38	0,61	0,61	0,81	1,05	1,77	59,32	
2	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	0,00	0,00	0,16	0,31	0	0	0,39	0,47	0,47	100	
3	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	51,53	38,09	39,64	41,19	51,53	38,09	38,09	53,97	42,74	126,27	
B			Program Rehabilitasi Sosial										
1	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,23	0,25	0,28	0,31	0,24	0,27	0,29	0,61	0,33	184,84	
2	Persentase lanjut usia terlanjar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	4,91	5,96	7,94	9,91	4,91	6,03	7,02	8,05	10,89	73,92	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
3	Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	24,39	25,23	26,97	28,72	23,06	23,76	25,86	27,04	29,77	90,82	
4	Persentase tuna sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	1,30	1,54	1,75	1,96	1,3	1,42	1,57	1,69	2,17	77,88	
5	Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	44,69	78,37	78,37	78,37	44,76	9,81	15,88	8,44	78,37	10,76	
6	Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	42,70	49,19	57,30	65,41	38,92	43,78	49,73	51,89	73,51	70,58	
C			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial										
1	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	16,67	25,00	25,00	25,00	19,33	25	25,83	25,00	25,00	100	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
2	Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	30,36	60,35	60,35	60,35	30,36	39,37	37,71	38,08	60,35	63,09	
D			Program Pemberdayaan Sosial										
1	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	20,40	29,43	40,47	51,51	20,4	28,43	42,81	46,15	62,54	73,79	
2	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	8,12	32,49	47,72	62,94	8,12	32,49	49,24	79,70	78,17	101,95	
3	Persentase pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100	
E			Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial										
1	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan	Unit	1,00	1,00	1,00	2,00	1	1	1	5,00	3,00	166,66	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
2	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara	Unit	1,00	1,00	3,00	3,00	1	1	1	1,00	3,00	33,33	
F			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya										
1	Persentase pemangku kepentingan yang mendapat penyuluhan sosial	%	7,22	9,42	9,87	10,32	7,22	9,42	13,91	13,91	10,54	131,95	
2	Persentase kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendapat monitoring dan evaluasi	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50	50	50	50,00	50,00	100	

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Perkembangan realisasi kinerja 11 indikator pada tahun 2017 hingga tahun 2020 yaitu sebanyak 5 indikator membaik yaitu Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kemaritiman dari sebanyak 32 orang pada tahun 2017 menjadi sebanyak 38 orang pada tahun 2020, Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dari sebesar 48,80% meningkat menjadi 64,31%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari sebesar 7,16% menjadi 10,34%, Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari sebesar 70% menjadi 94,8% dan persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan yaitu pada tahun 2017 sebesar 97,4% meningkat menjadi sebesar 100%. Terdapat 4 indikator yang mengalami tren yang fluktuatif yaitu Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2017 sebesar 100% menurun menjadi 48,49% pada tahun 2018 kemudian meningkat menjadi 79,79% pada tahun 2019 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 11,82% , Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2017 sebesar 0% meningkat menjadi 52,30% pada tahun 2018 kemudian menurun menjadi 40,53% pada tahun 2019, Persentase Perusahaan yang menerapkan SMK3 pada tahun 2017 sebesar 1,2% meningkat menjadi 12% pada tahun 2018 kemudian menurun menjadi 2,74% pada tahun 2019 mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 42,86% dan Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani pada tahun 2017 sebesar 62% meningkat menjadi sebesar 100% pada tahun 2017 kemudian menurun menjadi 83,72% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 74,71%. Sedangkan indikator yang mengalami tren perkembangan yang Kurang baik terdapat 2 indikator yaitu persentase lulusan BLK yang diterima kerja dari sebesar 70% menurun menjadi 29,17%, Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dari sebesar 66,41% menurun menjadi sebesar 67,5%.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 terdapat 5 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD; 4 indikator yang akan mencapai target akhir dan 2 indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD, Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD yaitu pada Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kemaritiman. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.8

Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja											
a	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		%	47,75	47,88	48,00	48,13	100	48,49	79,79	11,82	48,25	24,49	
b	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		%	42,74	42,88	43,00	43,13	0	52,3	40,53	42,86	43,25	99,09	
c	Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja		%	85,00	86,00	87,00	88,00	75	86,04	70	29,17	89,00	32,77	
d	Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kemaritiman		orang	16,00	16,00	16,00	16,00	32	20	40	38	80,00	162,5	
2			Program Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja											
a	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan		%	56,00	58,00	60,00	62,00	48,8	60,5	60,69	64,31	64,00	100,48	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Tahun 2020	Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
b	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,30	66,68	67,05	67,43	66,41	64,72	64,76	67,50	67,80	99,55	
c	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,16	7,02	6,88	6,74	7,16	7,12	6,91	10,34	6,60	156,66	
3			Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja.										
a	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	75,00	80,00	85,00	90,00	70	89	88,72	94,8	95,00	99,78	
b	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3	%	1,50	2,00	2,50	3,00	1,2	12	2,74	3,65	3,50	104,28	
c	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	70,00	75,00	80,00	85,00	62	100	83,72	74,71	90,00	83,01	
4			Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja										
a	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	%	24,00	25,00	26,00	27,00	97,4	100	100	100	28,00	357,14	

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Riau didukung 4 program dengan 5 indikator kinerja yang menjadi target selama tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian terhadap 5 indikator tersebut, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan sebanyak 2 indikator sudah dalam kategori tercapai, dan 2 indikator termasuk kategori akan tercapai diakhir RPJMD, dan 1 indikator memerlukan upaya keras untuk mencapai target. Kondisi capaian berdasarkan masing-masing program dan indikator dapat dilihat melalui uraian berikut.

Dalam rangka penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak di Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas penganggaran yang lebih responsif gender. Kondisi ini ditunjukkan dengan indikator yang digunakan adalah Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi. Target ARG dalam RPJMD diakhir RPJMD tahun 2021 adalah sebesar 7%. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi ARG selama tiga tahun terakhir, setiap tahun target ARG dalam APBD dapat tercapai bahkan mampu melampaui target. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing capaian tahunnya, pada tahun 2017 target ARG dalam APBD adalah sebesar 4,90% tercapai sebesar 6,40%, tahun 2018 target ARG dalam APBD sebesar 5,50% tercapai sebesar 9,32%, dan tahun 2019 target ARG dalam APBD sebesar 6% tercapai jauh lebih besar yaitu sebesar 11,24%, dan pada tahun 2020 target ARG dalam APBD sebesar 6,50% tidak tercapai sebesar 5,34. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 7%, maka kondisi saat ini ditahun 2020 capainnya berada di 76,28% jauh melampaui target yang ditetapkan.

Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir, dari 27,7 per 100.000 Perempuan pada tahun 2017 menurun menjadi 33,42 per 100.000 Perempuan ditahun 2020. Kinerja penurunan angka kekerasan dan TPPO menunjukkan perbaikan setiap tahunnya, mampu memenuhi target yang ditetapkan dalam empat tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, pencapaian sampai tahun 2020 saat ini sudah tercapai melebihi target yaitu 117,30 per 100.000 Perempuan. Jika mampu dipertahankan kinerjanya, dipastikan sampai tahun 2021 penurunan angka kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dapat tercapai.

Upaya pemenuhan terhadap hak-hak anak di Provinsi Kepulauan Riau ditargetkan melalui indikator persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, kabupaten/kota dengan status KLA pratama meningkat setiap tahunnya sesuai target yang ditetapkan. Puncaknya pada tahun 2019 kabupaten/kota dengan minimal pratama sudah tercapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan diakhir

RPJMD. Sementara itu, angka kekerasan terhadap anak pun menunjukkan kinerja yang baik, kondisi tersebut dilihat dari rasio kekerasan terhadap anak dengan tren menurun dari tahun 2017 sebesar 3,4 per 10.000 anak menurun menjadi 3,09 per 10.000 anak ditahun 2020. Penurunan angka kekerasan terhadap anak dilihat dari sisi target tahunan setiap tahunnya sudah tercapai, bahkan ditahun 2018 penurunannya lebih rendah lagi sampai 2,56 per 10.000 anak. Terhadap target akhir RPJMD sebesar 3,66 per 10.000 anak dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 3,09 per 10.000 anak sudah terlampaui, pada tahun 2020 sebesar 2,9 per 10.000.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas keluarga, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pengembangan kapasitas kaum perempuan pada keluarga miskin. Target tersebut ditetapkan melalui indikator persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill. Sampai dengan tahun 2019, perempuan dari keluarga miskin yang mendapatkan peningkatan kapasitas sudah mencapai 1,16%, meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 sebesar 0,76%. Upaya peningkatan kapasitas terhadap perempuan dari keluarga miskin jika dilihat berdasarkan target tahunan dalam RPJMD menunjukkan kinerja yang baik dengan kondisi tercapai setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan. Tren capaian yang membaik berdampak pada target pencapaian diakhir RPJMD, di mana pada tahun 2021 perempuan dari keluarga miskin yang mendapatkan peningkatan kapasitas ditargetkan sebesar 1,48%, maka diprediksi akan tercapai.

Secara terperinci, hasil evaluasi pencapaian kinerja masing-masing indikator pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2017-2020 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 5.9

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
A		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak											
1	Persentase Anggaran Rensponsif Gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	%	4,90	5,50	6,00	6,50	6,4	9,32	11,24	5,34	7,00	76,28	
B		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan											
1	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	per 100.000 Perempuan	33,16	32,6	31,49	30,01	27,7	28,08	30,52	33,42	28,49	82,69	
C		Program Perlindungan Anak											
1	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama	%	42,86	42,86	57,14	57,14	57	71,43	100	100	85,71	116,67	
2	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Per 10.000 anak	4,08	3,94	3,80	3,70	3,4	2,56	3,09	2,9	3,66	120,76	
D		Program Kualitas Keluarga											
1	Persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill	%	0,76	1,00	1,16	1,32	0,76	1,13	1,16	1,30	1,48	87,83	

3. Pangan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Pangan terdiri dari 5 program yang dijabarkan kedalam 6 indikator program yang meliputi 1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan; 2) Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen ; 3) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi; 4) Angka Rawan Pangan; 5) Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman dan 6) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya/kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya.

Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2017-2020 terdapat 3 indikator yang mengalami tren perkembangan meningkat yakni indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan yang meningkat setiap tahunnya dari 83,09 skor di tahun 2017 meningkat menjadi 103,99 skor di tahun 2020; indikator Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman mengalami peningkatan dari 76% di tahun 2017 menjadi 94% di tahun 2020; dan indikator Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya/kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya yang memiliki realisasi pada tahun 2017 sebesar 31% menjadi 38,97% di tahun 2020. indikator Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen sebesar 9,2% di tahun 2017 menjadi 11,77% di tahun 2020. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat 88,4 skor di tahun 2017 menurun menjadi 87 skor di tahun 2018 namun selanjutnya meningkat menjadi 89,1 skor di tahun 2019 dan tetap stagnan pada tahun 2020 skor 89,1. Disisi lain Indikator Angka Rawan Pangan mengalami peningkatan dari 10,07% di tahun 2017 menjadi 11,32% di tahun 2019 pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,12%, namun peningkatan pada indikator angka rawan pangan justru menggambarkan capaian yang kurang baik, karena menggambarkan peningkatan wilayah yang rawan pangan.

Selanjutnya dilihat capaian tahun 2020 dengan target akhir RPJMD terdapat 4 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir RPJMD yakni indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan dengan persentase realisasi capaian 111,81%; indikator Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan realisasi capaian 177%; indikator Angka Rawan Pangan dengan realisasi capaian 24,33%; dan indikator Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman dengan realisasi capaian 117,50%. Sedangkan indikator yang berstatus akan mencapai target akhir RPJMD terdiri dari 2 indikator yakni indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi dengan realisasi capaian 99,00% dan indikator Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya/kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya dengan realisasi capaian 97,425%. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan bidang pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.10

Capaian Kinerja Urusan Pangan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan										
a	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	89,00	90,00	91,00	92,00	83,09	82,29	99,19	103,99	93,00	111,817204	
b	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	9,2	9,2	9,26	11,7	CV < 10	83,00	
2			Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan										
a	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	skor	86,00	87,00	88,00	89,00	88,4	87	89,1	89,1	90,00	99,00	
3			Program Penanganan Kerawanan Pangan										
a	Angka Rawan Pangan	%	17,45	17,32	17,19	17,06	10,07	10,07	11,32	4,12	16,93	133,14	
4			Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan										
a	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	80,00	80,00	80,00	80,00	76	82,61	94	94	80,00	117,5	
5			Program Pengembangan SDM dan Penyuluh pertanian										
a	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya/kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	32,73	34,55	36,36	38,18	31	34,55	37,28	38,97	40,00	97,42	

4. Pertanahan

Urusan Bidang Pertanahan memiliki 1 program yakni Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan 1 indikator yaitu indikator Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi. Dilihat dari perkembangan tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan dari 100% di tahun 2017 menjadi sebesar 0% di tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan Kembali sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD indikator Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi sudah kembali mencapai target akhir RPJMD. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.11

Capaian Kinerja Urusan Pertanahan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah											
	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	0	100,00	100,00	100,00	

5. Lingkungan Hidup

Pencapaian urusan lingkungan hidup didukung dengan 3 program dengan jumlah indikator yang menjadi target pencapaian sebanyak 9 indikator. Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian terhadap 9 indikator tersebut, sebanyak 3 indikator telah mencapai targetnya, 2 indikator berstatus akan tercapai targetnya, 4 indikator memerlukan upaya keras untuk mencapai target di akhir RPJMD. Kondisi capaian berdasarkan masing-masing program dan indikator dapat dilihat melalui uraian berikut.

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan RPJMD 2017-2021 ditetapkan dengan 6 indikator, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu, persentase kab/kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu, persentase pelaku usaha / industri yang memiliki pengelolaan limbah b3 sesuai standar, persentase kab/kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai baku mutu, dan persentase kabupaten/kota yang memenuhi standar nominasi adipura.

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2017-2020. Tahun 2018, kondisi IKLH mencapai sebesar 70,34 meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 70,19. Pada tahun 2019, tercatat sebesar 66,50 menunjukkan penurunan sebesar 3,84 point pada tahun 2020 sebesar 67. Jika dibandingkan dengan target tahunannya, kondisi tahun 2017 dan 2018 capaian IKLH Provinsi Kepulauan Riau sudah mencapai target bahkan melampaui, sedangkan capaian tahun 2019 dan 2020 tidak memenuhi target. Pencapaian IKLH pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 69,80, maka posisi pencapaian indikator IKLH saat ini berada diangka 95,89% termasuk kategori diprediksi akan tercapai pada akhir RPJMD.

Ketersediaan air waduk berdasarkan kualitas mutu bakunya ditunjukkan dengan indikator persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu. Kondisi waduk dengan kualitas air sesuai mutu baku di Provinsi Kepulauan Riau perkembangannya cukup memuaskan. Dari tahun 2017 sebesar 80%, mencapai kondisi terbaik pada tahun 2019 menjadi 100%. Kondisi tersebut sesuai dengan harapan yang ditargetkan dalam lima tahun ke depan sejak RPJMD ditetapkan, bahwa 100% kondisi waduk di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kualitas air sesuai mutu baku. Sementara untuk kualitas air dengan sesuai mutu baku sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 43,85%. Target selama tahun 2017-2018 berhasil dipenuhi dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang ditetapkan 100%, maka saat ini pencapaiannya berada pada posisi 42,85% masuk pada kategori maka perlu upaya keras agar tercapai pada akhir RPJMD nanti.

Pengawasan terhadap pelaku usaha/industri dalam bentuk pengelolaan limbah sesuai standar ditetapkan dengan indikator persentase pelaku usaha / industri yang

memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar. Dalam tiga tahun terakhir, perkembangan capaian pelaku usaha / industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar yang ditargetkan setiap tahunnya sebesar 18,50%, secara umum pencapaiannya masih sesuai dengan target, 2020 tidak sesuai target dengan capaian sebesar 20,00% dan nilai kekurangannya relatif kecil. Pencapaian terhadap target akhir RPJMD saat ini berada di angka 20,00%, termasuk pada kategori akan tercapai, dengan syarat konsisten kinerjanya seperti tiga tahun sebelumnya, maka target di tahun 2020 sebesar 18,50% dan tahun 2021 sebesar 19,70% akan tercapai.

Dari sisi kualitas udara, target dalam RPJMD 2017-2021 ditetapkan melalui indikator persentase kab/kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai baku mutu. Perkembangan kabupaten/kota dengan kualitas mutu udara ambien sesuai baku mutu jika dilihat dari tahun 2017 sebesar 78,6% meningkat menjadi 100% pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang harus tercapai 100%, maka posisi saat ini (2020) berada di angka 100% pada proses pencapaian dan termasuk pada kategori telah tercapai.

Sebagai upaya meningkatkan kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan semua kabupaten/kota memenuhi standar nominasi Adipura. Perkembangan kabupaten/kota yang memenuhi standar adipura di Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 100% dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 sebesar 85,71%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang diharapkan pada tahun 2021 terpenuhi 100%, kondisi sampai tahun 2020 ini berada pada kategori telah tercapai.

Dalam rangka mendukung terciptanya pengetahuan serta kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong program pengelolaan lingkungan di sekolah untuk menerapkan pola berbudaya green school. Sebagai tolok ukur, pemerintah menetapkan indikator jumlah Sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional. Sampai dengan tahun 2019, jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata total sebanyak 115 sekolah. Jumlah tersebut dicapai dari tahun 2017 sebanyak 25 sekolah, tahun 2018 sebanyak 51 sekolah dan tahun 2019 sebanyak 39 sekolah 2020 sebanyak 0 sekolah. Setiap tahun, target sekolah mendapatkan penghargaan Adiwiyata sudah sesuai target, bahkan melampaui. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 154 sekolah, saat ini pencapaiannya berada di angka 0% dan termasuk kategori jauh dari target tercapai.

Dalam rangka mendukung konservasi sumberdaya alam, terutama di wilayah pantai, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki target melakukan rehabilitasi terhadap kawasan mangrove. Luasan hutan mangrove yang sudah direhabilitasi selama tahun 2017-2020 adalah seluas 11 Ha, dan jika ditambah dengan luasan sebelumnya yang sudah direhabilitasi sebanyak 6 Ha, maka saat ini total luasan mangrove yang sudah direhabilitasi mencapai 17 Ha. Rehabilitasi kawasan hutan

mangrove secara target setiap tahunnya terpenuhi dengan baik, dan saat ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD seluas 28 Ha, maka diprediksikan kinerja meningkatkan luasan kawasan mangrove yang direhabilitasi akan tercapai.

Data merupakan sumber utama untuk melakukan analisis dan dasar dalam pengambilan kebijakan. Untuk mendukung kebutuhan data pada urusan lingkungan hidup, setiap tahun melakukan dokumentasi atau perekaman terhadap data yang dihasilkan oleh masing-masing unit pemangku kepentingan. Melalui pendataan yang baik, maka saat ini ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah berkaitan dengan informasi lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan sudah tersedia,

Secara terperinci, hasil evaluasi pencapaian kinerja masing-masing indikator pada urusan Lingkungan Hidup selama tahun 2017-2020 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 5.12

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Tahun 2020	Realisasi Kinerja			Tahun 2020	Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
A			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidu										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,70	68,10	68,90	69,20	70,19	70,34	66,5	67,00	69,80	95,98	
2	Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	%	72,73	72,73	81,82	90,91	80	66,67	100	40,00	100,00	40	
3	Persentase kab/kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu	%	57,14	57,14	71,43	85,71	57,14	57,14	71,43	42,85	100,00	42,85	
4	Persentase pelaku usaha / industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar	%	20,60	20,60	20,60	18,50	20,6	20,6	20,3	20	100,00	20	
5	Persentase Kab/kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai baku mutu	%	57,14	71,43	85,71	100,00	78,6	95,47	85,71	100	100,00	100	
6	Persentase kabupaten/kota yang memenuhi standar nominasi Adipura	%	71,43	85,71	85,71	100,00	71,43	71,43	85,71	0	100,00	85,71 (2019)	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja					Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020				
B			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam											
1	Jumlah Sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional	Sekolah	23	26	30	35	25	51	39	0	154	74,67 (2019)		
2	Luas kawasan mangrove yang terehabilitasi	Ha	2	3	4	6	2	5	4	50	28	178,57		
3			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup											
1	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	100,00	100,00	100,00		100	100	100		100,00	100		

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan catatn sipil terdiri dari1 program yang dijabarkan kedalam2 indikator program yang meliputi indikator Rasio penduduk ber-KTP dan indikator Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran. Dilihat dari perkembangannya sejak tahun 2017 hingga 2020 kedua indikator tersebut mengalami tren perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Indikator Rasio penduduk ber KTP memiliki capaian sebesar 90,7% di tahun 2017 naik menjadi 99,96% di tahun 2020. Selanjutnya indikator rasio nak (0-18 tahun) berakte kelahiran memiliki realisasi 83,19% di tahun 2017 meningkat menjadi 96,61% di tahun 2020.

Selain itu dilihat dari realisasi tersebut kedua indikator tersebut telah mencapai target akhir RPJMD, di mana indikator Rasio penduduk ber-KTP telah mencapai target akhir sebesar 98% dengan persentase realisasi sebesar 102%. Sedangkan indikator Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran telah melampaui target sebesar 82% dengan persentase realisasi sebesar 117,81%. Secara lebih rinci perkembangan indikator urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.13

Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Penataan Administrasi Kependudukan											
	Rasio penduduk ber-KTP		%	90,00	92,00	95,00	98,00	90,7	95,02	98,05	99,96	98,00	102	
	Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran		%	76,00	77,00	79,00	80,00	83,19	86,63	88,91	96,61	82,00	117,81	

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terdiri dari 4 program dan 4 indikator kinerja program yang meliputi indikator 1) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif; 2) Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif; 3) Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat; dan 4) Jumlah Desa Cepat Berkembang. Dilihat dari realisasi tahun 2017 hingga 2020 terdapat 3 indikator yang mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif meningkat dari 40% di tahun 2017 menjadi 64,48% di tahun 2019 namun pada tahun 2020 turun menjadi 53,45%. Indikator Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif juga mengalami peningkatan dari 35 unit BUMDesa yang aktif di tahun 2017 menjadi 108 unit BUMDesa yang aktif di tahun 2019. Indikator Jumlah Desa Cepat Berkembang naik dari 15 desa di tahun 2017 menjadi 30 desa di tahun 2019 menjadi 42 desa di tahun 2020. Sedangkan indikator Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat mengalami perkembangan fluktuatif cenderung stagnan dari 16,67 % di tahun 2017 naik menjadi 33,33% di tahun 2018 kemudian turun menjadi 16,67% di tahun 2019 stagnan di tahun 2020 16%.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 2 indikator berstatus telah mencapai target, 1 indikator diperkirakan mampu mencapai target, dan 1 indikator lainnya berstatus memerlukan upaya keras untuk mencapai target. Indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD.

Tabel 5.14

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja					Target Akhir RPJMD	Realisasi 2017 s/d 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan										
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif	%	40,22	44,23	48,64	53,45	40	46,63	64,48	53,45	58,65	91,13	
2			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan										
	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Unit BUMDesa	35,00	40,00	45,00	125	35	80	108	184	55,00	334,54	
3			Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna										
	Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	50,01	
4			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (2017)										
	Jumlah Desa Cepat Berkembang	Desa	15	22	30	42	15	28	30	57	56	101,78	

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari 1 program dan 2 indikator kinerja program yang meliputi indikator Pembentukan Kampung KB dan indikator Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR). Dilihat dari capainnya sejak tahun 2017 hingga 2019 indikator pembentukan kampung KB meningkat dari 0 di tahun 2017 menjadi 1 kampung di tahun 2018, 2019, dan 2020. Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR) juga mengalami peningkatan dari 46,73% menjadi 78,6% di tahun 2019 dan pada tahun 2020 naik menjadi 83,1%.

Selanjutnya jika dilihat dari target akhir RPJMD indikator Pembentukan Kampung KB dengan realisasi 1 kampung di tahun 2018, 1 kampung di tahun 2019 dan 1 Kampung di tahun 2020 masih belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 4 kampung, sehingga realisasinya hanya 25%. Indikator Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR) berstatus telah mencapai target akhir RPJMD dengan persentase realisasi 163,80%. Secara lebih rinci perkembangan indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.15
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD
sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Keluarga berencana											
	Pembentukan Kampung KB		Angka	NA	1	1	1	NA	1	1	1	4	75,00	
	Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR)		%	46,73	47,73	48,73	49,73	46,73	79,81	78,6	83,1	50,73	163,80	

9. Perhubungan

Urusan perhubungan di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan 7 program dan 15 indikator sebagai berikut : 1) Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro); 2) Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro); 3) Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyebrangan perintis; 4) Persentase pelabuhan penyebrangan terkelola dengan baik; 5) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 6) Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas; 7) Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis; 8) Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis; 9) Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara; 10) Persentase ketersediaan Bandar Udara; 11) Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut; 12) Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut; 13) Persentase ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis; 14) Persentase pelabuhan laut terkelola dengan baik; dan 15) Persentase peningkatan retribusi pendapatan dari urusan perhubungan. Perkembangan masing-masing indikator pada urusan perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro) menunjukkan kondisi stagnan sebesar 71,43% tahun 2017 - 2020. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100 %) menunjukkan status akan tercapai.
- 2) Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro) menunjukkan peningkatan dari 77,78% tahun 2017 menjadi 133,33% tahun 2020. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
- 3) Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyebrangan perintis menunjukkan peningkatan dari 53,85% tahun 2017 menjadi 76,92% tahun 2019. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
- 4) Persentase pelabuhan penyebrangan terkelola dengan baik menunjukkan peningkatan dari 72,73% tahun 2017 menjadi 100% tahun 2020. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status telah tercapai.
- 5) Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan peningkatan dari 67,27% tahun 2017 menjadi 96,16% tahun 2020. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
- 6) Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas menunjukkan peningkatan dari 7,67% tahun 2017 menjadi 9,67% tahun 2020. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 46,05%) menunjukkan status perlu upaya keras karena masih jauh dari target yang ditetapkan.

- 7) Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis menunjukkan peningkatan dari 42,86% tahun 2017 menjadi 85,71% tahun 2020. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
- 8) Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis menunjukkan peningkatan dari 75% tahun 2017 menjadi 120% tahun 2020. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 120 %) menunjukkan status tercapai.
- 9) Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara pada tahun 2020 baru muncul data menunjukkan angka 75. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100 %) menunjukkan status akan tercapai.
- 10) Persentase ketersediaan Bandar Udara menunjukkan peningkatan dari 77,78 tahun 2017 menjadi 100 tahun 2020. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100 %) menunjukkan status telah tercapai.
- 11) Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut menunjukkan peningkatan dari 58,82% menjadi 97,06% tahun 2020. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
- 12) Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut menunjukkan kondisi stagnan sebesar 55,56 dari tahun 2017-2019 namun mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 77,78. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
- 13) Persentase ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis menunjukkan kondisi stagnan sebesar 55,56 dari tahun 2017-2019 namun mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 113,33. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status tercapai.
- 14) Persentase pelabuhan laut dikelola dengan baik menunjukkan peningkatan dari 75 % tahun 2017 menjadi 100% tahun 2020. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 100%) menunjukkan status akan tercapai.
- 15) Persentase peningkatan retribusi pendapatan dari urusan perhubungan menunjukkan peningkatan dari 0% tahun 2017 menjadi 246% tahun 2020. Jika indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 40%) menunjukkan status tercapai.

Perkembangan capaian indikator pada urusan perhubungan, dari 15 indikator yang menjadi ukuran sebanyak 8 indikator tercapai, 3 indikator akan tercapai, dan 4 indikator perlu upaya keras. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.16

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Realisasi Kinerja					Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat										
	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	%	71,43	71,43	85,71	92,86	71,43	71,43	71,43	71,43	100,00	71,43	
	Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	%	77,78	77,78	88,89	100,00	77,78	77,78	88,89	133,33	100,00	133,33	
	Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyebrangan perintis	%	53,85	76,92	76,92	92,31	53,85	53,85	76,92	107,6	100,00	107,6	
	Persentase pelabuhan penyebrangan terkelola dengan baik	%	72,73	81,82	90,91	100,00	72,73	72,73	90,91	100,00	100,00	100	
2			Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas										
	Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	67,20	74,86	83,27	92,19	67,27	70,88	75,5	96,16	100,00	96,16	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
3			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										
	Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas	%	7,67	10,17	14,33	18,50	7,67	9,67	9,67	9,67	21,00	46,04	
	Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis	%	42,86	57,14	71,43	85,71	42,86	71,43	71,43	85,71	100,00	85,71	
4			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara										
	Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis	%	75,00	83,33	91,67	100,00	75	91,67	91,67	120	100,00	120	
	Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara	%	NA	25,00	50,00	75,00	NA	0	0	75	100,00	75	
	Persentase ketersediaan Bandar Udara	%	66,67	77,78	88,89	100,00	77,78	88,89	88,89	100	100,00	100	
5			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut										
	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	64,71	73,53	82,35	91,18	58,82	73,53	82,35	97,06	100,00	97,06	
6			Program Pembangunan Transportasi Laut										
	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	%	55,56	66,67	77,78	88,89	55,56	55,56	55,56	77,78	100,00	77,78	
	Persentase ketersediaan jaringan	%	55,56	66,67	77,78	88,89	55,56	55,56	55,56	133,33	100,00	133,33	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
	Trayek angkutan laut perintis												
	Persentase pelabuhan laut terkelola dengan baik	%	83,33	83,33	91,67	100,00	75	83,33	91,67	100,00	100,00	100	
7		Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah											
	Persentase peningkatan retribusi pendapatan dari urusan perhubungan	%	350 Juta	10,00	20,00	30,00	0	216	143,8	246	40,00	615	

10. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan 2 program dan 3 indikator sebagai berikut : 1) Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri; 2) Nilai e-government Provinsi Kepri; dan 3) Persentase Domain dan Sub Domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri yang Telah Dimanfaatkan. Perkembangan masing-masing indikator pada urusan komunikasi dan informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri menunjukkan peningkatan dari skala 13,03 tahun 2017 menjadi 74,18 tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD (sebesar 67,50%) menunjukkan status tercapai.
- 2) Nilai e-government Provinsi Kepri menunjukkan peningkatan dari skala 2,1 tahun 2017 menjadi 2,8 tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan status tercapai.
- 3) Persentase Domain dan Sub Domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri yang Telah Dimanfaatkan menunjukkan peningkatan dari 25% tahun 2017 menjadi 76,85% tahun 2020. Jika indikator tersebut diperbandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan status tercapai.

Perkembangan capaian indikator pada urusan komunikasi dan informatika, dari 3 indikator yang menjadi ukuran, semuanya telah mampu mencapai target akhir RPJMD. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.17

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi Informatika dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program peningkatan akses dan kualitas informasi public											
	Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri		Skala nilai 0-100	62,00	63,50	65,00	65,00	13,03	53,87	43,24	74,18	67,50	109,89	
2			Program e-government											
	Nilai e-government Provinsi Kepri		Skala nilai 1-4	2,10	2,20	2,30	2,40	2,1	2,1	2,4	2,8	2,50	112,00	
	Persentase Domain dan Sub Domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri yang Telah Dimanfaatkan		%	25,00	35,00	45,00	55,00	25	25	68,08	76,85	60,00	128,08	

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan melalui 3 program pembangunan yang diukur dengan sejumlah 5 indikator program yaitu: (1) Persentase Koperasi Aktif; (2) Persentase KSP/USP sehat; (3) Pertumbuhan koperasi; (4) Jumlah UKM yang naik kelas/ aktif; dan (5) Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi.

Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2017-2020, terdapat 3 indikator program yang Jumlah UKM yang naik kelas/ aktif meningkat dari sebesar 0,33% menjadi 0,61%; dan Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi meningkat dari sebesar 19,8% menjadi 21,22% yaitu Persentase Koperasi Aktif dari sebesar 51,8% menjadi 58,8%;. Sementara itu indikator yang capaiannya cenderung menurun yaitu pertumbuhan koperasi dari sebesar 3,3% menjadi 2,5%.

Dibandingkan target akhir RPJMD, dari sejumlah 5 indikator program urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebanyak 4 indikator program berstatus akan tercapai karena memiliki persentase capaian target antara 80 hingga <100%. Dan 1 indikator memerlukan upaya keras untuk mencapainya.

Secara rinci hasil evaluasi capaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.18

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi										
	Persentase Koperasi Aktif	%	51,20	53,30	55,80	39,93	51,8	54,95	39,93	58,80	62,10	94,68	
	Persentase KSP/USP sehat	%	15,30	23,00	30,60	38,19	8,4	36,11	38,19	38,30	45,90	83,44	
	Pertumbuhan koperasi	%	1,00	1,50	2,00	2.72	3,3	5,1	2,72	2,50	10,00	25	
2			Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan										
	Jumlah UKM yang naik kelas/ aktif	%	0,27	0,34	0,48	0,55	0,33	0,41	0,55	0,61	0,75	81,33	
3			Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi										
	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	%	18,5	19,2	20,19	19,85	19,8	19,3	19,85	21,22	22,25	95,37	

12. Penanaman Modal Daerah

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar di bidang penanaman modal terdiri dari 3 program yang dijabarkan ke dalam 6 indikator program yang meliputi : 1) Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA); 2) Jumlah Nilai Realisasi Invesasi (PMDN); 3) Jumlah Investor Dalam Negeri; 4) Jumlah Investor Luar Negeri; 5) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP); dan 6) Persentase Pelayanan Sesuai SOP.

Dilihat dari capaian realisasi dari tahun 2017-2020 kinerja urusan penanaman modal terdapat 2 indikator dengan trend meningkat setiap tahunnya yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN) pada tahun 2017 sebesar Rp1.398 M meningkat menjadiRp 14,2490M pada tahun 2020, dan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP) sebesar 76,61 pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 81,92 pada tahun 2020. Indikator yang mengalami fluktuatif cenderung meningkat ada 3 indikator yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA) pada tahun 2017 mempunyai realisasi capaian sebesar Rp 13.823 M selanjutnya menurun di tahun 2018 sebesar Rp 11.138 M, pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp 20.450 M dan Pada Tahun 2020 sebesar 23.751 M , indikator Jumlah Investor Dalam Negeri realisasi pada tahun 2017 sebesar 291 investor kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi 173 investor dan kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 4.365 investor, indicator Jumlah Investor Luar Negeri realisasi pada tahun 2017 sebesar 203 investor pada tahun 2018 menurun menjadi 120 investor selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 493 investor dan selanjutnya pada Tahun 2020 Meningkat Kembali menjadi 660 . Satu indikator lagi yang di targetkan dalam RPJM mengalami capaian per tahun menurun yaitu Persentase Pelayanan Sesuai SOP, pada tahun 2017 dan 2018 realisasi capainnya sebesar 100% namun pada tahun 2019 menurun menjadi 92,88% pada tahun 2020 sedikit naik menjadi 95,21%.

Selanjutnya dilihat dari capaian tahun 2020 dengan target akhir RPJMD dapai dilihat dari 6 indikator yang di targetkan pada RPJM terdapat 5 indikator telah tercapai, dan 1 indikator masih perlu upaya keras. Indikator yang masih perlu upaya keras yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA). Capaian kinerja urusan penanaman modal Provinsi Kepri Tahun 2017 -2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.19

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi											
	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)		Rp Milyar	7.300	7.500	7.700	7.900	13.823	11.138	20.450	23.751	38.500	143,74	
	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)		Rp Milyar	500	600	700	800	1.398	4.385	5.656	14.249	3.500	694,00	
2			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi											
	Jumlah Investor Dalam Negeri		Investor	135	140	145	150	291	173	4.365	5.054	725	697,103	
	Jumlah Investor Luar Negeri		Investor	100	102	104	106	203	120	493	660	520	126,923	
3			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan											
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)		nilai	81,00	84,00	86,00	88,00	76,61	77,2	82,34	81,93	90,00	91,03	
	Persentase Pelayanan Sesuai SOP		%	80,00	81,00	82,00	83,00	100	100	92,88	95,21	84,00	113,345	

13. Pemuda dan Olahraga

Urusan Pemuda dan Olahraga terdiri dari 5 program dan 6 indikator, adapun perkembangan realisasi kinerja 6 indikator pada tahun 2017 hingga tahun 2020 yaitu sebanyak 3 indikator yang mengalami tren perkembangan menurun yaitu indikator jumlah pemuda yang berwirausaha dari sebanyak 22 orang pada tahun 2017 meningkat menjadi 0 orang pada tahun 2020, indikator jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/internasional dari sebesar 21 penghargaan pada tahun 2017 meningkat menjadi 13 penghargaan pada tahun 2020, dan indikator jumlah kader pemuda anti narkoba dari sebanyak 34 orang pada tahun 2017 meningkat menjadi 0 orang pada tahun 2020 dan prasarana yang dibangun terhadap kebutuhan masyarakat dari sebanyak 76% pada tahun 2017 meningkat menjadi 119,05% pada tahun 2020. Kemudian ada 2 indikator yang mengalami tren meningkat yaitu indikator persentase sarana, jumlah pemuda pelopor dari sebanyak 2.287 orang pada tahun 2017 menurun menjadi 260 orang pada tahun 2020 dan pada posisi stagnan ada 1 indikator yaitu jumlah event olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan masyarakat dari sebanyak 16 event pada tahun 2017 menurun menjadi 16 event pada tahun 2020.

Selanjutnya dilihat capaian tahun 2020 dengan target akhir RPJMD terdapat 5 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir RPJMD. Sedangkan indikator yang berstatus jauh dari target akhir RPJMD terdiri dari 1 indikator yakni indikator jumlah pemuda yang berwirausaha. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan bidang pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.20

Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan											
	Jumlah pemuda pelopor		Orang	700	25	800	850	2.287	557	988	260	3.275	124,95	
2			Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda											
	Jumlah pemuda yang berwirausaha		Orang	20	25	30	35	22	25	60	0	150	71,33	
3			Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga											
	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/internasional		Penghargaan	15	5	17	18	21	17	35	13	74	116,21	
	Jumlah event olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan masyarakat		Event	10	0	14	16	16	17	14	16	58	108,63	
4			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga											
	Persentase sarana dan prasarana yang dibangun terhadap kebutuhan masyarakat		%	28,57	33,33	61,90	80,95	76	90,48	104,76	319,05	100	319,05	
5			Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba											
	Jumlah kader pemuda anti narkoba		Orang	50	55	60	65	34	55	60	300	300	149,67	

14. Statistik

Urusan bidang statistik memiliki 1 program yakni program pengembangan data/informasi statistik sektoral dengan 1 indikator yakni indikator Persentase ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepri. Dilihat dari perkembangan dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan dari tidak ada data di tahun 2017 menjadi 25% di tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi 99,67% di tahun 2019 namun pada tahun 2020 telah mengalami penurunan menjadi 30%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD indikator bidang statistik tersebut berstatus akan mencapai target akhir RPJMD dengan realisasi capaian sebesar 85,714%. Secara lebih rinci capaian urusan bidang statistik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.21

Capaian Kinerja Urusan Statistik dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral											
a	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepri		%	0	20,00	25,00	30,00	NA	25	99,67	38,09	35,00	108,82	

15. Persandian

Urusan Persandian terdiri dari 1 program dan 1 indikator, perkembangan realisasi kinerja indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi pada tahun 2017 hingga tahun 2020 yaitu mengalami tren perkembangan meningkat dari sebanyak 2,5% pada tahun 2017 meningkat menjadi 100% pada tahun 2020.

Selanjutnya dilihat capaian tahun 2020 dengan target akhir RPJMD terdapat indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi berstatus telah mencapai target akhir RPJMD. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan bidang pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.22

Capaian Kinerja Urusan Persndian dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Persandian untuk Pengamanan Informasi											
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi		%	10	20,00	30,00	40,00	2,5	20	100	100	50,00	200,00	

16. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan terdiri dari 3 program dan 5 indikator, adapun perkembangan realisasi kinerja 5 indikator pada tahun 2017 hingga tahun 2020 yaitu sebanyak 5 indikator mengalami tren perkembangan meningkat yaitu indikator persentase bangunan yang berciri khas melayu dari sebanyak 8,28% pada tahun 2017 meningkat menjadi 26,16% pada tahun 2020, indikator persentase nilai adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi dari sebesar 10,2% pada tahun 2017 meningkat menjadi 55,85%, indikator persentase warisan budaya tangible yang lestari dari sebanyak 19,58% pada tahun 2017 meningkat menjadi 22,73% pada tahun 2020, indikator persentase organisasi budaya berkategori maju dari sebanyak 14,49% pada tahun 2017 meningkat menjadi 98,55% pada tahun 2020 dan indikator persentase sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi local dari sebanyak 6,49% pada tahun 2017 meningkat menjadi 79,61% pada tahun 2020.

Selanjutnya dilihat capaian tahun 2020 dengan target akhir RPJMD terdapat 3 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir RPJMD yakni yakni indikator persentase warisan budaya tangible yang lestari dengan realisasi capaian 101,635%, Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju dengan realisasi capaian 136,00, dan indikator persentase sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi local dengan realisasi capaian 91,66%. Kemudian masih ada 2 indikator yang berstatus masih jauh dari target akhir RPJMD yaitu persentase bangunan yang berciri khas melayu dengan realisasi capaian 36,97% dan indikator persentase nilai adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi dengan realisasi capaian 77,66%. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan bidang pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.23

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Pengembangan Nilai Budaya											
	Persentase bangunan yang berciri khas melayu		%	6,02	16,54	32,33	49,70	8,28	13,44	14,32	26,16	70,75	36,97	
	Presentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi		%	8,87	16,48	32,78	49,08	10,2	19,98	40,46	55,85	71,91	77,66	
2			Program pengelolaan kekayaan budaya											
	Persentase warisan budaya tangible yang lestari		%	19,58	20,28	20,98	21,68	19,58	19,93	22,03	22,73	22,38	101,56	
3			Program pengelolaan keragaman budaya											
	Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju		%	14,49	28,99	43,48	57,97	14,49	37,68	94,2	98,55	72,46	136,00	
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal		%	6,49	21,06	35,62	52,61	6,49	13,29	66,02	79,61	72,03	110,52	

17. Perpustakaan

Urusan perpustakaan memiliki 2 program utama yang dijabarkan kedalam 3 indikator yakni 1) indikator Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan; 2) indikator Persentase Peningkatan Bahan Pustaka; dan 3) indikator IKM Pelayanan Perpustakaan. Dari ketiga indikator dilihat dari tren capaiannya ada 2 indikator telah memiliki trend capaian yang terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2017-2019 namun ada 1 indikator dilihat dari tren capaian minus. Indikator Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan memiliki capaian 27,65 % pengunjung di tahun 2017 meningkat menjadi 65,26% di tahun 2020, namun jika dibandingkan dengan target akhir capaian pada tahun 2020 belum mampu mencapai target akhir RPJMD sebesar 32,91% . hal yang sama juga terjadi pada indikator persentase peningkatan bahan pustaka yang pada tahun 2017 memiliki realisasi sebesar 41,32% di tahun 2017 menjadi 55,4% di tahun 2020, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga belum mencapai target akhir RPJMD persentase realisasinya hanya sebesar 77,55%.

Indikator IKM pelayanan perpustakaan juga memiliki realisasi capaian sebesar 81,94% di tahun 2017 meningkat menjadi 88,17% di tahun 2020, namun juga belum mampu mencapai target akhir RPJMD dengan persentase realisasi sebesar 97,96%. Secara lebih rinci capaian indikator urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.24

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan											
a	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan		Pengunjung (%)	21,84	25,00	26,58	29,75	27,65	28	28,64	-65,26	32,91	-198,29	
b	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka		Judul (%)	35,66	44,60	53,55	54,58	41,32	45,88	52,96	55,40	71,43	77,55	
2			Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perpustakaan											
a	IKM Pelayanan Perpustakaan		Poin	82	84	86	87	81,94	84,35	84,6	88,17	90	97,96	

18. Kearsipan

Urusan kearsipan memiliki 2 program dan 2 indikator yakni indikator Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan dan indikator Persentase perangkat daerah provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku. Indikator Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan dilihat dari capaiannya selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 0,72% menjadi 2,14% di tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,62% capaian indikator tersebut berstatus akan mampu mencapai target akhir karena persentase realisasinya sebesar 81,67%.

Hal yang serupa terjadi pada indikator Persentase perangkat daerah provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku yang memiliki realisasi capaian dari tahun 2017 sebesar 63,83% stagnan sebesar 83,83% di tahun 2020, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD persentase realisasi capaiannya hanya sebesar 63,83%. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.25

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Pengelolaan dan Pengolahan Kearsipan											
A	Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan		%	0,70	1,18	1,66	2,14	0,72	1,21	1,7	2,14	2,62	81,67	
2			Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kearsipan											
A	Persentase perangkat daerah provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku		%	57,45	68,09	82,98	93,62	63,83	74,47	85,11	63,83	100,00	63,83	

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui 7 program pembangunan yang diukur dengan sejumlah 10 indikator program yaitu: (1) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap; (2) Nilai Tukar Nelayan (NTN); (3) Jumlah produksi perikanan budidaya; (4) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi); (5) Jumlah produk olahan Hasil perikanan; (6) Nilai Ekspor Hasil Perikanan; (7) Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III; (8) Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; (9) Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan; (10) Persentase kelompok (KUB, Poklahsar, Pokdakan) yang dibina disuluh.

Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2017-2020, terdapat 6 indikator program yang tren perkembangannya meningkat, yaitu: Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dari sebesar 304.038,71 ton menjadi 319.196,89 ton; Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dari sebesar 107,23% menjadi 101,77%; Nilai Ekspor Hasil Perikanan dari sebesar 27.371.747 US \$ menjadi 35.493,497 US \$; Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan dari sebesar 89% menjadi 100%; Persentase kelompok (KUB, Poklahsar, Pokdakan) yang dibina disuluh dari 10,42% menjadi 13,3%, dan Jumlah produk olahan hasil perikanan dari sebesar 1.902,48 ton menjadi 6.205,90 ton. Terdapat 2 indikator yang capaiannya menurun dari tahun 2017-2020 yaitu Jumlah produksi perikanan budidaya dari sebesar 34.302 ton menjadi 21.421,10 ton; Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari sebesar 110,7% menjadi 103,56%.

Dibandingkan target akhir RPJMD, dari sejumlah 10 indikator program urusan kelautan dan perikanan, sebanyak 4 indikator memiliki status kinerja telah mencapai target akhir RPJMD, sebanyak 3 indikator akan mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 3 indikator kinerja perlu upaya keras.

Tabel 5.25

Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap										
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	304.019,32	304.628,57	305.239,05	305.850,75	304.038,71	304.975,02	309.287,15	319.196,89	306.463,67	104,15	
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	109,60	109,84	110,08	110,33	110,7	115,26	117,42	103,56	110,57	93,66	
2			Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya										
	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.649,95	33.717,38	33.784,95	33.852,66	34.302	34.399,86	33.003,11	21.421,10	33.920,50	63,15	
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	%	107,52	107,75	107,99	108,23	107,23	108,2	126,77	101,63	108,47	93,69	
3			Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan										
	Jumlah produk olahan Hasil perikanan	Ton	1.320,94	1.323,58	1.326,23	1.328,88	1.902,48	1.336,82	1.803,55	6.205,90	1.331,54	466,06	
4			Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan										
	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US \$	31.773.340	31.779.695	31.786.051	31.792.408	27.371.747	70.168.692	33.994.231,20	35.493.497	31.798.767	111,61	
5			Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
	Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III	Kawasan	2	3	4	4	1	1	1	0	4	25,00	
	Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya	Dokumen/ Peraturan	1 (dok. pendukung RZWP3K)	1 (Perda RZWP3K)	1 (Pergub Rencana pengelolaan wp3K)	1 (Pergub Rencana Zonasi Rinci WP3K)	1 (dok. pendukung RZWP3K)	-	-	0	4 Produk pereatiran perundang-undangan tentang WP3K	25	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target			Tahun 2020	Realisasi Kinerja			Tahun 2020	Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
	kelautan dan perikanan												
6			Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan										
	% kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100	89	100	100	100	100,00	100,00	
7			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan										
	Persentase kelompok (KUB, Poklamsar, Pokdakan) yang dibina disuluh	%	10,42	11,77	13,13	16,95	10,42	12	13,3	16,95	18,19	93,18	

2. Pariwisata

Urusan pilihan bidang pariwisata terdiri dari 5 program yang dijabarkan kedalam 7 indikator yaitu 1) Rata – rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau; 2) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB; 3) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau; 4) Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau; 5) Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau; 6) Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau dan 7) Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif aktif.

Dilihat dari realisasi capaian dari tahun 2017 – 2020 indikator yang mengalami peningkatan realisasi capaian di tiap tahunnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau realisasi capaian tahun 2017 sebesar 2,89 meningkat sebesar 7,15 juta orang pada tahun 2020, Indikator yang mengalami Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau realisasi capain tahun 2017 sebesar 52,66% menurun menjadi 22,76% pada tahun 2020. Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau dari tahun 2018 sebesar Rp 14.299 M meningkat menjadi Rp 1.625 M pada tahun 2019; pada tahun 2020 turun Kembali menjadi 14.422, Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau realisasi capaian tahun 2017 sebesar 2,30 juta orang menjadi 0,411 juta orang pada tahun 2020, Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB realisasi capaian tahun 2017 sebesar 2,2% men menjadi 1,63 % pada tahun 2020, dan Rata – rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau realisasi capaian tahun 2017 sebesar 2,09 hari menurun menjadi 1,83 hari pada tahun 2020; Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif aktif realissi capaian tahun 2017 sebesar 2,73% meningkat menjadi 22,15% pada tahun 2020

Selanjutnya dilihat dari perbandingan capaian tahun 2019 dengan target RPJMD sudah cukup baik, yaitu terdapat 1 indikator yang telah tercapai, 2 indikator yang masih on the track untuk mencapai target akhirt RPJMD, dan 4 indikator memerlukan upaya keras untuk mencapai target akhir.

Secara lebih rinci, capaian kinerja program urusan pariwisata bisa dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 5.26

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata											
	Rata – rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau		hari	2,00	2,05	2,10	2,15	2,09	1,87	1,96	1,83	2,20	83,18	
2			Program Pengembangan Industri Pariwisata											
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		%	2,35	2,4	2,45	2,5	2,2	2,32	2,46	1,63	2,55	63,92	
3			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata											
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau		Juta orang	2,20	2,25	2,30	2,40	2,07	2,6356	2,8648	0,411248	2,50	16,44	
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau		Juta orang	1,51	1,54	1,57	1,60	2,89	3,547	4,227	7,15	1,63	438,65	
	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau		Milyar Rupiah	NA	11.654	13.409	15.050	NA	14.299	19.625	14.422	16.809	85,79	
4			Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata											
	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau		%	50,00	50,50	51,00	51,50	52,66	53,75	50,87	22,76	52,00	43,76	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
5			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif											
	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif aktif		%	1,00	10,00	20,00	30,00	2,73	13,3	24,21	22,15	40,00	55,37	

3. Pertanian

Urusan Pertanian terdiri dari 5 program dan 12 indikator yakni 1) Nilai Tukar Petani (NTP); 2) Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; 3) Jumlah Produksi Padi (ton); 4) Jumlah Produksi Tanaman Palawija; 5) Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura; 6) Jumlah produksi Tanaman Perkebunan; 7) Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar; 8) Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Kecil; 9) Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat; 10) Persentase Peningkatan Populasi Ternak; 11) Persentase Peternak yang memanfaatkan teknologi tepat guna; dan 12) Persentase Kelompok Tani Menerapkan Teknologi pertanian/perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura.

Adapun perkembangan realisasi kinerja 12 indikator pada tahun 2017 hingga tahun 2020 yaitu sebanyak 8 indikator trennya membaik yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2017 sebesar 97,98% meningkat menjadi sebesar 99,84%, Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari sebesar 1,16% pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 1,24%, Jumlah produksi padi meningkat dari sebesar 601 ton menjadi 1.360,82 ton, Jumlah produksi tanaman komoditas hortikultura meningkat dari sebesar 40.301 ton menjadi 57.401 ton, Persentase angka prevalensi penyakit hewan kecil menurun dari sebesar 0,0035% menurun menjadi 0,002%, Persentase Peningkatan populasi ternak dari 4,67% menjadi sebesar 5 %, Persentase Peternak yang memanfaatkan teknologi tepat guna dari sebesar 3% meningkat menjadi sebesar 5,56% dan Persentase Kelompok Tani Menerapkan Teknologi pertanian/perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura dari sebesar 4,53% menjadi 6,95%. Terdapat 3 indikator yang mengalami tren yang fluktuatif yaitu Jumlah produksi tanaman palawija pada tahun 2017 sebesar 19.531,5 ton menurun menjadi 14.957 ton pada tahun 2018 kemudian meningkat menjadi 19.482,46 ton pada tahun 2019 pada tahun 2020 20.606,84 ton , Persentase angka prevalensi penyakit hewan besar sebesar 0,04% pada tahun 2017 menurun menjadi 0,032% pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi 0,04 % pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 0,021%, Persentase produk pangan asal hewan yang aman dan sehat sebesar 78,84% pada tahun 2017 menjadi 85,71% pada tahun 2018 kemudian menurun menjadi sebesar 57,31% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 67,18%. Sedangkan indikator yang mengalami tren perkembangan yang Kurang baik terdapat 1 indikator yaitu jumlah produksi tanaman perkebunan dari sebesar 47.930 ton menurun menjadi 25.690 ton pada tahun 2020.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 terdapat 6 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD; 4 indikator yang akan mencapai target akhir dan 2 indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD, Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD yaitu 1) Jumlah produksi Tanaman Perkebunan; dan 2) Persentase Peningkatan Populasi Ternak, Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.27

Capaian Kinerja Urusan Pertanian dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program peningkatan kesejahteraan Petani											
a	Nilai Tukar Petani (NTP)		%	97,50	98,00	98,70	99,30	97,98	97,02	101,41	99,84	100,00	99,84	
b	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		%	1,16	1,18	1,21	1,24	1,16	1,2	1,2	1,24	1,28	96,875	
2			Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan											
a	Jumlah Produksi Padi (ton)		ton	792	850	1.020	1.020	601	833	1.167,80	1.360,82	1.020	133,41	
b	Jumlah Produksi Tanaman Palawija		ton	12.367	12.679	12.679	12.742	19.531,5	14.957	19.482,46	20.606,84	12.742	161,72	
c	Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura		ton	39.936	41.692	43.239	44.644	40.301	46.659	72.654,90	57.401	45.822	125,26	
d	Jumlah produksi Tanaman Perkebunan		ton	31.338	31.590	31.796	32.103	47.930	47.930	33.946,80	30.051,44	32.480	92,52	
3			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak											
a	Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar		%	0,035	0,030	0,025	0,020	0,04	0,032	0,04	0,021	0,015	60,00	
b	Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Kecil		%	0,003	0,003	0,002	0,002	0,0035	0,003	0,002	0,002	0,001	200	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
c	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	54,90	55,40	56,20	57,60	78,84	85,71	57,31	67,18	58,50	114,83	
4			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan										
a	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	6,00	5,00	5,00	5,00	4,67	5,05	5,32	5,00	26,00	77,07	
5			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Peternakan										
a	Persentase Peternak yang memanfaatkan teknologi tepat guna	%	4,44	5,00	5,28	5,56	3	5	5,28	5,56	6,11	90,99	
b	Persentase Kelompok Tani Menerapkan Teknologi pertanian/perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	%	4,54	4,63	4,63	4,73	4,53	4,63	6,85	6,95	4,73	146,93	

4. Kehutanan

Urusan Kehutanan terdiri dari 1 program dan 5 indikator yakni 1) Presentase terbentuk dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau; 2) Presentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB; 3) Luas lahan kritis terehabilitasi; 4) Persentase KPH yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat; dan 5) Persentase penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

Adapun perkembangan realisasi kinerja 5 indikator pada tahun 2017 hingga tahun 2020 yaitu sebanyak 2 indikator trennya membaik yaitu Presentase terbentuk dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau dari sebesar 66,66% pada tahun 2017 meningkat menjadi 100% pada tahun 2020, dan Persentase penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pada tahun 2017 sebesar 75% meningkat menjadi sebesar 83,33% pada tahun 2020. Terdapat 3 indikator yang mengalami tren yang fluktuatif yaitu Luas lahan kritis terehabilitasi pada tahun 2017 seluas 243 ha meningkat pada tahun 2019 menjadi 400 ha dan menurun menjadi seluas 300 ha pada tahun 2020, Persentase KPH yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017 sebesar 20,6% meningkat menjadi 100,00% pada tahun 2019 dan menurun menjadi 83,33% pada tahun 2020, Presentase Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB pada tahun 2017 sebesar 0,01% meningkat menjadi sebesar 0,33% pada tahun 2018 kemudian menurun menjadi 0,01% pada tahun 2020.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 terdapat 2 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD; 1 indikator yang akan mencapai target akhir, dan 3 indikator berstatus akan mampu mencapai target, dan 1 indikator memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD, Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD yaitu Presentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB . Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.28

Capaian Kinerja Urusan Kehutanan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan											
a	Presentase terbentuk dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau		%	50,00	83,30	100,00	100,00	66,66	100	100	100	100,00	100	
b	Presentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB		%	0,03	0,03	0,03	0,05	0,01	0,33	0,01	0,01	0,05	20,00	
c	Luas lahan kritis terehabilitasi		ha	243	220	225	230	243	386	400	300	1.661	80,01	
d	Persentase KPH yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat		%	-	50,00	66,67	83,33	20,6	20,6	100	83,33	100,00	83,33	
e	Persentase penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan		%	75,00	80,00	85,00	90,00	75	18,75	85	83,33	95,00	87,71	

5. Energi dan Sumberdaya Mineral

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) memiliki 5 program yang dijabarkan dalam 9 indikator yakni Indikator 1) Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan; 2) Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah; 3) Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP; 4) Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku; 5) Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah; 6) Rasio Elektrifikasi; 7) Rasio Desa /Kelurahan Berlistrik; 8) Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan; dan 9) Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed).

Dari 9 indikator tersebut jika dilihat perkembangan setiap tahunnya terdapat 5 indikator yang memiliki tren capaian meningkat setiap tahunnya yakni 1) indikator Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan mengalami peningkatan dari 20% di tahun 2017 menjadi 43,33% di tahun 2020; 2) indikator Rasio Elektrifikasi 91,44 % di tahun 2017 meningkat menjadi 93,72% di tahun 2020; 3) indikator Rasio Desa /Kelurahan Berlistrik juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 78,61% meningkat menjadi 91,35% di tahun 2020; 4) Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan mengalami peningkatan dari 21,58% di tahun 2017 menjadi 82,11% di tahun 2020; dan 5) indikator Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) meningkat dari 0,0006% di tahun 2017 menjadi 0,00134% di tahun 2020.

Selanjutnya terdapat 4 indikator yang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung menurun yakni 1) indikator Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP; 2) indikator Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku; 3) Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah dengan capaian 0 di tahun 2017 menjadi 3 kab/kota di tahun 2018 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 1 kab/kota; 4) indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah yang mengalami penurunan dari 1,91% pada tahun 2017 menjadi 1,25% pada tahun 2020.

Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 3 indikator yang berstatus telah mencapai target, 4 indikator program berstatus akan mencapai target RPJMD, dan 2 indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD.

Tabel 5.29

**Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD
sampai Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah												
a	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	%	20,00	35,00	50,00	75,00	20	23	33,33	43,33	100,00	43,33	
b	Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Kab/Kota	-	3,00	4,00	1	-	3	3	1	7,00	100,00	
2		Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara											
a	Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	%	70,00	75,00	80,00	85,00	70	100	90	88,33	95,00	92,97	
b	Persentase Pemegang IUP yang	%	70,00	75,00	80,00	85,00	70	85,71	90	40,00	95,00	42,10	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
	Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku												
c	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah	%	1,00	1,20	1,40	1,50	1,91	1,28	1,35	1,25	1,50	83,33	
3		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan											
a	Rasio Elektrifikasi	%	89,15	90,50	91,50	92,50	91,44	91,5	92,59	93,72	93,50	100,23	
b	Rasio Desa /Kelurahan Berlistrik	%	81,50	88,50	95,45	97,85	78,61	85,1	89,9	91,35	100,00	91,35	
4		Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan											
a	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang	%	20,00	45,00	64,00	82,00	21,58	32,1	70,79	82,11	100,00	82,11	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
	melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan												
5		Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi											
a	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0,0006	0,0007	0,0008	0,0009	0,0006	0,0007	0,0007	0,00134	0,0010	134	

6. Perdagangan

Urusan pilihan bidang perdagangan memiliki 3 program yang dijabarkan dalam 9 indikator, 1) yaitu Fluktuasi Harga Bahan Pokok; 2) Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk; 3) Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI); 4) Persentase penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan konsumen (melalui BPSK); 5) Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri; 6) Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau; 7) Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA; 8) Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor; dan 9) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Dilihat dari realisasi capaian tahun 2017-2020, ada 5 indikator yang realisasi capaiannya meningkat yaitu indikator 1) Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk realisasi capaian tahun 2017 sebesar 83% meningkat menjadi 163% pada tahun 2020; 2) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB realisasi capaiannya tahun 2017 sebesar 7% meningkat menjadi 8,50% pada tahun 2020; 3) indikator Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan dari realisasi capaian tahun 2017 sebesar Rp 8.654.142 menjadi Rp 9.773.647,60 pada tahun 2020; 4) Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri meningkat dari tahun 2017 sebesar 2.915,73 juta US\$ menjadi 3.065,30 juta US\$ pada tahun 2020; 5) Jumlah produk unggulan daerah yang diterima di pasar ekspor dari 23 jenis pada tahun 2017 menjadi 24 jenis di tahun 2020. Terdapat 2 indikator yang realisasi capaiannya menurun yaitu 1) Persentase penurunan yaitu fluktuasi harga bahan pokok yaitu pada tahun 2017 sebesar 7,5% menjadi 2,34% pada tahun 2020; 2) jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) realisasi capaian tahun 2017 sebesar 37 % menurun menjadi 20% pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena masih adanya jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) diharapkan pemerintah provinsi Kepri meningkatkan pengawasan peredaran barang yang tidak memenuhi standar

Terdapat indikator yang mengalami perkembangan fluktuatif dengan kecenderungan menurun yaitu indikator Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA pada tahun 2017 sebanyak 27.721 SKA meningkat menjadi 28.725 SKA pada tahun 2018 lalu menurun pada tahun 2019 menjadi sebanyak 28.418 SKA dan tahun 2020 menjadi 27.496 SKA.

Sedangkan indikator yang cenderung stagnan dari tahun 2017-2020 yaitu indikator Persentase penyelesaian kasus pengaduan perlindungan konsumen (melalui BPSK).

Selanjutnya jika dilihat dari perbandingan RPJMD dengan capaian tahun 2020, urusan perdagangan memiliki masih ada 4 indikator yang akan tercapai dan 5 indikator yang telah tercapai. Kedua indikator yang akan tercapai yaitu Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau dengan persentase capaian sebesar 97,33% dan

Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor dengan persentase capaian sebesar 96,00%. Indikator Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau masih akan tercapai disebabkan karena rendahnya permintaan global, dampak dari perang dagang antara amerika dan china. Untuk menghindari terjadinya penurunan, maka di harapkan untuk meningkatkan koordinasi, pengembangan jaringan kerjasama dalam peningkatan ekspor non Migas yang menjadi produk potensial dan unggulan di Kepulauan Riau. Indikator kedua yang masih akan tercapai yaitu Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), ketiga adalah Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor, dan keempat Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Secara lebih rinci kinerja program urusan perdagangan bsia dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.29

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (2018-2021) / Penggabungan 2 Program Tahun 2017: Program Peningkatan Perdagangan dan Industri Dalam dan Luar Negeri; Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri										
	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	persen	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%	7,5	2,54	8,33	2,34	< 10%	176,6	
	Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk	Persen	83,00	84,00	89,00	95,00	83	84	163	163	100,00	163,00	
2			Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan										
	Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Persen	37,00	34,00	31,00	28	37	34	25	20	25,00	80,00	
	Pesentase penyelesaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100,00	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
	Kasus pengaduan perlindungan konsumen (melalui BPSK)												
3		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor											
	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	juta US \$	1.258,94	1.332,21	1.405,48	1.478,75	2.915,73	3.034,45	2.727,48	3065,30	1.550,2	197,73	
	Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribu US \$	8.557.950	8.657.950	9.100.000	9.500.000	8.654.142	8.489.050	7.793.311	9.773.647,60	10.000.000	97,33	
	Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA	SKA	8.985	9.765	10.000	10.500	27.721	28.725	28.418	27.496	11.250	244,40	
	Jumlah Produk unggulan daerah yang	Jenis	23	23	23	24	23	23	23	24	25	96,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
	diterima pasar ekspor												
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	0,08	0,08	8,35	8,44	7	8,56	9,07	8,50	8,52	99,76	

7. Perindustrian

Urusan pilihan bidang perindustrian terdiri dari 5 program dengan dijabarkan dalam 9 indikator yaitu 1) Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang; 2) Jumlah Industri Besar; 3) Jumlah kawasan industri; 4) Jumlah Kelompok Klaster Industri; 5) Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB; 6) Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas; 7) Jumlah industri kecil dan Menengah; 8) Jumlah industri berbahan baku lokal; 9) Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal.

Dilihat dari realisasi capaian tahun 2017-2020 dari ke 10 indikator, ada 7 indikator yang memiliki trend meningkat setiap tahunnya yaitu Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang realisasi capaian tahun 2017 sebesar 6 sentra meningkat menjadi 8 sentra pada tahun 2020; Jumlah industri kecil dan Menengah realisasi capaian tahun 2017 sebesar 2.000 unit meningkat menjadi 2.500 unit pada tahun 2020; Jumlah industri berbahan baku lokal realisasi capaian tahun 2017 sebesar 1.750 unit meningkat menjadi 1.964 unit pada tahun 2020, persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM industri yang bersertifikasi di Provinsi Kepri pada tahun 2017 sebesar 0,026% menjadi 0,091 pada tahun 2020. Terdapat indikator yang menurun yaitu indikator Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal realisasi capaian tahun 2017 sebesar 11,6 % menurun menjadi 10,00% pada tahun 2020.

Sedangkan dilihat dari perbandingan antara realisasi capaian tahun 2020 dengan target akhir RPJMD, maka ke 9 indikator tersebut hanya 2 indikator yang telah mencapai target sampai dengan tahun 2020, 7 indikator akan tercapai dan ada 1 indikator yang perlu upaya keras dalam pencapaian target RPJMD. Indikator yang perlu upaya keras dalam pencapaiannya jika di bandingkan target RPJM yaitu Jumlah Kelompok Klaster Industri dengan persentase capaian 16,67%. Hal ini Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas

Secara lebih rinci kinerja program urusan perindustrian bisa dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 5.30

Capaian Kinerja Urusan Perindustrian dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial											
	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang		Sentra	6	7	8	9	6	8	8	8	10	80,00	
2			Program Penataan Struktur Industri											
	Jumlah Industri Besar		Unit	776	781	785	790	779	553	554	697	795	87,67	
	Jumlah kawasan industri		kawasan	26	26	26	26	26	26	26	32	39	82,05	
	Jumlah Kelompok Klaster Industri		Klaster	2	1	1	1	2	1	1	2	6	100,00	
3			Program Pengembangan Industri Unggulan											
	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB		%	36,50	37,00	37,50	38,00	37	36,12	37,57	41,7	38,50	108,31	
	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas		Orang	129.270	131.150	133.060	135.000	137.396	121.026	133.060	107.858	136.970	78,74	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
4			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah										
	Jumlah industri kecil dan Menengah	Unit	2.000	2.200	2.400	2.700	2.000	2.200	2.400	2500	3.000	83,33	
	Jumlah industri berbahan baku lokal	Unit	1.720	1.850	1.969	2.117	1.750	1.850	1.969	1964	2.200	89,27	
	Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal	%	11,60	11,85	12,10	12,28	11,6	11,85	12,1	10	12,38	80,77	

8. Transmigrasi

Urusan pilihan bidang transmigrasi terdiri dari 1 program yang dijabarkan dengan 2 indikator yaitu Jumlah KK yang sudah bertransmigrasi di Kepri dan Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi yang tertata. Dilihat dari realisasi capaian tahun 2017-2020, ke terdapat 1 indikator ini memiliki capaian yang stagnan tiap tahunnya. Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi yang tertata realisasi capaian tahun 2017-2020 sebesar 2 kawasan. Sedangkan 1 indikator mempunyai capaian realisasi meningkat yaitu indikator Jumlah KK yang sudah bertransmigrasi di Kepri realisasi capaian tahun 2017 sebesar 1.471 KK menjadi 1.845 KK pada tahun 2020.

Namun, jika di bandingkan dengan target akhir RPJMD, urusan transmigrasi masih belum menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini disebabkan karena Rencana Kawasan Transmigrasi baru di Kabupaten Natuna belum sesuai dengan kondisi sebenarnya (RKT dibuat kementerian). Sampai dengan saat ini Telah dilakukan koordinasi dengan kementerian untuk dilakukan perbaikan terhadap Rencana Kawasan Transmigrasi yang dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (RTRW) di Kab. Natuna dan Provinsi Kepulauan Riau.

Secara rinci kinerja program urusan transmigrasi bisa dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 5.31

Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi											
	Jumlah KK yang sudah bertransmigran di Kepri		KK	1.471	1.471	1.471	2.730	1.471	1.471	1.471	1.845	2.730	67,58	
	Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi yang tertata		Kawasan	2	2	2	3	2	2	2	2	3	66,67	

D. Urusan Penunjang

1. Urusan Penunjang Perencanaan

Fungsi penunjang perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui 8 program pembangunan yang diukur dengan sejumlah 12 indikator program yaitu: (1) Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD; (2) Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD; (3) Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD; (4) Persentase kegiatan prioritas yang didanai; (5) Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir; (6) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah; (7) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah; (8) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup sesuai amanat pemerintah; (9) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pemerintahan sesuai amanat pemerintah; (10) Persentase kerjasama yang diimplementasikan; (11) Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan (12) Persentase ketersediaan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan.

Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2017-2020, terdapat 4 indikator program yang tren perkembangannya meningkat, yaitu: Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD dari sebesar 80% menjadi 100%; Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD dari NA pada tahun 2017 menjadi 86% pada tahun 2020; Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dari sebesar 30,00% menjadi 34,00%; Persentase kegiatan prioritas yang didanai dari sebesar 80% menjadi 81%. Terdapat 2 indikator yang capaiannya fluktuatif cenderung meningkat yaitu 1) Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD dengan realisasi sebesar 100,00% pada tahun 2017 menjadi 96,00% pada tahun 2018 dan meningkat Kembali menjadi 100,00% pada tahun 2020; 2) Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dari 100% menjadi 60% pada tahun 2018 dan meningkat Kembali pada tahun 2020 sebesar 100,00%. Sementara itu sebanyak 6 indikator kinerjanya stabil, tidak mengalami perubahan dari tahun 2017.

Dibandingkan target akhir RPJMD, dari sejumlah 12 indikator program fungsi penunjang perencanaan pembangunan, sebanyak 8 indikator telah mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 4 indikator program akan mencapai target akhir RPJMD. Secara umum pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tidak mengalami permasalahan yang berarti, namun dari sisi kualitas perencanaan yang perlu ditingkatkan agar dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dapat mendorong pencapaian kinerja pada perangkat daerah yang lain.

Secara rinci hasil evaluasi capaian kinerja fungsi penunjang perencanaan pembangunan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.32

Capaian Kinerja Urusan Penunjang Perencanaan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program perencanaan Pembangunan Daerah										
	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	%	93,00	96,00	100,00	100,00	80	96	100	100	100,00	100,00	
	Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	%	NA	84,00	85,00	86,00	NA	84	85	86	87,00	98,85	
	Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	%	76,00	96,00	100,00	100,00	100	96	100	100	100,00	100,00	
	Persentase kegiatan prioritas yang didanai	%	80,00	80,00	81,00	81,00	80	80	81	81	82,00	98,78	
	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	%	>30,00	>31,00	>33,00	34,00	30,00	31,00	33	34	>36	94,44	
2			Program perencanaan Perekonomian										
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100,00	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
	ekonomi sesuai amanat pemerintah												
3			Program Perencanaan sosial budaya										
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100,00	100,00	
4			Program Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup										
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup sesuai amanat pemerintah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100,00	100,00	
5			Program Perencanaan Pemerintahan										
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pemerintahan sesuai amanat pemerintah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100,00	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
6			Program Kerjasama Pembangunan										
	Persentase kerjasama yang diimplementasikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100,00	100,00	
7			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang										
	Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	42,00	60,00	80,00	100,00	100	60	80	100	100,00	100,00	
8			Program Pengendalian dan Evaluasi										
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan	%	NA	100,00	100,00	100,00	NA	100	100	100	100,00	100,00	

2. Urusan Penunjang Keuangan

Urusan Penunjang keuangan diampu oleh 2 perangkat daerah yakni Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Urusan keuangan di laksanakan melalui 7 program dan 13 indikator yang meliputi indikator 1) Realisasi pendapatan asli daerah; 2) Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah; 3) Persentase tunggakan pajak daerah yang tertagih; 4) Persentase realisasi penerimaan dana perimbangan dibandingkan target tahun berjalan; 5) Jumlah jenis inovasi pelayanan berbasis Teknologi Informasi; 6) Persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat; 7) Rata- rata lamanya waktu pelayanan Samsat (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor); 8) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SAMSAT; 9) Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat; 11) Persentase kepuasan pelayanan; 12) Persentase aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dilengkapi dengan bukti legalitas kepemilikan; dan 13) Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah yang tidak bergerak yang dilakukan pengamanan (pagar,patok,papan nama).

Dari ke 13 indikator tersebut, dilihat dari capaiannya sejak tahun 2017-2020 terdapat 9 indikator yang mengalami trend meningkat setiap tahunnya yakni indikator 1) Realisasi pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dari 1.091 triliun rupiah di tahun 2017 menjadi 1.191 triliun rupiah di tahun 2020; 2) indikator Jumlah jenis inovasi pelayanan berbasis Teknologi Informasi yang semula berupa Samsat Link ditahun 2017 menjadi e Samsat dan e payment di tahun 2019; 3) indikator Persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat mengalami peningkatan dari 2,3% di tahun 2017 menjadi 3,00% di tahun 2020; 4) indikator Rata- rata lamanya waktu pelayanan Samsat (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor meningkat dari 15 menit di tahun 2017 menjadi 10 menit di tahun 2020; 5) indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SAMSAT mengalami peningkatan dari 7,18 skor di tahun 2017 menjadi 7,97 skor di tahun 2019; 6) indikator Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat mengalami peningkatan dari 88,00% di tahun 2017 menjadi 94,33% di tahun 2020; 7) indikator Persentase kepuasan pelayanan sebesar 82,00% di tahun 2017 menjadi 94,33% di tahun 2020 dan 8) indikator Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah yang tidak bergerak yang dilakukan pengamanan (pagar,patok,papan nama) dari 41,95% pada tahun 2017 menjadi 98,17% di tahun 2020, serta 9) indikator Rata-rata Nilai hasil evaluasi APBD dan APBD Kabupaten/Kota dengan capaian BB pada tahun 2017 meningkat menjadi A pada tahun 2020.

Kemudian indikator yang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat terdapat 2 indikator yakni indikator Persentase realisasi penerimaan

dana perimbangan dibandingkan target tahun berjalan memiliki realisasi 97,04% di tahun 2017 dan menjadi 100,68% di tahun 2020; indikator Persentase aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dilengkapi dengan bukti legalitas kepemilikan 71,43% di tahun 2017 kemudian menurun menjadi 70 di tahun 2019 dan meningkat kembali menjadi 98,17% di tahun 2020.

Untuk indikator yang mengalami trend realisasi menurun meliputi 1) Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah yang memiliki capaian 33,59 % di tahun 2017 menurun menjadi 33,41% di tahun 2020; 2) Persentase tunggakan pajak daerah yang tertagih dengan realisasi 17,17% di tahun 2017 meningkat menjadi 31,10% di tahun 2020.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 5 indikator berstatus telah mencapai target akhir, 6 indikator berstatus akan mencapai target akhir RPJMD dan 2 indikator berstatus memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD yaitu indikator Realisasi pendapatan asli daerah , dan Persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi. Secara lebih rinci capaian urusan penunjang keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.33

Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
B			BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH										
1			Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah										
a	Realisasi pendapatan asli daerah	Triliun Rupiah	1,213	1,224	1,330	1,457	1.091	1.229	1.306	1.191	1.624	73,33	
b	Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah	%	34,49	36,85	37,76	38,73	33,59	35,05	35,19	33,41	39,93	83,67	
c	Persentase tunggakan pajak daerah yang tertagih	%	12,00	15,00	18,00	22,00	17,17	15	32	31,10	25,00	124,4	
2			Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Daerah										
a	Persentase realisasi penerimaan dana perimbangan dibandingkan target tahun berjalan	%	90,00	90,00	90,00	90,00	97,04	94,85	107,25	100,68	90,00	111,86	
3			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi										
a	Jumlah jenis inovasi pelayanan berbasis Teknologi Informasi	Jenis layanan	Samsat Link	e Samsat dan e payment	e Samsat dan e payment	e Samsat dan e payment	Samsat Link	E-Samsat dan e-payment	e Samsat dan e payment	e Samsat dan e payment	e Samsat dan e payment	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
b	Persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat	%	7,00	10,00	20,00	30,00	2,3	3	3	3,00	50,00	6,00	
4			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi Publik										
a	Rata-rata lamanya waktu pelayanan Samsat (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor)	Waktu (menit)	30	30	25	25	15	10	10	10	20	150,00	
b	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SAMSAT	Kategori (scoring)	Baik (7.50)	Baik (7.75)	Baik (8.00)	Sangat baik (8.25)	7,18	7,75	8	Baik (7,97)	Baik (8.50)	94,12	
A			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah										
1			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
a	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	87,10	90,32	93,55	96,77	88	90	100	94,33	100,00	94,33	
b	Persentase kepuasan pelayanan	%	80,00	85,00	90,00	95,00	82	85	97	94,33	97,00	97,24	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
2			Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah										
a	Persentase aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dilengkapi dengan bukti legalitas kepemilikan	%	68,93	68,93	74,07	79,22	71,43	68,93	70	98,17	84,36	116,37	
b	Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah yang tidak bergerak yang dilakukan pengamanan (pagar,patok,papan nama)	%	40,00	55,56	71,11	86,67	41,95	55,56	70	98,17	100,00	98,17	
3			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota										
a	Rata-rata Nilai hasil evaluasi APBD dan LPP APBD Kabupaten/Kota	Skor	BB	BB	BB	A	BB	BB	BB	A	A	80	

3. Urusan Penunjang Kepegawaian dan Diklat

Urusan Penunjang Kepegawaian dan Diklat memiliki 2 program yang dijabarkan kedalam 6 indikator yakni 1) Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan; 2) Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan; 3) Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat; 4) Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik; 5) Indeks Kepuasan Pelayanan ASN; dan 6) Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi.

Dari 6 indikator tersebut jika dilihat perkembangan setiap tahunnya terdapat 1 indikator yang memiliki tren capaian meningkat, yaitu Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik mengalami peningkatan dari 92,70% ditahun 2017 menjadi 100% tahun 2020. selanjutnya terdapat 2 indikator yang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat 1) Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan; 2) Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan ; dan 2) Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat dari 15 kasus tahun 2017 menjadi 16 kasus tahun 2020.

Terdapat 1 indikator yang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung menurun yaitu indicator Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi 17,17% tahun 2017 dan menurun pada tahun 2020 sebesar 15,90%. Sedangkan Indikator yang mengalami perkembangan cenderung stagnan adalah indikator Indeks Kepuasan Pelayanan ASN dengan nilai indeks B tahun 2020.

Dilihat capaian tahun 2020 dengan target akhir RPJMD terdapat 3 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir RPJMD yakni indikator Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan dengan persentase realisasi capaian 115,84%; indikator Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik dengan realisasi capaian 105,26%; dan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan ASN dengan realisasi capaian 100,00%.

Sedangkan yang memerlukan upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD ada 3, yaitu indikator Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan, Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat, dan Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi.

Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan Penunjang Kepegawaian dan Diklat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.34

Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian dan Diklat dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur											
	Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan		%	54,00	58,00	60,00	65,00	55,87	55,13	58,02	56,74	75,00	75,65	
	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan		%	78,00	80,00	82,00	84,00	97,02	84,8	93,8	98,47	85,00	115,84	
	Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat		Kasus	16 Kasus	14 Kasus	12 Kasus	10	15	13	12	16	8	50,00	
	Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik		%	90,00	92,00	93,00	94,00	92,7	100	100	100	95,00	105,26	
	Indeks Kepuasan Pelayanan ASN		indeks	B	B	B	B (80)	B	B	B (77,70)	B (80,69)	B	100,00	
2			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
	Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi		%	14,07	19,64	25,21	30,78	17,17	13,68	31,2	15,90	36,35	43,74	

4. Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari 2 program dan 2 indikator, adapun perkembangan realisasi kinerja 2 indikator pada tahun 2017 hingga tahun 2020 yaitu semua indikator mengalami tren perkembangan meningkat yaitu indikator Presentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan oleh Stakeholder pada tahun 2017 sebesar 59,00% menjadi 65,00% pada tahun 2020 sedangkan persentase jumlah inisiatif inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah dari NA pada tahun 2017 meningkat menjadi 20,00% pada tahun 2020.

Selanjutnya dilihat capaian tahun 2019 dengan target akhir RPJMD terdapat 1 indikator yang berstatus akan mencapai target akhir RPJMD yakni indikator persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder dengan persentase realisasi capaian 92,85%. Kemudian masih ada 1 indikator yang berstatus masih jauh dari target akhir RPJMD yaitu indikator persentase jumlah inisiatif inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah dengan realisasi capaian 66,66%. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program RPJMD urusan bidang pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.35

Capaian Kinerja Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan											
	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder		%	50,00	55,00	60,00	65,00	59	55	55	65	70,00	92,85	
1			Program Pengembangan Inovasi Daerah											
	Persentase Jumlah Inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah		%	NA	5,00	10,00	20,00	NA	0	5	20	30,00	66,66	

5. Urusan Penunjang Pengawasan

Fungsi penunjang pengawasan dilaksanakan melalui sebanyak 4 program pembangunan yang diukur dengan sejumlah 9 indikator program yaitu: (1) Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang memiliki sertifikasi; (2) Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau; (3) Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau; (4) Persentase Pelaksanaan Tugas pada Inspektorat yang memiliki SOP yang memadai; (5) Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri; (6) Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; (7) Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; (8) Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN, LHKASN dan LP2P, dan (9) Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepri.

Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2017-2020, terdapat 1 indikator program yang tren perkembangannya meningkat, yaitu: Persentase Pelaksanaan Tugas pada Inspektorat yang memiliki SOP yang memadai dari 60% menjadi 95%, Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari warna kuning menjadi warna hijau di tahun 2020. Terdapat 2 indikator yang fluktuatif cenderung stagnan yaitu 1) Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN, LHKASN dan LP2P dari 100,00% menjadi 96,00% pada tahun 2018 dan meningkat Kembali menjadi 100,00% pada tahun 2020; 2) Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau, dari sebesar 100% menjadi hanya 71,43% pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 kembali mendapatkan nilai sempurna sebesar 100,00%.

Sedangkan terdapat indikator yang stagnan yaitu Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang memiliki sertifikasi, Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri, Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepri.

Dibandingkan target akhir RPJMD, dari sejumlah 9 indikator program fungsi penunjang perencanaan pembangunan, sebanyak 8 indikator telah mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 1 indikator program memerlukan upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD, yakni indikator Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau masih lebih rendah dibandingkan target tahun 2020 sehingga perlu ada perbaikan kinerja dengan meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dengan pemerintah Kabupaten/kota dalam rangka Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau.

Secara rinci hasil evaluasi capaian kinerja fungsi penunjang pengawasan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.36

Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.											
	Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang memiliki sertifikasi		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100,00	100,00	
	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau		Level	3	3	3	3	3	3	3	2+	3	66,00	
	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	71,43	100	100,00	100,00	
2			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan											
	Persentase Pelaksanaan Tugas pada Inspektorat yang memiliki SOP yang memadai		%	40,00	50,00	60,00	70,00	60	92	92	95	80,00	118,75	
3			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah											
	Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri		Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
	Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100,00	
	Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Zona	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Kuning	Kuning	Hijau	Hijau	Hijau	100	
4			Program Pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri										
	Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN, LHKASN dan LP2P	%	70,00	85,00	85,00	90,00	100	96	100	100	95,00	105,26	
	Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepri	Status	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	100	

6. Urusan Penunjang Sekretariat Daerah

Fungsi penunjang kesekretariatan daerah dilaksanakan melalui sebanyak 28 program pembangunan yang diukur dengan sejumlah 50 indikator program. Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2017-2020, terdapat 28 indikator program yang tren perkembangannya meningkat, yaitu: (1) Presentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah; (2) Persentase Fasilitasi Penyelesaian Batas Darat Kab/Kota; (3) Persentase ranperda yang diusulkan pemrakarsa yang diakomodir dalam propemperda; (4) jumlah kasus masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum oleh pemrpov kepri; (5) Jumlah MoU antara Gubernur Kepri dengan LBH dan atau OBH yang terverifikasi; (6) Jumlah sistem informasi administrasi pembangunan yang terintegrasi; (7) Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target; (8) Jumlah Kab/Kota yang telah menerbitkan regulasi IUJK ditingkat daerah; (9) Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; (10) Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (E-Procurement); (11) Skor Kepuasan Masyarakat; (12) Persentase Mubaligh yang tersertifikasi; (13) Jumlah Kab/Kota yang telah menerbitkan regulasi IUJK ditingkat daerah; (14) Jumlah koordinasi bidang perekonomian yang terlaksana; (15) Rata-rata Tingkat Kesehatan BUMD; (16) Jumlah Media Massa Yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; (17) Jumlah Kerjasama Yang Difasilitasi Oleh Bagian Penghubung dan Kerjasama di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri; (18) Persentase Jabatan yang telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja; (19) Persentase Perangkat daerah yang telah memiliki dokumen evaluasi jabatan; (20) Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan standar pelayanan publik; (21) Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh kementerian; (22) Persentase SOP pada seluruh Opd yang tersusun; (23) Persentase SOP pada seluruh OPD yang telah diimplementasikan; (24) Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik; (25) Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri, (26) Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan; yaitu (27) Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan; (28) Persentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya. Terdapat 1 indikator yang capaiannya menurun : (1) persentase perkara perdata dan TUN yang dihadapi oleh pemprov yang tertangani

Dibandingkan target akhir RPJMD, dari sejumlah 50 indikator program fungsi penunjang sekretariat daerah, sebanyak 26 indikator telah mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 16 indikator program akan mencapai target akhir RPJMD, dan 8 indikator program yang perlu upaya keras dalam mencapai target akhir

RPJMD. Sebanyak 8 indikator program yang perlu upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD yaitu:

1. Jumlah Kab/Kota yang telah menerbitkan regulasi IUJK ditingkat daerah, disebabkan oleh belum terbitnya PP sebagai juklak/juknis dari UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sehingga daerah belum dapat menyusun regulasi IUJK daerahnya. Peraturan Tentang IUJK yang berlaku sekarang telah membatalkan regulasi daerah terkait IUJK yang sudah ada
2. Persentase kegiatan dialog/seminar antar umat beragama yang difasilitasi
3. Jumlah monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian yang dilaksanakan
4. Jumlah BUMD baru yang terbentuk
5. Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri yang Difasilitasi di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri
6. Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh kementerian
7. Jumlah anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Provinsi
8. Jumlah anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Nasional

Secara rinci hasil evaluasi capaian kinerja fungsi penunjang sekretariat daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.37

Capaian Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Daerah dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
A			BIRO PEMERINTAHAN DAN PERBATASAN										
1			Program Peyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah										
	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Peringkat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	sangat Tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	Tinggi	100,00	
	Presentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	94,21	100	100	100,00	100,00	100,00	
2			Program Pengembangan Wilayah Perbatasan										
	Persentase Fasilitas Penyelesaian Batas Darat Kab/Kota	%	85,00	95,00	100,00	100,00	85	95	100	100,00	100,00	100,00	
	Persentase lokasi prioritas dan PKSB yang didata/dikaji/diedukasi dalam pengembangan kawasan perbatasan	%	63,41	100,00	100,00	100,00	N/A	100	100	100,00	100,00	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
B			BIRO HUKUM										
3			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan										
	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan	Jumlah	6	7	7	7	10	6	4	29	34	188,24	
4			Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum										
	Persentase Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	
5			Program Pembinaan Hukum										
	Persentase ranperda yang diusulkan pemrakarsa yang diakomodir dalam propemperda	%	68,18	72,72	76,00	80,00	67	73	80	80,00	85,00	94,12	
6			Program Fasilitas Bantuan dan Layanan Hukum										
	persentase perkara perdata dan TUN	%	50,00	30,00	40,00	50,00	57	48	120	40,00	60,00	200,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
	yang dihadapi oleh pemprov yang tertangani												
	jumlah kasus masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum oleh pemprov kepri	Kasus	NA	5	5	5	NA	4	10	9	20	115,00	
	Jumlah MoU antara Gubernur Kepri dengan LBH dan atau OBH yang terverifikasi	Dokumen	NA	3	3	3	NA	1	3	3	3	100,00	
C			BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN										
7			Program e-Government										
	Jumlah sistem informasi administrasi pembangunan yang terintegrasi	Unit Sistem	2	3	5	7	2	3	5	7	7	100,00	
8			Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan										
	Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	%	Fisik 100,00 Keu 95,00	Fisik 100,00 Keu 95,00	Fisik 100,00 Keu 95,00	Fisik 100,00 Keu 95,00	Fisik 84,55 Keu 88,04	Fisik 97,04 Keu 95,97	Fisik 97,37 Keu 95,31	Fisik 99,35 Keu 97,48	Fisik 100,00 Keu 95,00	98,47	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
9			Program Peningkatan Administrasi Pembangunan										
	Persentase dokumen administrasi pembangunan tersusun tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	
10			Program Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi										
	Jumlah Kab/Kota yang telah menerbitkan regulasi IUJK ditingkat daerah	Kab/Kota	1	3	4	5	1	3	3	3	7	42,86	
D			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA										
11			Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah										
	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	%	70,00	75,00	80,00	83,00	65,26	69,64	75,39	86,57	87,00	86,66	
12			Program e-procurement										
	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (E-Procurement)	%	NA	70,00	75,00	80,00	82,76	71,19	89,69	91,57	85,00	105,52	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
E			BIRO UMUM										
13			Program Pelayanan KDH/WKDH yang di fasilitasi (2018-2021) / Gabungan 2 Program Tahun 2017: Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; Program Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah										
	Jumlah layanan kedinasan KDH/WKDH yang sesuai prosedur	layanan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00	
	Jumlah layanan rumah tangga KDH/WKDH yang dilayani sesuai prosedur	layanan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00	
14			Program Dukungan Pelayanan Umum										
	Persentase pelaksanaan pelayanan umum sesuai SOP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	
	Skor Kepuasan Masyarakat	Skor	NA	75	80	74,00	NA	75	79,94	82,89	90	88,82	
15			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan sekretariat daerah										
	Persentase barang milik daerah dilingkungan sekretariat daerah yang terjamin keamanannya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
	Persentase barang milik daerah dilingkungan sekretariat daerah yang dikelola sesuai dengan standar	%	90,00	90,00	90,00	90,00	100	90	90	90,00	90,00	100,00	
F			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT										
16			Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan										
	Persentase pelaksanaan hari-hari besar keagamaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	
	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	%	Na	25,00	50,00	80,00	Na	25	50	80,00	100,00	80,00	
17			Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat										
	Persentase Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat tingkat provinsi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	
	Persentase Pembinaan , Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	
	Persentase Pembinaan , Pemantauan dan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
	Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan												
18			Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama										
	Persentase kegiatan dialog/seminar antar umat beragama yang difasilitasi	Kali	NA	0	0		0	0	0		2	0,00	
G			BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN										
19			Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Asistensi Pembangunan										
	Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan	rekomendasi	1	5	6	7	13	13	6	7	27	118,52	
	Jumlah koordinasi bidang perekonomian yang terlaksana	Angka	14	14	14	14	13	18	14	14	70	84,29	
	Jumlah monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian yang dilaksanakan	Laporan	NA	7	7	7	NA	7	7	7	28	75,00	
20			Program Peningkatan Kinerja BUMD										
	Rata-rata Tingkat Kesehatan BUMD	Skor	30,00	32,00	35,00	40,00	0	17,94	33,33	56,32	45,00	125,15	
	Jumlah BUMD baru yang terbentuk	BUMD	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	0,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
H			BIRO HUMAS, PROTOKOL DAN PENGHUBUNG										
21			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH										
	Persentase Pelayanan KDH/WKDH Bidang Kehumasan, Keprotokolan, dan Penghubung dan Kerjasama Yang Sesuai Dengan SOP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	
22			Program Pengembangan Publikasi, Komunikasi dan Informasi										
	Jumlah Media Massa Yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Media Massa	10,00	10,00	10,00	150	128	172	159	200	10,00	2.000,00	
	Persentase Media Informasi Yang Digunakan	%	70,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	
23			Program Fasilitasi dan Kerjasama dengan Berbagai Pihak										
	Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri yang Difasilitasi di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri	Kegiatan	4	4	4	3	4	4	4	3	20	75,00	
	Jumlah Kerjasama Yang Difasilitasi Oleh	Mou	10	10	10	10	8	6	10	18	50	84,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
	Bagian Penghubung dan Kerjasama di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri												
I			BIRO ORGANISASI DAN KORPRI										
24			Program kelembagaan organisasi pemerintah daerah										
	Persentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	%	84,00	87,00	90,00	80,00	116	90	72	80,00	100,00	80,00	
25			Program pembinaan dan pengembangan aparatur										
	Persentase Jabatan yang telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja	%	53,00	61,00	76,00	90,00	56	68,3	76	90,00	97,00	94,84	
	Persentase Perangkat daerah yang telah memiliki dokumen evaluasi jabatan	%	53,00	61,00	76,00	90,00	67	68,3	80	90,00	97,00	82,47	
	Persentase jabatan struktural yang telah disusun standar kompetensi Jabatan managerial sesuai ketentuan	%	99,00	99,00	99,00	99,00	99	99	99	99,00	99,00	100,00	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
26			Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik										
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan standar pelayanan publik	%	65,00	74,00	84,00	90,00	74,83	77,42	85	90,00	100,00	85,00	
	Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh kementerian	%	4,00	23,00	46,00	69,00	4	4	46	69,00	100,00	69,00	
	Persentase SOP pada seluruh Opd yang tersusun.	%	NA	57,00	71,00	86,00	NA	62,28	71	86,00	100,00	86,00	
	Persentase SOP pada seluruh OPD yang telah diimplementasikan	%	78,00	85,00	95,00	96,00	78	88,88	95	96,00	100,00	95,00	
	Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik	Skor SKM	NA	62,51	67,00	74,00	76,09	N/A	79,94	82,89	83,00	96,31	

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
27			Program pembentukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih										
	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Angka	63	67	70	72,00	64,18	N/A	65,83	65,83	75	87,77	
28			Program Kesejahteraan Anggota Korpri										
	Jumlah anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Provinsi	Angka	11	NA	NA		0	0	0		20	0,00	
	Jumlah anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Nasional	Angka	2	NA	4		0	0	0		6	0,00	

7. Urusan penunjang Sekretariat DPRD

Urusan penunjang sekretariat DPRD memiliki 3 program yang dijabarkan kedalam 7 indikator yakni : 1) Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP; 2) Persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD sesuai SOP; 3) Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD; 4) Persentase Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan; 5) Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP; 6) Jumlah Media Massa yang berkerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau; dan 7) Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi. Dari ke-7 indikator tersebut jika dilihat perkembangan setiap tahunnya terdapat 3 Indikator yang capaiannya sudah 100% yaitu Indikator Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP; indikator Persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD sesuai SOP, indikator Persentase Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan; dan indikator Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP.

Selanjutnya terdapat 2 indikator yang capaiannya meningkat yaitu indikator Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 62 tahun 2017 menjadi 68 tahun 2020 dan indikator Jumlah Media Massa yang berkerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 186 MoU meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 183 MoU. Terdapat 1 indikator yang mengalami perkembangan stagnan yaitu Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi tahun 2020 sebesar 135 orang.

Dilihat dari capaian tahun 2020 dengan target akhir RPJMD terdapat 6 indikator yang berstatus telah mencapai target akhir RPJMD. Sedangkan indikator yang berstatus akan mencapai target akhir RPJMD ada 1, yaitu indikator Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Secara lebih rinci capaian indikator program RPJMD urusan penunjang sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.38

Capaian Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Dewan dan Tingkat Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD sampai Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target				Realisasi Kinerja				Target Akhir RPJMD	% Realisasi Target 2021 Sampai 2020	Status
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah										
	Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP	%	88,00	90,00	92,00	94,00	100	100	100	100	96,00	104,17	
	Persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD sesuai SOP	%	88,00	90,00	92,00	94,00	100	100	100	100	96,00	104,17	
	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Skor	62,00	64,00	66,00	68,00	62	64	66	68	70,00	97,14	
	Persentase Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100,00	100,00	

2			Penataan Peraturan Perundang-undangan											
	Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP	%	88,00	90,00	92,00	94,00	100	100	100	100	96,00	104,17		
3			Program Peningkatan Publikasi, Komunikasi dan Informasi											
	Jumlah Media Massa yang berkerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	MoU	-	-	-	95	-	163	183	186	380	140,00		
	Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi	Orang Kali	-	95	95	135	-	135	135	135	405	100,00		

B. Permasalahan Masing-Masing Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pemerintahan Wajib

a. Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya APM SMA/SMK/MA/MAK, yang pada tahun 2020 mencapai 77,2%
- 2) Masih tingginya Angka Putus sekolah SMA/SMK/MA/MAK, pada tahun 2020 masih sebesar 0,4%, masih di atas standar nasional yaitu sebesar 0,2%.
- 3) Banyaknya SMA/SMK/MA/MAK yang belum terakreditasi minimal B pada tahun 2020 masih sebesar 26,24%,

2) Urusan Kesehatan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Kesehatan adalah:

- 1) Realisasi kinerja dan penyerapan anggaran yang kurang optimal disebabkan:
 - (a) Terdapat rekening belanja yang tidak terealisasi seperti biaya transportasi, honor narasumber, akomodasi dan makan minum karena pandemi Covid-19.
 - (b) Dengan terbitnya keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor/28/KM.7/2020 Tentang tata cara pengelolaan dan rincian alokasi dana cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan gelombang V Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020, maka terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 1.104.000.000 di akhir tahun. Dikarenakan waktu realisasi yang tersedia hanya 3 hari kerja tahun berjalan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan perkara sehingga nilai total besaran pada pagu tambahan tersebut tidak masuk dalam DPA OPD (realisasi keuangan dpt dilakukan). Oleh sebab itu, terjadi selisih pada pagu dan realisasi keuangan, dimana realisasi keuangan >100%.
- 2) Kurangnya tenaga kesehatan terutama Dokter Spesialis RSUD
- 3) Kurangnya sarana rumah sakit RSUD untuk mempertahankan status akreditasi paripurna.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

- 1) ketersediaan anggaran yang kurang mencukupi akibat Refokusing tahap 1 dan 2 sebagai dampak dari kondisi Pandemi Covid-19.

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman:

- 1) Masih luasnya kawasan kumuh yang belum tertangani
- 2) Masih kurangnya akses air bersih/minum yang aman dan akses sanitasi layak

5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat :

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan operasi penegakan perda yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS.
- 2) Terbatasnya jumlah Satlinmas yang berkesempatan untuk meningkatkan kompetensinya dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan
- 3) Terbatasnya kemampuan anggaran untuk menyusun peta rawan kebakaran daerah.
- 4) Masih rendahnya kapasitas desa dan kelurahan dalam menghadapi bencana, dilihat dari rendahnya cakupan desa/kelurahan siaga bencana.
- 5) Belum optimalnya penanganan pasca bencana yang terjadi di kabupaten/kota.

6) Urusan Sosial

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Sosial:

- 1) Masih adanya kelompok-kelompok sasaran (PMKS) yang belum tertangani oleh program dan kegiatan.
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan dan pembinaan lembaga-lembaga penyelenggara layanan sosial

b. Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Tenaga Kerja:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pelatihan dikarenakan kondisi pandemi Covid-19.
- 2) Meningkatnya jumlah pengangguran sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
- 3) Belum optimalnya penanganan kasus ketenagakerjaan yang terjadi.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

- 1) Adanya *refocussing* anggaran akibat Pandemi Covid-19 sehingga anggaran responsif gender dari masing-masing OPD banyak yang tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Belum optimalnya peran tim driver (tim teknis) dalam mendorong pelaksanaan PPRG di Provinsi Kepulauan Riau,
- 3) Masih kurangnya komitmen dukungan OPD dalam penganggaran yang responsif gender.
- 4) Angka rasio KtP termasuk TPPO meningkat disebabkan bertambahnya perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapatkan layanan di unit layanan perlindungan perempuan dan anak di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Urusan Pangan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pangan yaitu:

- 1) Produksi pangan masih belum optimal dan ketergantungan yang tinggi terhadap bahan pangan dari luar daerah/luar negeri.
- 2) harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen di empat Kabupaten tinggi..

4. Urusan Pertanahan

Selama tahun 2020 tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Urusan Pertanahan.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Lingkungan Hidup :

- 1) Menurunnya IKLH ditahun 2020 sebesar 67,00 disebabkan karena Penurunan Kondisi Udara dalam aspek umur kendaraan yang sudah tua dan juga kurangnya penghijauan di Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional capaian ditahun 2020 sebesar 0% dikarenakan pandemi covid-19 dimana seluruh sekolah diliburkan dan ditiadakan penghargaan.
- 3) Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar nominasi Adipura ditahun 2020 capaian nya 0% karena berdasarkan Surat Edaran KLHK No. S.275/PSLB3/PS/PLB.0/7/2020 tanggal 13 Juli 2020 Bahwa Kegiatan Adipura ditiadakan.

6. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- 1) Belum semua anak usia 0-18 tahun dikabupaten/kota memiliki akte kelahiran, dilihat capaian ditahun 2020 sebesar 96,61%

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

- 1) Beberapa Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki Perda tentang kelembagaan masyarakat desa, sehingga pembinaan, penguatan kapasitas kelembagaan masih sangat rendah.
- 2) adanya beberapa kegiatan yang mengalami *Refocusing* sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator program.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

- 1) Masih adanya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*).
- 2) adanya pandemi COVID-19 sehingga anggaran kegiatan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan KB di Provinsi Kepri mengalami *refocussing*.

9. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Perhubungan:

- 1) Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro) tidak encapai target disebabkan Kegiatan pembangunan pelabuhan penyebrangan roro yang bersumber dari APBN tidak ada
- 2) Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas tidak mencapai target disebabkan kegiatan untuk mendukung pencapaian target ini tidak dianggarkan karena keterbatasan pagu anggaran OPD
- 3) Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut tidak mencapai target disebabkan dibutuhkan anggaran yang besar untuk membangun/pengadaan 1 kapal sebesar 50 Milyar

10. Urusan Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika adalah:

- 1) Kurangnya pemanfaatan fasilitas aplikasi PPID
- 2) Keamanan website yang masih belum diupgrade
- 3) Kurangnya kesadaran tiap Perangkat Daerah akan pentingnya peran PPID

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

- 1) Rendahnya keinginan masyarakat membentuk koperasi, kerana lebih menyukai usaha perorangan. Adapun koperasi yang terbentuk cenderung kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan tidak memiliki usaha di sektor riil.
- 2) Masih banyaknya koperasi tidak melaksanakan dan melaporkan hasil RAT.
- 3) Belum ada tindak lanjut (masih menunggu) Keputusan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait usulan rekomendasi pembubaran koperasi.
- 4) Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki produk diterima di pasar modern atau tersertifikasi, disebabkan karena adanya pandemic Covid-19, banyak UMKMyang terdampak usahanya sehingga memicu penurunan skala produksi yang tersertifikasi untuk masuk pasar modern.

12. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Penanaman Modal :

- 1) belum optimalnya capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP) disebabkan oleh target RPJMD terlalu tinggi, dan masih terdapat beberapa kendala kecepatan proses pelayanan karena tim teknis perijinan masih berada di masing-masing perangkat daerah, belum menyatu di DPMPTSP.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pemuda dan Olahraga adalah:

- 1) Indikator jumlah pemuda pelopor, Jumlah pemuda yang berwirausaha, dan Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/internasional tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan tidak diperbolehkannya kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang seperti event-event olahraga sehingga tidak ada peningkatan prestasi dari para atlet yang ada, kemudian juga karena adanya refocusing anggaran yang

mengakibatkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena tidak mendapatkan alokasi anggaran.

14. Urusan Urusan Statistik

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Statistik adalah:

- 1) belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepulauan Riau

15. Urusan Urusan Persandian

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Persandian adalah:

- 1) Terbatasnya dana operasional dan perawatan peralatan persandian seperti kontra penginderaan.
- 2) Kurangnya SDM ASN dengan kualifikasi yang memahami keamanan informasi.
- 3) Minimnya sosialisasi tentang keamanan informasi bagi tenaga operator aplikasi dan website di OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
- 4) Belum adanya kebijakan pengamanan informasi di Pemerintah Provinsi Kepri.
- 5) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi belum maksimal.

16. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Kebudayaan :

- 1) *Refocusing* anggaran pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan anggaran yang digunakan untuk memsosialisasikan perda tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan berdampak besar bagi Dinas kebudayaan dalam mengejar target yang telah ditetapkan pada kinerja bangunan berciri khas melayu.

17. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Perpustakaan:

- 1) Pengunjung Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dikarenakan kondisi Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perpustakaan harus tutup selama beberapa bulan dan hanya buka terbatas dari Hari Senin s/d Jumat (normalnya buka setiap hari).

- 2) Mobil Perpustakaan Keliling tetap berjalan walaupun di sekolah-sekolah saat ini sedang mengadakan pembelajaran daring, tetapi tidak maksimal. Ruang lingkup hanya di kelurahan yang berada di Tanjungpinang, terutama di fasilitas-fasilitas umum.

18. Urusan Kearsipan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Kearsipan adalah:

- 1) Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan Arsip secara baku sampai dengan Tahun 2020 baru mencapai sebanyak 30 OPD, sedangkan untuk BUMD masih 0, dari target 41 OPD dan 3 BUMD. Hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid-19, sehingga target 41 OPD dan 3 BUMD semula direncanakan dengan memberikan bimbingan secara langsung dengan lokus seluruh Sekretariat OPD, namun dengan adanya pandemi ini pembinaan tidak bisa dilakukan secara maksimal.
- 2) Pengelolaan arsip pada BUMD Provinsi tidak optimal dikarenakan tidak adanya SDM yang kompeten untuk bisa membantu pengelolaan arsip dan juga kurangnya Sarana dan Prasarana untuk pengelolaan arsip.

2. Urusan Pilihan

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan:

- 1) Belum optimalnya produksi perikanan budidaya
- 2) Belum optimalnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
- 3) Belum optimalnya status kawasan konservasi perairan
- 4) Belum optimalnya produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

2) Urusan Pariwisata

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pariwisata:

- 1) Ketidaktercapaian target indikator rata-rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau tahun 2020 dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal Maret 2020, di mana dengan adanya wabah Covid-19 tersebut banyak pergerakan masyarakat dan wisatawan, juga pelaksanaan atraksi wisata yang dibatasi.
- 2) Tidak adanya atraksi wisata yang digelar secara regular yang membuat wisatawan bisa betah berlama-lama untuk tinggal.
- 3) Tidak tercapainya target pada indikator rata-rata lama tinggal wisatawan tahun 2020 juga dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan

nusantara yang menjadi faktor pembagi pada capaian realisasi kinerja. Untuk diketahui berdasarkan data dari BPS (*Passenger Exit Survey*) Wisatawan nusantara yang datang ke Kepulauan Riau lebih banyak menginap di rumah teman atau saudara daripada di hotel.

- 4) Dengan adanya wabah pandemi Covid-19, ada kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat dan ekonomi yaitu larangan masuk maupun transit bagi orang asing ke Indonesia, banyak negara yang masih melarang warga negaranya untuk bepergian dan harus menjaga kesehatan sehingga memberi tekanan terhadap perekonomian termasuk sektor Pariwisata.
- 5) Belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara menyebabkan tingkat penyediaan akomodasi dan makan minum yang menurun.
- 6) Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja di Berbagai Sektor Industri, sehingga banyak karyawan yang dirumahkan sehingga berdampak pada minat mereka untuk berwisata.
- 7) Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah Pusat telah memberikan berbagai peraturan termasuk peraturan yang terkait dengan keharusan daerah melakukan penyesuaian dan Pemanfaatan APBD, refocusing anggaran untuk percepatan penanganan dan pencegahan Covid-19, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui TAPD melakukan refocusing pada kegiatan APBD Tahun anggaran 2020.
- 8) Penurunan jumlah kunjungan wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau terkait Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia melalui Menkumham RI yang berlaku sejak 2 April 2020 akibat merebaknya wabah Covid-19 sehingga dampaknya tentu sangat besar terhadap industri pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
- 9) Pandemi Covid-19 juga membuat promosi dan kerjasama kemitraan yang tidak bisa berjalan dengan baik. Dampak dari pandemi tersebut mengakibatkan pembatalan beberapa event dan pameran tidak terselenggara untuk mengurangi kerumunan orang banyak. Pembatalan event/pameran tidak hanya di dalam negeri bahkan juga diluar negeri. Pemerintah Pusat melarang adanya kegiatan yang berskala besar/keramaian.
- 10) Jumlah Pengeluaran Wisatawan tidak mencapai target dikarenakan jumlah kunjungan Wisatawan yang tidak memenuhi target, yang secara otomatis berdampak terhadap total jumlah pengeluaran wisatawan, hal ini disebabkan ada larangan dari negara – negara asing untuk bepergian keluar negeri akibat dari mewabahnya virus Covid-19
- 11) Paket tour yang tidak terjual akibat pandemi Covid-19

- 12) Tidak tercapainya indikator rata-rata tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau disebabkan menurunnya kunjungan wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau yang diakibatkan pandemi Covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19 berdasarkan data yang ada sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat hanya sebanyak 408,005 Wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya (-85,76%), hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau.
- 13) Pandemi covid-19 membuat banyak pelaku ekonomi kreatif yang tidak bisa beroperasi secara optimal hingga ada yang tidak beroperasi sama sekali. Dampak dari pandemi ini banyak produk ekonomi kreatif (sebagai contoh souvenir) yang tidak bisa dijual karena minimnya turis/wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau, yang pada akhirnya dapat menurunkan angka produksi dan penghasilan para pelaku ekonomi kreatif aktif.

3) Urusan Pertanian

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Pertanian :

- 1) Kurangnya benih unggul dan mundurnya jadwal tanam.
- 2) Rendahnya harga karet sehingga petani tidak melakukan panen karet.
- 3) Terjadinya peningkatan kejadian kasus penyakit helminthiasis (cacingan) dilapangan, terbatasnya ketersediaan obat-obatan hewan untuk melakukan pengobatan terhadap ternak yang sakit.

4) Urusan Kehutanan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Kehutanan yaitu:

- 1) Jumlah Produksi Kayu tidak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
- 2) Menurunnya permintaan Kayu andang yang berkaitan dengan kontruksi bangunan.
- 3) Usaha dibidang Kehutanan (Industri Primer) banyak yang tidak lagi berjalan (Perusahaan tutup)

5) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral:

- 1) Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan belum mencapai target disebabkan oleh: belum adanya kajian atau data tentang cekungan air tanah dari Badan Geologi Kementerian

ESDM maupun dari Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum ada penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden; dan Pemberian izin saat ini hanya berdasarkan peta Hidrogeologi dari Badan Geologi Kementerian ESDM; Belum tersosialisasinya secara baik kepada pelaku usaha pemanfaat air tanah akan adanya peraturan yang mempersyaratkan izin dalam pemanfaatan atau pengusahaan air tanah; Adanya Perubahan Kewenangan terkait Pemanfaatan Air Tanah; Adanya Refocusing Anggaran Terkait Penanganan Virus Corona atau Covid 19 Sesuai arahan dari Kepres dan Peraturan Menteri Keuangan yang di tujukan kepada seluruh Kepala Daerah agar seluruh Daerah melaksanakan Refocusing untuk membantu penanganan Covid19.

- 2) Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah tidak tercapai disebabkan terbatasnya jumlah anggaran sehingga target ditahun 2019 tidak tercapai dan diusulkan lagi pada tahun 2020.
- 3) Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku belum mencapai target disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan; Terhambatnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang disebabkan oleh meningkatnya penyebaran pandemi Covid-19 yang terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau; dan Masih kurangnya ketersediaan jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi di bidang pertambangan.
- 4) Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah belum mencapai target disebabkan oleh kurangnya tingkat kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 5) Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur belum mencapai target disebabkan oleh adanya Refocusing Anggaran Terkait Penanganan Virus Corona atau Covid 19 Sesuai arahan dari Kepres dan Peraturan Menteri Keuangan yang di tujukan kepada seluruh Kepala Daerah agar seluruh Daerah melaksanakan Refocusing untuk membantu penanganan Covid19
- 6) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya belum mencapai target disebabkan oleh adanya Refocusing Anggaran Terkait Penanganan Virus Corona atau Covid 19 Sesuai arahan dari Kepres dan Peraturan Menteri Keuangan yang di tujukan kepada seluruh Kepala Daerah agar seluruh Daerah melaksanakan Refocusing untuk membantu penanganan Covid19.

- 7) Masih terdapat sebagian masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang belum menikmati listrik, terutama di daerah terpencil dan kurang mampu dengan wilayah tersebar dikarenakan kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD serta jenis sumber energi primer yang terbatas.
- 8) mobilisasi material ke lokasi pembangkit yang akan dibangun oleh PT. PLN (Persero), tenaga operator (tenaga alih daya) PT. PLN (Persero) yang terbatas serta tanah/jalur yang akan dilalui jaringan distribusi tegangan menengah.
- 9) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia (ASN) yang mengelola data kegiatan perusahaan ketenagalistrikan.
- 10) Adanya Refocusing Anggaran Terkait Penanganan Virus Corona atau Covid 19 Sesuai arahan dari Kepres dan Peraturan Menteri Keuangan yang di tujukan kepada seluruh Kepala Daerah agar seluruh Daerah melaksanakan Refocusing untuk membantu penanganan Covid19.

6) Urusan Perdagangan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Perdagangan :

- 1) Masih adanya jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), disebabkan Minat beli yang masih tinggi terhadap barang yang belum memenuhi standart ketentuan yang berlaku yang dikarenakan harga yang lebih murah dari barang yang sudah memenuhi standar.
- 2) Belum optimalnya nilai ekspor Non Migas, disebabkan oleh lesunya permintaan global, dampak dari pandemic covid-19.

7) Urusan Perindustrian

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Perindustrian yaitu:

- 1) Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang belum mencapai target disebabkan beberapa Pembangunan Sentra masih dalam bentuk Perencanaan
- 2) Jumlah Industri Besar belum mencapai target disebabkan belum optimalnya pengembangan kawasan industri untuk menarik minat investor dengan skala industri besar
- 3) Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas belum mencapai target disebabkan pengurangan Tenaga Kerja Akibat Pandemi Covid-19

- 4) Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal belum mencapai target disebabkan belum optimalnya peningkatan kualitas bahan baku lokal pada industri pengolahan
- 5) Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Industri yang bersertifikasi di Provinsi Kepulauan Riau belum mencapai target disebabkan tidak terlaksananya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM industri yang bersertifikasi akibat COVID-19

8) Urusan Transmigrasi

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Transmigrasi :

- 1) Belum terpenuhinya Rencana Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan Kementerian Desa Tertinggal di Kabupaten Natuna sebagai 144 kawasan pada RPJMN 2015 – 2019 sehingga penetapan kawasan, pembangunan kawasan, dan penempatan warga transmigran yang telah ditargetkan belum dapat terpenuhi.
- 2) Belum selesainya dokumen-dokumen dalam rangka penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi yang diusulkan Kabupaten Lingga sampai saat ini, sehingga proses usulan Kawasan Transmigrasi masih pada penyelesaian dokumen teknis RKT.

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Fungsi Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Fungsi Perencanaan Pembangunan:

- 1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM perencana pembangunan daerah.
- 2) Kurang optimalnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- 3) pembatasan aktivitas tatap muka menyebabkan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kurang optimal

2) Fungsi Keuangan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Fungsi Keuangan :

- 1) belum optimalnya pemanfaatan layanan inovasi teknologi samsat

3) Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan :

- 1) Masih adanya pejabat yang memiliki kualifikasi pendidikan yang belum sesuai dengan ketentuan.
- 2) Sosialisasi terkait disiplin pegawai telah dilakukan oleh BKPSDM, namun perlu ditingkatkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh atasan pegawai masing-masing. Hal ini mendasari bahwa tanggungjawab pembinaan dan pengawasan berada pada atasan langsung pegawai.
- 3) Penilaian kinerja pegawai yang tidak tepat waktu disampaikan oleh masing-masing pegawai.
- 4) Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran pada BKPSDM sehingga berkurang jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Program Peningkatan pada Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4) Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan fungsi penelitian dan pengembangan berjalan dengan baik, dan dapat mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD, tidak ada permasalahan yang dihadapi

5) Fungsi Pengawasan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan yaitu belum tercapainya target Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, karena Penilaian (QA) atas Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

6) Sekretariat Daerah

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Sekretariat Daerah :

- 1) Adanya penyesuaian/penurunan anggaran akibat refocusing penanganan COVID-19.
- 2) Tenaga penyusun perancang peraturan perundang-undangan tidak tersedia, serta kekurangsiapan perangkat daerah pemrakarsa dalam menyampaikan Ranperda yang diusulkan, minimnya koordinasi yang dilakukan kab/kota baik dari eksekutif maupun legislatif dalam proses sinkronisasi pembentukan produk hukum daerah, dan sumber daya manusia yang kurang update terhadap peraturan perundang-undangan sehingga tidak mengetahui perubahan terhadap aturan perundang-undangan yang ada, serta ada beberapa OBH yang berkeinginan bekerjasama namun belum terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 3) Belum terbitnya Peraturan Pemerintah (Juklak) terkait penerbitan regulasi IUJK oleh daerah. Lalu terbit Undang-undang Cipta Kerja yang

menyebutkan bahwa tanggungjawab dan kewenangan serta perizinan berusaha terkait Jasa Konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian pemerintah daerah sampai sekarang masih menunggu kebijakan dimaksud.

- 4) Pelaksanaan evaluasi triwulan BUMD tidak optimal karena tidak ada anggaran tenaga konsultan dalam penelaahan hasil kajian, serta adanya penundaan pembahasan di Pansus DPRD Kepri.
- 5) Belum diterimanya nilai RB dari Kementerian PAN dan RB, sehingga realisasi masih menggunakan hasil penilaian tahun 2019.

7) Sekretariat DPRD

Permasalahan yang masih dihadapi adalah beberapa kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang tidak dapat terlaksana dengan baik karena adanya Pandemi Covid-19

8) Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah menyangkut masalah menjaga stabilitas sosial politik daerah yang kondusif sehingga mengharuskan Badan Kesbangpol terus berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian Ormas, Tokoh Masyarakat dan Lembaga lainnya. Isu-isu radikalisme dan terorisme cukup mengkhawatirkan karena Badan Kesbangpol perlu mencermati masalah ini di daerah. Selain isi-isu masalah diatas Badan Kesbangpol berperan dalam memberantas narkoba yang dapat mengancam generasi bangsa. Badan kesbangpol juga perlu bersinergi dengan pemangku kepentingan lain, Forkopimda, termasuk Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat yang selalu bekerja sama dalam mensosialisasikan nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan di daerah.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil analisis capaian kinerja RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sampai tahun 2020 menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 sampai tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik karena trennya meningkat dan di tahun 2018 dan 2019 sudah mampu melampaui target yang ditetapkan, namun di tahun 2020 realisasinya justru menurun dan target tidak tercapai. Meskipun demikian peningkatan dan pencapaian target Pendapatan Daerah ini belum diikuti oleh pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2017 sampai tahun 2020 target-target yang telah ditetapkan belum pernah ada yang mampu terealisasi, capaiannya masih berkisar di antara 90% - 99% dari target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sedangkan kontribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017-2020 masih didominasi oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat.
2. Capaian kinerja belanja daerah tahun 2017-2020 juga semakin meningkat dan mampu melampaui target pada tahun 2019 dan 2020, yaitu pada tahun 2017 sebesar 79,10%, pada tahun 2018 sebesar 95,13%, dan meningkat menjadi 102,14% di tahun 2019 dan 101,20% di tahun 2020. Proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung dari tahun ke tahun juga semakin baik dan hampir seimbang, pada tahun 2020 proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah 52,41% : 47,59%.
3. Capaian kinerja penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2020 sudah mampu jauh melampaui target RPJMD, dengan persentase capaian sebesar 890,45%. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017, 2018 dan 2019. Besarnya peningkatan penerimaan pembiayaan tersebut didapatkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
4. Capaian kinerja indikator tujuan belum begitu memuaskan, hal tersebut dapat dilihat dari indikator yang sudah mampu mencapai target baru ada tiga (3) atau sebesar 16,67%. Sedangkan indikator yang diperkirakan akan tercapai targetnya

- di akhir periode juga ada delapan (8) atau 44,44%. Yang perlu menjadi catatan adalah masih ada empat (4) indikator atau 22,22% yang kemungkinan akan sulit mencapai target akhir, dan tiga (3) atau 16,67% indikator belum tersedia data.
5. Pencapaian kinerja indikator sasaran RPJMD pada tahun 2020 dibandingkan target akhir RPJMD tergolong cukup baik, sebanyak 50% (25 indikator) kategori telah mencapai target akhir RPJMD, 34% (17 indikator) kategori akan mencapai target, dan yang memerlukan upaya keras untuk mencapai target di akhir periode RPJMD ada 16% (8 indikator).
 6. Pencapaian kinerja indikator program RPJMD pada tahun 2020 dibandingkan target akhir RPJMD tergolong cukup baik, sebanyak 170 indikator (46,7%) kategori telah mencapai target akhir RPJMD, sebanyak 100 indikator (25,9%) kategori akan mencapai target, dan 68 indikator (24,4%) masuk dalam kategori perlu upaya keras untuk mencapai target akhir.
 7. Permasalahan sebagian besar perangkat daerah yang realisasi kinerjanya belum mampu mencapai target akhir RPJMD di tahun 2020 adalah karena terdampaknya alokasi anggaran dan penyelenggaraan program serta kegiatan oleh pandemic covid-19. Dampak tersebut antara lain adanya refocussing anggaran, dan juga tidak dapat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang bersifat pengumpulan orang.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2020, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu ada upaya untuk menjaga konsistensi kinerja keuangan daerah, supaya target yang telah mampu tercapai bisa dipertahankan dalam sisa waktu periode RPJMD, khususnya adalah upaya untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah.
2. Pada indikator tujuan dan sasaran yang belum mampu mencapai target bahkan memerlukan upaya keras untuk mencapai target, diperlukan kerjasama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk mengakselerasi upaya pencapaian target yang ada di sisa periode RPJMD. Khususnya adalah indikator-indikator yang masih belum tersedia datanya, perlu ditentukan penanggungjawab data

dan siapa dan perangkat daerah apa saja yang memberikan kontribusi sehingga di akhir periode atau tahun 2021 ini datanya dapat tersedia.

3. Indikator-indikator yang tingkat pencapaian targetnya rendah sehingga kemungkinan besar sulit tercapai di akhir periode RPJMD perlu dilakukan evaluasi khusus sehingga bisa diakomodir di dokumen perencanaan periode berikutnya (RPJMD 2021-2026).
4. Rumusan-rumusan indikator yang definisi operasionalnya kurang jelas, metode atau formula penghitungannya kurang jelas perlu dipertimbangkan kembali jika akan dipakai di dokumen perencanaan periode sebelumnya.